

BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



KLIPING KORAN

BULAN SEPTEMBER

TAHUN 2026

Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat

NO	JUDUL	HALAMAN

1. Siswa Bertambah, Fasilitas SMAN 17 Terbatas 1
2. DPRD Sumbar Dorong Perusahaan Sawit Optimalkan Pembayaran PAP 3
3. Mantapkan Penegakan Kode Etik, BK DPRD Sumbar Gelar Simulasi Persidangan 5
4. Kualitas Udara Memburuk, Nanda Satria Minta Pemprov Pertimbangkan WFH Dan Sekolah Daring 6
5. Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Imbau Warga Padang Kurangi Aktivitas Luar Ruangan 7
6. Kondisi Udara Menurun, Jaga Kesehatan 8
7. Nanda Satria Imbau Warga Kurangi Aktivityas Luar Runagn 10
8. Wakil Ketua DPRD Sumbar Kawal Optimalisasi PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga 11
9. Wakil Ketua DPRD Sumbar Fokus Bidik Petani Muda 12
10. DPRD Sumbar Kawal Optimalisasi Pajak Air Permukaan dan Sumbangan Perusahaan 14
11. DPRD Sumbar Gelar Paripurna Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 16
12. Genjot PAD, DPRD Sumbar Minta PTSP dan Perusahaan Sawit Taati PAP 18
13. Masyarakat Diminta Patuhi Bayar Pajak, Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas dan ASN di Sumbar Tembus Rp 6 Miliar 19
14. Punya Ikatan Emosional, Nanda Satria Siap Fasilitasi Kegiatan Pemuda Purus 20
15. DPRD Sumbar Bahas Perubahan APBD 2026 untuk Percepat Pemulihan dan Pembangunan 21
16. Perubahan Perda Pendidikan Sumbar Disorot 23
17. Fraksi Golkar Dorong Penguatan Beasiswa dan BOSDA 24
18. Fraksi Golkar Dorong Penguatan Beasiswa dan BOSDA 25
19. Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Desak Transparansi Penataan Belanja dan Efisiensi Program
20. Fraksi DPRD Sumbar Minta Penjelasan Konstruksi Perubahan APBD 2026
21. Fraksi Golkar DPRD Sumbar Dorong Penguatan Beasiswa
22. DPRD Sumbar Sorot Defisit Rp 176,5 Miliar pada APBD-P Perubahan 2026
23. DPRD Sumbar Ingatkan Pentingnya Pemetaan Potensi Fiskal
24. BOSDA dan Mulok Jadi Perhatian dala Revisi Perda Pendidikan
25. Ketua DPRD Sumbar Dorong Sekilah Ramah Anak
26. Muhidi : Jadikan Sekolah Sebagai Tempat yang Aman dan Nyaman bagi Anak
27. Anak Harus Tumbuh Berkarakter
28. Sekolah Harus Jadi Ruang Aman untuk Membentuk Karakter Anak
29. Muhidi Minta Wakil Kepala Sekolah Jadi Penggerak, Bukan Sekadar Pendamping Kepala Sekolah
30. Fraksi PDIP-PKB Minta Pemprov Sumbar Agresif Gali Potensi PAD
31. Muhidi Tegaskan Sekolah Harus Jadi Tempat Aman Bagi Anak
32. Serikat Buruh danb Ojol Serahkan 10 Tuntutan ke DPRD Sumbar
33. DPRD Sumbar Kejar Rp. 114 Miliar
34. Pemberdayaan Ekonomi Perlu Perhatian Serius
35. Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Soroti Kemandirian Fiskal dan Pemulihan Bencana
36. Fraksi DPRD Sumbar Soroti Penurunan PAD dan Pemulihan Bencana
37. Ketua DPRD Sumbar Berikan Bantuan Benih dan Pakan Ikan Kerapu
38. DPRD Sumbar Paripurna Nota Pengantar Ranperda APBD 2027
39. Sumbar Kewalahan Penuhi Ekspor Ikan Karepu ke HongKong

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SELASA 1 SEPTEMBER 2026	5

SISWA BERTAMBAH, FASILITAS SMAN 17 TERBATAS

KEBIJAKAN zonasi membuka pintu SMAN 17 Padang bagi anak-anak Air Pacah. Masalahnya, ketika jumlah siswa terus bertambah, fasilitas sekolah belum ikut berlari.

Sekolah yang lahir dari inisiatif warga itu kini membutuhkan tambahan ruang kelas, laboratorium, UKS, musala hingga sekretariat OSIS. Jika tidak segera ditangani, sekolah yang semula menjadi solusi atas persoalan akses pendidikan justru berpotensi menghadapi persoalan baru: daya tampung dan fasilitas yang tidak sebanding dengan kebutuhan.

Persoalan itu disampaikan langsung siswa dan guru kepada Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, saat reses di SMAN 17 Padang, Kelurahan Air Pacah, Kamis (20/8).

Sebelum SMAN 17 berdiri, sistem zonasi PPDB membuat sebagian calon siswa Air Pacah kesulitan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri lain. SMAN 5 Padang di Balai Baru, salah satu sekolah terdekat, dinilai terlalu jauh.

SMAN 17 kemudian hadir sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Sekolah diinisiasi pada 2021 dan mulai dibangun pada 2022.

Namun pertumbuhan peserta didik kini menuntut lebih banyak ruang. RKB menjadi kebutuhan paling mendesak, terutama untuk mengantisipasi lulusan SMP di zona Air Pacah pada tahun ajaran mendatang.

Kepala SMAN 17 Padang, Arnaldy, mengatakan jumlah siswa terus meningkat. Karena itu, pembangunan fasilitas tidak bisa hanya mengikuti kemampuan anggaran, tetapi harus mengejar kebutuhan nyata di lapangan.

Selain RKB, sekolah mengusulkan laboratorium TIK dan IPA, ruang UKS, fasilitas ibadah, serta sekretariat OSIS.

Keluhan siswa menunjukkan persoalan tersebut bukan sekadar daftar kebutuhan dalam proposal.

"Kami sangat membutuhkan musala, Pak. Lokasi ibadah saat ini jauh dari area belajar. Kami sering terlambat masuk kelas," ujar seorang siswa.

Ruang UKS juga hanya mampu menampung satu ranjang. Kondisi ini menjadi persoalan ketika siswa membutuhkan penanganan medis, khususnya saat upacara bendera.

Di tengah keterbatasan itu, dukungan terhadap sekolah tetap berjalan. Arnaldy menyebut Evi Yandri sudah membantu sejak awal pembangunan. Akses jalan menuju sekolah dibangun melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) Evi dan selesai bahkan sebelum gedung sekolah rampung.

Dukungan terbaru berupa perjuangan bantuan Chromebook melalui dana pokir untuk menunjang digitalisasi pembelajaran dan ujian siswa.

Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, mengapresiasi konsistensi Evi Yandri dalam mendorong pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.

Evi menegaskan pendidikan harus menjadi prioritas karena menyangkut kualitas sumber daya manusia. Menurut legislator Partai Gerindra itu, arah tersebut sejalan dengan visi Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang perlu diterjemahkan hingga tingkat daerah.

"Kualitas SDM adalah hal mendasar untuk kemajuan negara. Pintu utamanya adalah memperbaiki sektor pendidikan," tegasnya.

Evi memastikan seluruh aspirasi SMAN 17 telah dicatat untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan anggaran daerah berikutnya. Namun ia mengakui pembangunan harus dilakukan bertahap dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak.

Pesan Evi kepada siswa pun tegas: jangan rusak masa depan dengan narkoba, tawuran, atau seks bebas. "Jangan pernah coba-coba. Sekali terjebak, masa depan rusak. Ingat pengorbanan orang tua di rumah. Fokuslah belajar dan kejar cita-cita," katanya.

Kini tantangannya bukan lagi sekadar menghadirkan sekolah di tengah kawasan yang terjepit persoalan zonasi. SMAN 17 Padang harus dibuat benar-benar layak menjadi sekolah pilihan warga—bukan sekadar sekolah yang tersedia karena zonasi. (*)

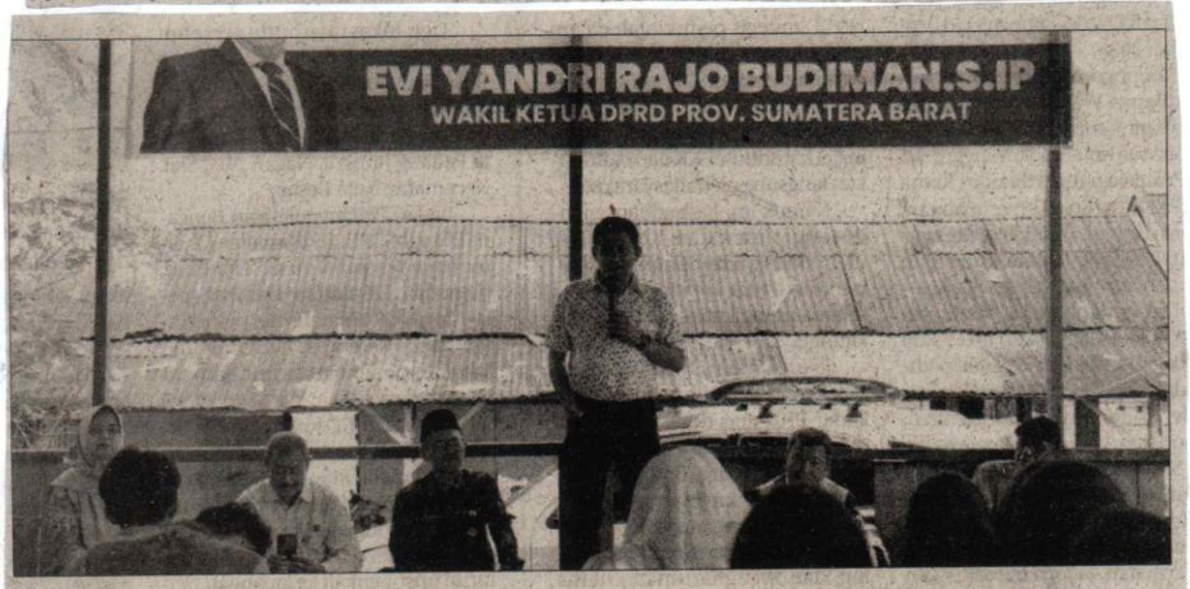


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

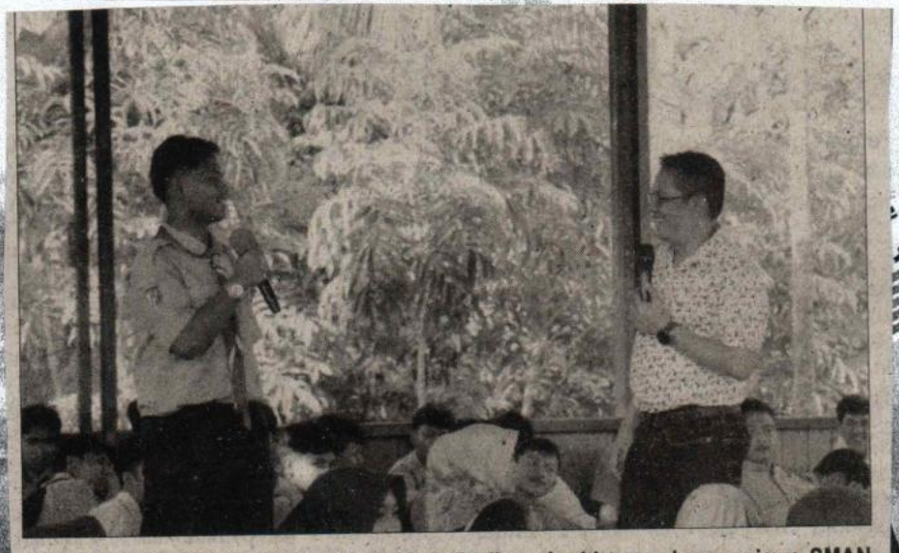
KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman bersama guru, siswa dan lainnya dalam reses perseorangan di SMAN 17 Padang, Kelurahan Air Pacah, Padang, Kamis (20/8).



Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman memberi sambutan dalam reses perseorangan di SMAN 17 Padang, Kelurahan Air Pacah, Padang, Kamis (20/8).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman berbincang dengan siswa SMAN 17 Padang, Kelurahan Air Pacah, Padang, Kamis (20/8).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 1 SEPTEMBER 2026	12

DPRD Sumbar Dorong Perusahaan Sawit Optimalkan Pembayaran PAP

DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar untuk segera melunasi kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP). Langkah ini diambil menyusul tingginya nilai tunggakan PAP sektor perkebunan di daerah tersebut yang belum tertagih, yakni mencapai Rp114,10 miliar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menyampaikan, kontribusi komoditas sawit dan turunannya sangat dominan terhadap perekonomian daerah. Pada semester I 2026, sektor ini menyumbang 85,39 persen dari total nilai ekspor Sumbar yang menembus US$1,568 miliar.

"Dengan kontribusi komoditas sawit mencapai 85,39 persen dari total ekspor, perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar jangan ada alasan lagi untuk tidak membayar PAP," katanya, Kamis (27/8).

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, dari 41 perusahaan perkebunan yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak PAP dengan total kewajiban Rp114,28 miliar, penerimaan yang masuk baru sebesar Rp179,70 juta.

Tunggakan paling besar tercatat di Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp77,77 miliar, diikuti Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, dan Sijunjung Rp496,18 juta.

Nanda menegaskan, penerapan tarif pajak tersebut dibuat akurat berdasarkan hasil kajian matang bersama para ahli agar tidak merugikan pihak korporasi.

"Kalau dengan perhitungan yang telah ditetapkan, perusahaan-perusahaan yang ada menilai tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak mereka, Pemprov dan DPRD membuka ruang diskusi untuk mencari solusinya," ungkapnya.

Dikatakannya, guna memacu penagihan, DPRD Sumbar menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengaturan BUMN serta Direktur Utama PT Semen Indonesia (SIG) untuk membahas kewajiban perusahaan BUMN dan anak usahanya.

Ia juga meluruskan isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, penarikan PAP difokuskan kepada korporasi besar pengguna air permukaan, bukan ditujukan kepada masyarakat umum.

Sebelumnya, dari 60 perusahaan yang diidentifikasi memiliki potensi PAP, sebanyak 19 perusahaan dinyatakan tidak memenuhi kriteria verifikasi, sehingga 41 perusahaan ditetapkan resmi sebagai wajib pajak. *



KLIPING BERITA



SUASANA *rapat di DPRD Sumbar membahas pengoptimalan penerimaan daerah dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan besar di Sumbar.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria*



FOTO *bersama saat diskusi optimalisasi penerimaan daerah dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan besar, di Kabupaten Sijunjung.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat diskusi optimalisasi penerimaan daerah dan Pajak Air Permukaan dari perusahaan sawit.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 3 SEPTEMBER 2026	12

Mantapkan Penegakan Kode Etik, BK DPRD Sumbar Gelar Simulasi Persidangan

BADAN Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar simulasi persidangan etik di ruang sidang khusus BK DPRD Sumbar. Langkah ini dilakukan untuk memantapkan tata cara dan prosedur penegakan kode etik serta tata tertib kedewanan secara profesional dan terukur.

Simulasi ini diikuti lima anggota BK DPRD Sumbar, yakni Ketua BK Bakri Bakar (NasDem), Wakil Ketua Muzli M. Nur (PAN), serta tiga anggo ta yaitu Zarfi Deson (Golkar), Irsyad Syafar (PKS), dan Bagas Panyusunan Nasution (PDIP-PKB).

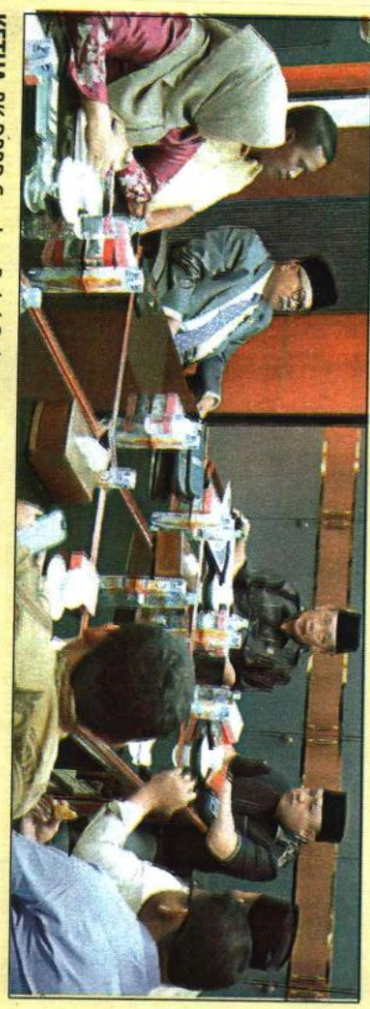
Wakil Ketua BK DPRD Sumbar, Muzli M. Nur menegaskan, ketersediaan fasilitas ruang sidang khusus ini menjadi bukti kesiapan kelembagaan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran etik sesuai mekanisme.

Meski instrumen persidangan formal telah siap, BK tetap mengedepankan fungsi pembinaan. Sejauh ini, pimpinan BK telah melayangkan beberapa teguran informal melalui pimpinan fraksi masing-masing.

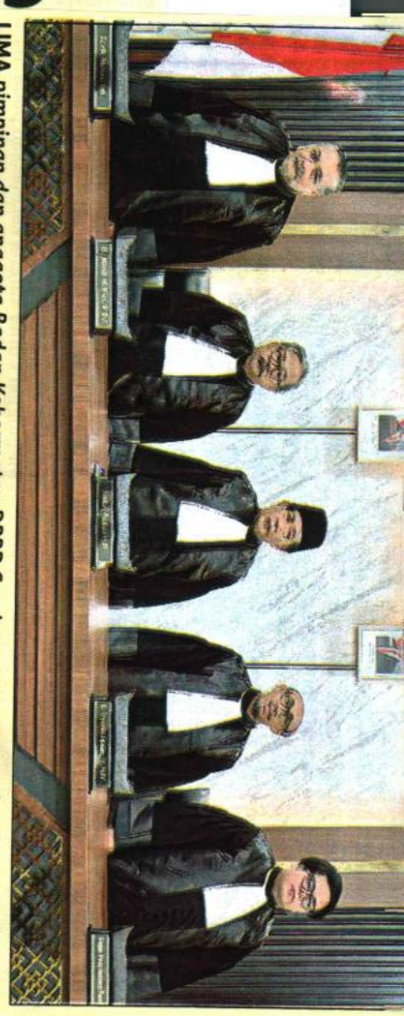
"DPRD Sumbar sudah memiliki ruang sidang untuk penegakan kode etik dan tata tertib dewan. BK juga telah melakukan sejumlah teguran melalui fraksi-fraksi secara informal," kata Muzli.

Ia menambahkan, peran utama BK bukanlah menjatuhkan sanksi, melainkan menjaga kehormatan, kredibilitas, dan martabat lembaga legislatif. Simulasi persidangan ini penting agar seluruh pimpinan dan anggota BK memiliki pemahaman seragam mengenai alur persidangan formal jika sewaktu-waktu ditemukan kasus berat.

Melalui penguatan mekanisme internal ini, seluruh anggota DPRD Sumbar diharapkan makin disiplin dan menjadikan kode etik sebagai pedoman utama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan di tengah masyarakat. *



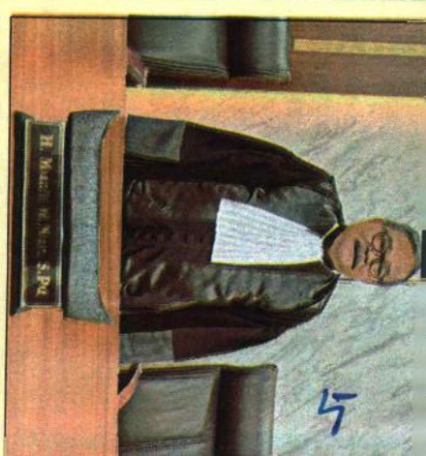
KETUA *BK DPRD Sumbar Bakri Bakar memimpin simulasi persidangan etik yang diikuti anggota BK DPRD Sumbar lainnya di ruang sidang khusus BK DPRD Sumbar.*



LIMA *pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Sumbar saat mengenakan toga persidangan dalam kegiatan simulasi penegakan kode etik di ruang sidang BK DPRD Sumbar.*



KETUA *BK DPRD Sumbar Bakri Bakar.*



WAKIL *Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M. Nur*

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	**JUMAT, 4 SEPTEMBER 2026**	2

Kualitas Udara Memburuk, Nanda Satria Minta Pemprov Pertimbangkan WFH dan Sekolah Daring


NANDA SATRIA

PADANG, KP - Kualitas udara di Kota Padang dan sekitarnya mengalami penurunan akibat diselimuti kabut asap yang diduga kuat merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) provinsi tetangga. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat sensitivitas pernapasan tinggi.

"Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak," ujar Nanda Satria, Kamis (3/9).

Ia meminta masyarakat tidak menganggap sepele fenomena kabut asap ini. Selain membatasi mobilitas luar ruang, warga diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, mencukupi asupan air putih, serta beristirahat yang cukup.

Melihat tren penurunan kualitas udara yang kian mengkhawatirkan, Nanda juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengkaji opsi Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menerapkan pembelajaran jarak jauh (daring) bagi siswa sekolah.

"Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat," tegasnya.

Nanda menekankan bahwa keselamatan anak-anak sekolah harus menjadi prioritas utama. Jika indeks kualitas udara sudah berada pada kategori bahaya atau tidak sehat, opsi belajar dari rumah perlu segera diaktifkan tanpa menunggu situasi memburuk.

Langkah pemantauan berkala dan kesiapsiagaan tanggap darurat ini diharapkan turut diterapkan oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar yang terdampak fenomena serupa. **(fai)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 4 September 2026 (21 Rabul Awal 1448 H)	3

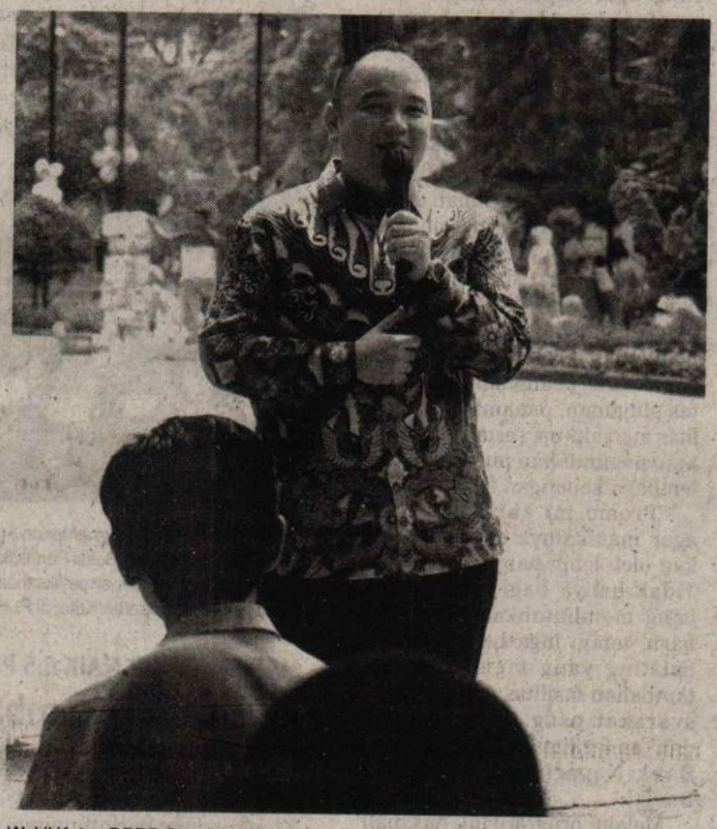
Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Imbau Warga Padang Kurangi Aktivitas Luar Ruangan

Padang, Singgalang

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, meminta masyarakat Kota Padang meningkatkan kewaspadaan menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara belum normal. Menurut Nanda, kabut asap yang menyelimuti Kota Padang diduga kuat merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tetangga.

"Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Saat kualitas udara menurun, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang tidak mendesak," ujar Nanda, Kamis (3/9).

Ia mengingatkan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan warga dengan riwayat gangguan pernapasan untuk lebih berhati-hati. Selain membatasi mobilitas luar ruang, Nanda mengimbau masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, dan memperbanyak minum air putih.



Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), **Nanda Satria**

Untuk meminimalkan paparan udara buruk, Nanda mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) jika kondisi terus memburuk. Langkah mitigasi sementara ini dinilai penting untuk mengurangi mobilitas warga.

"Kami meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika udara sudah tidak sehat. Ini bukan untuk mengurangi pelayanan publik, melainkan upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Nanda meminta dinas terkait bersiap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring jika kualitas udara membahayakan anak-anak. Menurutnya, anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, pembelajaran daring bisa menjadi alternatif sementara.

Ia menegaskan langkah tersebut harus berbasis data pemantauan kualitas udara berkala hasil koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait. Nanda berharap keselamatan warga menjadi prioritas utama dan kabut asap ini segera berlalu. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumbar yang terdampak untuk segera mengambil langkah serupa.

(401)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 4 SEPTEMBER 2026	9

Kondisi Udara Menurun, Jaga Kesehatan

Padang, Rakyat Sumbar — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria mengatakan masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan selama kondisi udara belum kembali normal.

"Kondisi kualitas udara di Kota Padang menurun. Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat," ucap Nanda, Kamis, (3/9)..

Ia menyampaikan, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang diduga kuat merupakan dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah provinsi tetangga.

"Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak," ujar Nanda Satria.

Ia menyebutkan, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi hingga kondisi udara membaik. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat, bergizi, serta mencukupi kebutuhan cairan.

"Di tengah kondisi seperti ini, menjaga kesehatan sangat penting. Konsumsi makanan bergizi dan sehat, cukup minum, serta istirahat yang cukup. Jangan sampai kondisi udara yang buruk kemudian menimbulkan masalah kesehatan baru," katanya.

Nanda meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) terhadap pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar apabila kondisi kualitas udara terus memburuk.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah mitigasi sementara sekaligus mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi kabut asap.

"Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat," tegasnya.

Nanda meminta pemerintah melalui instansi terkait mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran secara daring apabila kualitas udara di Padang dan daerah terdampak berada pada kondisi yang tidak aman bagi aktivitas anak-anak di luar ruangan.

"Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar di sekolah, maka pembelajaran daring dapat menjadi alternatif sementara sampai kualitas udara kembali membaik," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut harus dilakukan berdasarkan pemantauan kualitas udara dan koordinasi pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Nanda berharap pemerintah terus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala serta mengambil langkah cepat apabila kondisi semakin memburuk.

"Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita berharap kondisi kabut asap ini segera berlalu dan kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kembali normal," bebernya. **(byr/rel)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	.MAN



WAKIL Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 4 SEPTEMBER 2026	1

Kualitas Udara di Padang Menurun Gegara Kabut Asap

Nanda Satria Imbau Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan

PADANG, METRO

Kondisi kualitas udara di Kota Padang yang menurun akibat kabut asap mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Nanda Satria. Ia mengimbau masyarakat untuk

meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan selama kondisi udara belum kembali normal.

Nanda Satria mengatakan, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang diduga kuat merupakan dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah provinsi tetangga. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas udara di Padang ikut terdampak.

"Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak," ujar Nanda Satria.

Nanda Satria meminta masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara, untuk lebih berhati-hati. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi sampai kondisi udara membaik. Selain membatasi aktivitas di luar rumah, Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat, bergizi, serta mencukupi kebutuhan cairan.

"Di tengah kondisi seperti ini, menjaga kesehatan sangat penting. Konsumsi makanan bergizi dan sehat, cukup minum, serta istirahat yang cukup. Jangan sampai kondisi udara yang buruk kemudian menimbulkan masalah kesehatan baru," ujarnya.

Dorong WFH bagi ASN Pemprov Sumbar

Untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap udara yang tidak sehat, Nanda Satria juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar apabila kondisi kualitas udara terus memburuk.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah mitigasi sementara sekaligus mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi kabut asap.

"Kita meminta Pemprov mempertimbangkan WFH bagi pegawai jika kondisi udara memang sudah tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat," tegasnya.

Sekolah Diminta Pertimbangkan Pembelajaran Daring

Nanda Satria juga meminta pemerintah melalui instansi terkait mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran secara daring apabila kualitas udara di Padang dan daerah terdampak berada pada kondisi yang tidak aman bagi aktivitas anak-anak di luar ruangan.

"Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar di sekolah, maka pembelajaran daring dapat menjadi alternatif sementara sampai kualitas udara kembali membaik," ujarnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut harus dilakukan berdasarkan pemantauan kualitas udara dan koordinasi pemerintah daerah bersama instansi terkait. Ia pun berharap pemerintah terus melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala serta mengambil langkah cepat apabila kondisi semakin memburuk.

"Yang paling penting sekarang adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita berharap kondisi kabut asap ini segera berlalu dan kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kembali normal. Untuk pemerintah kabupaten/kota di Sumbar yang terkena dampak kabut asap juga melaksanakan hal tersebut," tutupnya.(*)



NANDA SATRIA
Wakil Ketua DPRD Sumbar



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SABTU, 5 SEPTEMBER 2026	3

Temui Direksi SIG

Wakil Ketua DPRD Sumbar Kawal Optimalisasi PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga

PADANG, METRO

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) dan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang beroperasi di Sumbar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menemui jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) selaku perusahaan induk PT Semen Padang, Rabu (2/9). Dalam pertemuan itu Nanda turut didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemprov Sumbar.

Kedatangan Nanda Satria bersama jajaran OPD Pemprov Sumbar diterima langsung Direktur Utama SIG, Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG, Sigit Prastowo, dan Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Zulkarnain Lubis, beserta jajaran manajemen SIG dan PT Semen Padang.

Dalam pertemuan itu dibahas kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Semen Padang serta kewajiban PAP perusahaan tersebut.

Nanda menyampaikan apresiasi atas dukungan SIG dan PT Semen Padang yang selama ini telah ikut berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada SIG dan PT Semen Padang karena selama ini selalu mendukung pembangunan di Sumatera Barat," kata Nanda.

Dikatakannya selama beberapa tahun terakhir PT Semen Padang telah memberikan kontribusi melalui Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar setiap tahunnya kepada Pemprov. Ia berharap pada tahun ini kontribusi tersebut dapat ditingkatkan sehingga bisa memperkuat PAD Sumbar.

"Beberapa tahun belakangan Semen Padang telah memberikan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar. Kami berharap ada peningkatan jumlahnya pada tahun ini," ujarnya.

Selain kontribusi tersebut, Nanda juga mendorong optimalisasi penerimaan PAP dari PT Semen Padang. Upaya serupa, katanya, juga tengah dilakukan terhadap perusahaan perkebunan berskala besar di Sumbar, khususnya sektor kelapa sawit yang memanfaatkan air permukaan untuk kepentingan usaha.

Dorongan itu dilakukan mengingat masih besarnya kewajiban PAP sektor perkebunan yang belum tertagih.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, terdapat 41 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan sektor perkebunan dengan total kewajiban mencapai Rp114,28 miliar. Namun, pembayaran yang diterima Bapenda baru sekitar Rp179,70 juta. Dengan demikian, masih terdapat pajak terutang sekitar Rp114,10 miliar.

Tunggakan tersebut tersebar di sejumlah daerah. Terbesar berada di Pasaman Barat sebesar Rp77,77 miliar, disusul Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, dan Sijunjung sekitar Rp496,18 juta.

Nanda menegaskan, optimalisasi PAP sektor perkebunan menjadi salah satu fokus yang dikawal DPRD karena besarnya kontribusi komoditas sawit terhadap perekonomian dan ekspor Sumbar.

Pada semester I 2026, produk sawit dan turunannya menyumbang 85,39 persen dari total ekspor Sumbar yang mencapai US$1,568 miliar.

"Dengan kontribusi komoditas sawit mencapai 85,39 persen dari total ekspor Sumbar, hendaknya tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar yang ada di Sumbar ini untuk tidak membayar kewajiban PAP mereka," ujar Nanda.

Ia mengatakan, DPRD bersama Pemprov Sumbar sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi terkait penerapan PAP ini. Maka dari itu, perusahaan yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut.

Nanda menegaskan, kebijakan PAP yang dijalankan telah melalui pembahasan dan kajian bersama antara DPRD dan Pemprov dengan melibatkan para ahli. Perhitungan kewajiban pajak setiap perusahaan juga telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, DPRD dan Pemprov Sumbar tetap membuka ruang dialog bagi perusahaan yang memiliki perhitungan berbeda terkait kewajiban PAP.

"Kalau dengan perhitungan yang telah ditetapkan, perusahaan menilai tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak mereka, Pemprov dan DPRD membuka ruang diskusi untuk mencari solusinya," ujarnya.

Untuk mempercepat optimalisasi penerimaan PAP ini, terang Nanda, dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk mendorong pengoptimalan dari perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan BUMN.

"Selanjutnya kami juga akan berkomunikasi dengan BP BUMN. Kita berharap optimalisasi penerimaan PAP dan Sumbangan Pihak Ketiga ini dapat menambah PAD sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Pemprov Sumbar dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama SIG, Indriefffouny Indra, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara manajemen SIG dan PT Semen Padang dengan Pemprov Sumbar dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami siap bersinergi memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Barat. Pembahasan hari ini menjadi masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti," tukasnya. **(rgr/rel)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 5 SEPTEMBER 2026	7

Wakil Ketua DPRD Sumbar Fokus Bidik Petani Muda

PERGANTIAN kepemimpinan di tubuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumbar datang ketika sektor pertanian menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar produksi: siapa yang akan menggarap sawah dan mengelola sektor pangan di masa depan?

Pertanyaan itu menjadi pekerjaan rumah utama Evi Yandri Rajo Budiman, Wakil Ketua DPRD Sumbar yang resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD HKTI Sumbar periode 2026–2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Sumbar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9) lalu.

Evi langsung menempatkan regenerasi petani sebagai salah satu agenda utama kepengurusannya. Menurut dia, rendahnya kesejahteraan petani membuat profesi tersebut semakin kurang diminati generasi muda.

"Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita, namun faktanya saat ini semakin sedikit anak muda yang mau turun ke sawah atau menjadi petani. Ini merupakan alarm keras bagi kita semua," tegas Evi.

Data BPS memperlihatkan betapa strategisnya persoalan tersebut. Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat Indonesia memiliki 27,37 juta rumah tangga petani, sementara petani milenial berusia 19–39 tahun berjumlah sekitar 6,18 juta orang, atau 21,93 persen dari petani.

Di Sumbar, tantangan regenerasi itu berhadapan dengan kebutuhan pangan yang tetap besar. BPS mencatat produksi padi Sumbar pada 2025 mencapai 1,382 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 1,93 persen dibandingkan 2024. Namun luas panennya justru menyusut 3,79 persen menjadi 284.076 hektare.

Angka tersebut menunjukkan persoalan pertanian tidak cukup dijawab dengan mengejar luas lahan. Produktivitas, teknologi, efisiensi dan nilai tambah menjadi semakin penting ketika lahan panen menyusut sementara kebutuhan pangan harus tetap dipenuhi.

Karena itu, Evi ingin HKTI mendorong model pertanian yang lebih modern dan menguntungkan. Teknologi, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi menarik anak muda kembali ke sektor pertanian.

"Tugas besar HKTI ke depan adalah memastikan pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi, sekaligus merancang program inovatif berbasis teknologi agar generasi muda kembali bangga menjadi petani modern," ujarnya.

Agenda tersebut mendapat penekanan dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Andi Muhammad Syakir, yang hadir mewakili Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono. Ia meminta pengurus baru tidak kehilangan fokus pada tujuan utama organisasi: meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat petani serta masyarakat perdesaan. HKTI, kata Andi, harus memperkuat ekosistem agribisnis Sumbar, terutama melalui hilirisasi pertanian, penguasaan teknologi dan kemandirian pangan.

"HKTI memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, serta martabat insan tani dan penduduk perdesaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Sumbar Nurkhalis Dt Bijo Dirajo dikukuhkan sebagai Ketua DPC HKTI Limapuluh Kota. Pengukuhan juga dilakukan terhadap jajaran DPC HKTI kabupaten dan kota se-Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyatakan, Pemprov Sumbar siap berjalan bersama HKTI memperkuat ekosistem pertanian dan mempercepat regenerasi petani. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya kemandirian bangsa dan swasembada pangan.

Kini tantangan Evi dan jajaran HKTI Sumbar bukan sekadar menjalankan organisasi. Ukurannya lebih nyata: membuat bertani lebih menguntungkan, teknologi lebih dekat dengan petani, hasil panen punya nilai tambah, dan anak muda melihat sawah sebagai masa depan—bukan masa lalu. (*)





WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri menerima bendera pataka usai terpilih secara aklamasi menjadi ketua HKTI Sumbar.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri menyampaikan kata sambutan usai terpilih secara aklamasi menjadi ketua HKTI Sumbar.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri mengibarkan bendera pataka usai terpilih secara aklamasi menjadi ketua HKTI Sumbar.

BREAKING NEWS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 7 September 2026 (24 Rabiul Awal 1448 H)	8

DPRD Sumbar Kawal Optimalisasi Pajak Air Permukaan dan Sumbangan Perusahaan

Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Nanda Satria, terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) dan Sumbangan Pihak Ketiga dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Nanda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar menemui jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) selaku induk usaha PT Semen Padang di Jakarta, Rabu (2/9). Pertemuan tersebut membahas kewajiban PAP dan kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga dari PT Semen Padang.

Kedatangan rombongan disambut oleh Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, dan Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis.

Nanda mengapresiasi kontribusi SIG dan PT Semen Padang terhadap pembangunan daerah selama ini. Ia mencatat PT Semen Padang rutin menyumbang sekitar Rp10 miliar per tahun kepada Pemprov Sumbar.

"Kami berharap jumlah kontribusi tahun ini meningkat untuk memperkuat PAD Sumbar," ujar Nanda.

Selain Semen Padang, DPRD Sumbar juga membidik optimalisasi PAP dari sektor perkebunan kelapa sawit skala besar. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, ada 41 perusahaan perkebunan wajib PAP dengan total kewajiban Rp114,28 miliar. Namun, realisasi pembayaran baru mencapai Rp179,70 juta, sehingga menyisakan tunggakan Rp114,10 miliar.

Tunggakan terbesar berada di Pasaman Barat senilai Rp77,77 miliar. Disusul Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Solok Selatan (Padang Aro) Rp3,56 miliar, dan Sijunjung Rp496,18 juta.

Nanda menegaskan, penagihan PAP sektor perkebunan menjadi fokus utama karena industri sawit mendominasi perekonomian daerah. Pada semester I/2026, produk sawit menyumbang 85,39 persen dari total ekspor Sumbar yang mencapai US$1,568 miliar.

"Melihat besarnya kontribusi ekspor tersebut, tidak ada alasan bagi perusahaan perkebunan besar untuk mangkir dari kewajiban PAP," tegasnya.

Penerapan PAP ini telah melalui kajian hukum dan melibatkan para ahli. Meski demikian, Pemprov dan DPRD Sumbar tetap membuka ruang dialog jika perusahaan memiliki keberatan atau perhitungan berbeda terkait nominal pajak.

Untuk mempercepat penyelesaian tunggakan, DPRD dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Langkah ini guna mendorong kepatuhan perusahaan perkebunan di bawah naungan negara.

Sementara itu, Direktur Utama SIG Indriefffouny Indra menyambut baik ruang diskusi ini sebagai momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

"Kami siap bersinergi dan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Sumatra Barat. Hasil pembahasan hari ini akan segera kami tindak lanjuti," kata Indriefffouny. (*)









Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, **Nanda Satria**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 7 SEPTEMBER 2026	9

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Nota Pegantar Ranperda Perubahan APBD 2026

Padang, Rakyat Sumbar—Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mengatakan berdasarkan nota pengantar yang disampaikan gubernur dapat diketahui rencana anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD 2026, mencakup rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

"Pendapatan daerah, ditargetkan Rp6.610.067.107.969, meningkat sebesar Rp315.844.448.141, dari target yang ditetapkan pada APBD 2026, yaitu sebesar Rp6.294.222.659.828," kata Muhidi, saat Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang Jumat, (4/9).

Ia melanjutkan, sedangkan untuk belanja daerah, direncanakan sebesar Rp6.979.299.231.222,56, bertambah sebesar Rp570.015.531.39,56, dari yang ditetapkan pada tahun 2026.

"Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit murni sebesar Rp. 176.564.079.635,56 yang perlu dicarikan solusinya pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2026," ucap Muhidi.

Menurut Muhidi, setelah penyampaian nota pengantar, dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi.

Ini sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018.

Ia menambahkan, masing-masing fraksi, supaya menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.

"Pandangan Umum Fraksi-fraksi , supaya memberikan solusi terkait strategi dan upaya menutup defisit anggaran yang cukup besar, baik dari optimalisasi pendapatan daerah maupun melalui rasionalisasi dan efektivitas belanja daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan rancangan Ranperda Perubahan tentang APBD tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung yang salah satunya adalah nota keuangan.

"Nota keuangan Perubahan APBD 2026 secara substansi memuat penjelasan atau gambaran kondisi dan proyeksi serta kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta perkembangan dan tantangan dalam rangka penyusunan perubahan APBD Provinsi Sumbar 2026," pungkas Mahyeldi. (*)



GUBERNUR Sumbar Mahyeldi menyampaikan nota pengantar saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan M. Iqra Chissa Putra menerima nota pengantar dari Gubernur Sumbar Mahyeldi saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan M. Iqra Chissa Putra mengetuk palu saat membuka rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan M. Iqra Chissa Putra saat mengikuti rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (4/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 7 SEPTEMBER 2026	2

Genjot PAD, DPRD Sumbar Minta PTSP dan Perusahaan Sawit Taati PAP

WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (tujuh dari kiri) foto bersama Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra (enam dari kiri) beserta jajaran direksi SIG, PT Semen Padang, dan OPD Pemprov Sumbar usai pembahasan optimalisasi PAD.*

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mendesak pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP) dan Sumbangan Pihak Ketiga. Salah satu langkah terobosan dilakukan dengan menemui langsung direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan PT Semen Padang (PTSP), baru-baru ini.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, serta Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis.

Nanda mengapresiasi PTSP yang rutin menyetor Sumbangan Pihak Ketiga sekitar Rp10 miliar per tahun kepada Pemprov. Namun, ia berharap kontribusi tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun ini demi memperkuat struktur APBD.

Di sisi lain, Nanda menyoroti tingginya tunggakan PAP sektor perkebunan kelapa sawit yang mencapai Rp114,10 miliar dari total kewajiban Rp114,28 miliar dari 41 perusahaan. Pembayaran yang terealisasi ke Bapenda baru menyentuh Rp179,70 juta.

Tunggakan terbesar berada di Pasaman Barat yakni Rp77,77 miliar, disusul Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Padang Aro Rp3,56 miliar, dan Sijunjung Rp496,18 juta.

"Dengan kontribusi komoditas sawit mencapai 85,39 persen dari total ekspor Sumbar, hendaknya tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar yang ada di Sumbar ini untuk tidak membayar kewajiban PAP mereka," tegas Nanda.

Guna mempercepat penagihan, DPRD dan Pemprov Sumbar membuka ruang dialog terkait skema perhitungan pajak, serta siap berkomunikasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk mengawal kepatuhan BUMN perkebunan.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan menindaklanjuti seluruh poin masukan demi mendukung pembangunan di Sumatera Barat. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 7 SEPTEMBER 2026	1

MASYARAKAT DIMINTA PATUH BAYAR PAJAK

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas dan ASN di Sumbar Tembus Rp6 Miliar

PADANG, KP - Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar, Nofrizon, menyoroti tingginya tunggakan pajak kendaraan dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 2.000 kendaraan dinas berpelat merah dan 3.890 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumbar tercatat belum memenuhi kewajiban membayar pajak.



NOFRIZON

Hal tersebut disampaikan Nofrizon dalam rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Jumat lalu (4/9).

Nofrizon mengatakan, data tersebut merupakan laporan terbaru yang diterima-nya hingga akhir Agustus 2026. Dari sekitar 2.000 kendaraan berpelat merah yang belum membayar pajak, sebanyak 141 kendaraan di antaranya merupakan kendaraan instansi vertikal.

Politisi Fraksi PPP tersebut sangat menyayangkan kondisi tersebut. Terlebih, kendaraan pelat merah merupakan kendaraan milik pemerintah yang semestinya menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Ini sangat miris sekali. Kendaraan milik pemerintah dan ASN justru menunggak pajak," tukasnya.

Nofrizon menambahkan, berdasarkan perhitungan Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, total nilai tunggakan pajak kendaraan dinas dan ASN tersebut mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Ia meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Pemerintah daerah dianggap tidak seharusnya menuntut masyarakat patuh membayar pajak sementara kendaraan dinas dan ASN masih menunggak.

Kondisi tersebut dinilai kian memprihatinkan di tengah kondisi fiskal Sumbar yang masih menghadapi keterbatasan. Penyelesaian tunggakan pajak dinilai menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dibenahi demi menggenjot pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi mengakui masih terdapat kendaraan pelat merah yang belum memenuhi kewajiban pajak. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah jadi salah satu kendala utama saat ini.

"Untuk membayar kewajiban kita saja kita masih kekurangan uang. Apalagi kalau kita lihat dana kita yang terbatas," kata Mahyeldi.

Meurutnya, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah dan DPRD lebih cermat dalam menyusun prioritas anggaran. Belanja daerah diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Ketika kita akan melakukan anggaran yang bukan kewenangan kita, hal-hal yang prioritas harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sementara sekarang masih banyak tugas-tugas kita yang berkaitan dengan kewenangan kita," kata Mahyeldi.

Gubernur menilai masukkan dari DPRD perlu menjadi perhatian bersama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Ia menginstruksikan Sekda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun anggaran berbasis prioritas kewenangan provinsi.

"Kepada TAPD sudah saya instruksikan, kewenangan provinsi itulah yang menjadi prioritas," ucap Mahyeldi. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	**SENIN, 7 SEPTEMBER 2026**	3

Punya Ikatan Emosional, Nanda Satria Siap Fasilitasi Kegiatan Pemuda Purus

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menghadiri malam puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Pemuda RW 07 (Pemuda Depen), Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat (4/9).

Kunjungan tersebut terasa spesial bagi pimpinan DPRD Sumbar ini. Nanda mengaku memiliki kedekatan emosional lantaran pernah mengenyam pendidikan di SDN 24 Ujung Gurun, kawasan yang berdampingan langsung dengan Purus.

Nanda pun menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai agenda kreatif dan kegiatan positif pemuda setempat.

"Jadi, apa pun kebutuhan masyarakat, terutama untuk kepemudaan, kami siap membantu agar kegiatan yang dilakukan tetap positif," kata Nanda.

Panggung malam puncak diramaikan aneka unjuk bakat pemuda RW 07 Purus, mulai dari tari tradisional Minangkabau, modern dance, fashion show, hingga pertunjukan musik Minang. Nanda mengapresiasi kemandirian panitia muda dalam mengemas agenda kebersamaan warga.

Selain menyerap aspirasi kepemudaan, Nanda mengimbau warga Purus untuk tetap menjaga stamina di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Masyarakat disarankan mengurangi mobilitas luar ruang serta mendukung percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah.

Sementara, Pembina Pemuda RW 07 Purus, Donal Elfian menyebutkan, kehadiran unsur pimpinan DPRD Sumbar secara langsung menjadi sejarah tersendiri bagi warga RW 07 Purus. Pihaknya siap menjembatani usulan pemuda Purus ke tingkat legislatif kota maupun provinsi.

Malam puncak peringatan HUT RI tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Lurah Purus Zulwandy Anwar, Ketua Pemuda Fajar, serta jajaran pengurus RT dan RW setempat. **(fai)**



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria memberikan sambutan pada malam puncak HUT ke-81 RI di RW 07 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 7 SEPTEMBER 2026	6

DPRD Sumbar Bahas Perubahan APBD 2026 untuk Percepat Pemulihan dan Pembangunan

DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar, Jumat (4/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa, serta dihadiri langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Dalam rancangan perubahan APBD ini, target Pendapatan Daerah naik sebesar Rp315,84 miliar (5,02 persen) dari semula Rp6,29 triliun menjadi Rp6,61 triliun. Sementara pada pos belanja, diusulkan naik menjadi Rp6,97 triliun dari APBD awal sebesar Rp6,40 triliun. Kenaikan paling mencolok terjadi pada Belanja Modal yang melonjak hingga 99,94 persen, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar. Lonjakan ini diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik dan pemulihan infrastruktur daerah.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan, penyesuaian anggaran harus berpedoman pada KUA-PPAS Perubahan yang disepakati bersama serta responsif terhadap kebutuhan penanganan bencana dan dinamika transfer pusat.

"Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan," katanya.

Sementara, Gubernur Mahyeldi menyampaikan, ekonomi Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan signifikan pascabencana alam pada akhir 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 melesat ke angka 5,02 persen dibanding triwulan IV 2025 yang sempat berada di level 1,89 persen. Pemprov pun optimistis mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen.

"Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Mahyeldi. *



KLIPING BERITA



GUBERNUR *Mahyeldi menyerahkan naskah Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD TA 2026 kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi disaksikan Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa saat Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.*



SUASANA *Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri anggota dewan dan jajaran pejabat Pemprov Sumbar terkait penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD TA 2026.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi dan pimpinan dewan serta Gubernur Mahyeldi, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Sumbar.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SELASA 8 SEPTEMBER 2026	6

Perubahan Perda Pendidikan Sumbar Disorot

Padang, Padek—Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yogi Pratama, SE, menginstruksikan kader Partai Golkar yang berada di Komisi V DPRD Sumbar untuk mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Instruksi tersebut disampaikan Yogi Pratama, SE, dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, Senin (7/9). Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH.

Yogi mengatakan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Perda tersebut. Di antaranya pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan regulasi pendidikan penting dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan itu menambahkan, persoalan yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi," ujar Yogi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Lazuardi Erman, memastikan pihaknya akan mengawal proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Lazuardi menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini telah memasuki tahap finalisasi. "Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna," kata Lazuardi.

Ia menyebutkan, Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Sumbar diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari dukungan pembiayaan dan pengembangan potensi daerah hingga perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. (wni)



DPRD UNTUK PADEK

DISKUSI: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yogi Pratama, berdiskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra dan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, terkait revisi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Senin (7/9).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 8 SEPTEMBER 2026	2

Perubahan Perda Pendidikan Sumbar jadi Sorotan

Fraksi Golkar Dorong Penguatan Beasiswa dan BOSDA

PADANG, METRO

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Yogi Pratama menginstruksikan kader Partai Golkar yang berada di Komisi V DPRD Sumbar untuk arevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Instruksi tersebut disampaikan Yogi Pratama, SE dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, M Iqra Chissa Putra, Senin (7/9). Diskusi itu turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman.

Yogi mengatakan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Perda tersebut. Di antaranya menyangkut pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan regulasi pendidikan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat.



ist

DISKUSI— Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, Yogi Pratama berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa dan Ketua Ketua V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan itu menambahkan, persoalan yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi," ujar Yogi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar, H Lazuardi Erman, memastikan pihaknya akan mengawal proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lazuardi menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

"Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna," kata Lazuardi.

Ia menyebutkan, Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Sumbar diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari dukungan pembiayaan dan pengembangan potensi daerah hingga perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. (*)

BREAKING NEWS!

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SELASA, 8 SEPTEMBER 2026	6

Perubahan Perda Pendidikan Sumbar Disorot

Fraksi Golkar Dorong Penguatan Beasiswa dan BOSDA

PADANG, METRO

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Yogi Pratama, SE, menginstruksikan Kader Partai Golkar di Komisi V DPRD Sumbar mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Instruksi tersebut disampaikan Yogi Pratama, SE dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM, Senin (7/9).

Diskusi itu turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH.

Yogi mengatakan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Perda tersebut.

Di antaranya menyangkut pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan regulasi pendidikan sangat penting, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumbar.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan itu menambahkan, persoalan yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi," ujar Yogi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar, H. Lazuardi Erman, SH, memastikan pihaknya akan mengawal proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lazuardi menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

"Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna," kata Lazuardi.

Ia menyebutkan, Ranperda Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut inisiatif DPRD Provinsi Sumbar yang diinisiasi Komisi V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Sumbar diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan.

Mulai dari dukungan pembiayaan dan pengembangan potensi daerah hingga perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.(rel/fan)



DISKUSI— Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbar, Yogi Pratama diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra, S.ST., MM, Senin (7/9).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN POSMETRO PADANG
HARI/TANGGAL SELASA, 8 SEPTEMBER 2026
HALAMAN 8

Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Desak Transparansi Penataan Belanja dan Efisiensi Program

PADANG, METRO

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun 2026, di Ruang Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria didampingi Iqra Chissa Puta dan Evi Yandri Rajo Budiman serta Sekwan Maifrizon. Sedangkan dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Sekretaris Daerah, serta jajaran, pimpinan OPD, Pimpinan Bank Nagari, BUMD.

Nanda Satria sebagai pemimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemprov Sumbar mencatat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp 315,8 miliar atau naik 5,02 persen dari APBD murni.

"Namun, usulan kenaikan alokasi belanja daerah melonjak jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp570 miliar atau naik 8,89 persen. Berhubungan besarnya usulan kenaikan belanja dibanding target pendapatan, maka konstruksi anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635," ujar Nanda Satria.

Nanda Satria menegaskan, kondisi defisit ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov dan DPRD Sumbar.

"Pembahasan mendatang harus memfokuskan solusi konkret untuk menutup celah anggaran tersebut, baik lewat pengetatan belanja maupun optimalisasi pendapatan asli daerah," tegas Nanda Satriia.



RAPAT PARIPURNA—Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria didampingi Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa memimpin rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

Seluruh fraksi di DPRD Sumbar yang terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDI-P & PKB, secara bergantian menyampaikan pandangan umum dan lontaran kritis terkait postur anggaran yang timpang tersebut.

Fraksi-fraksi mendesak transparansi penataan belanja dan efisiensi program yang dianggap kurang mendesak. Atas rentetan pertanyaan dan catatan kritis dari seluruh fraksi, Pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumbar untuk memberikan tanggapan serta jawaban resmi secara komprehensif pada Rapat Paripurna lanjutan yang dijadwalkan pada Selasa (8/9). (*)

KLIPING BERITA





PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.



PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.



PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.



PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.



PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.



PERWAKILAN Fraksi DPRD Sumbar dokumen menyerahkan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 8 SEPTEMBER 2026	9

Fraksi DPRD Sumbar Minta Penjelasan Konstruksi Perubahan APBD 2026

Padang, Rakyat Sumbar — Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumbar meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap konstruksi anggaran yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2026.

"Cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan terhadap konstruksi anggaran dalam Ranperda tersebut, baik terhadap target pendapatan maupun rencana alokasi belanja dan pembiayaan daerah," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).

Ia melanjutkan, sesuai tahapan pembahasan, terhadap pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi, maka gubernur perlu memberikan jawaban atau tanggapannya.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada gubernur menyiapkan jawaban atau tanggapan dan penjelasan yang komprehensif terhadap Pandangan Umum Fraksi tersebut yang akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 8 September 2026," ucap Nanda.

Menurut Nanda, dalam Nota Pengantar Gubernur terdapat kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp315.844.448.141, atau 5,02 persen dan kenaikan alokasi belanja daerah sebesar Rp. 570.015.531.394,56, atau 8,89 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2026.

"Berhubungan besarnya usulan kenaikan belanja dari usulan kenaikan target pendapatan daerah, maka kontruksi pendapatan dan belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan 2026, mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635," ungkapnya.

Ia menambahkan, konstruksi anggaran yang terdapat dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 tersebut, merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD.

"Dalam pembahasan nanti, defisit anggaran tentu harus ditutup baik melalui optimalisasi pendapatan daerah maupun melalui efesiensi dan efektivitas belanja daerah," ulas Nanda.

Fraksi fraksi DPRD Sumbar yang menyampaikan pandangan umum adalah Fraksi PKS, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PDI-P & PKB.

Dari pandangan umum tersebut semoga terdapat ide-ide yang bernas dari Fraksi-fraksi untuk mengatasi permasalahan defisit yang terdapat dalam Ranperda Perubahan APBD 2026," pungkasnya. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, M. Iqra Chissa Putra, saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. Iqra Chissa Putra, saat rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, M. Iqra Chissa Putra, dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, menerima dokumen pandangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. Iqra Chissa Putra, dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, menerima dokumen pandangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi M. Iqra Chissa Putra, dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi, menerima dokumen pandangan umum dari juru bicara fraksi saat rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama, Senin, (7/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 8 September 2026 (25 Rabiul Awal 1448 H)	9

Fraksi Golkar DPRD Sumbar Dorong Penguatan Beasiswa

PADANG - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Barat, Yogi Pratama, menginstruksikan kader Partai Golkar yang berada di Komisi V DPRD Sumbar untuk mengawal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Instruksi tersebut disampaikan Yogi Pratama dalam diskusi bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, Senin (7/9).

Diskusi itu turut dihadiri Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman.

Yogi mengatakan, terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan Perda tersebut. Di antaranya menyangkut pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Menurutnya, pengawalan terhadap perubahan regulasi pendidikan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Solok Selatan itu menambahkan, persoalan yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

"Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, aspek pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan juga perlu diperkuat dalam regulasi," ujar Yogi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat, H. Lazuardi Erman, memastikan pihaknya akan mengawal proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Lazuardi menjelaskan, Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan saat ini telah memasuki tahap finalisasi.

"Sekarang sudah tahap finalisasi dan diperkirakan dalam waktu dekat bisa masuk tahap paripurna," kata Lazuardi.

Ia menyebutkan, Ranperda perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Melalui perubahan regulasi tersebut, DPRD Sumbar diharapkan dapat memperkuat berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari dukungan pembiayaan dan pengembangan potensi daerah hingga perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. (rl)



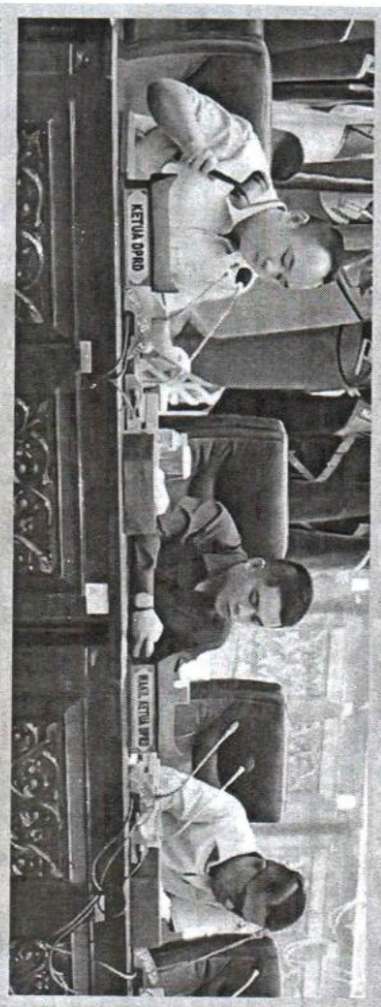
DISKUSI - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar Yogi Pratama saat diskusi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra dan Ketua Komisi V DPRD Sumbar, H. Lazuardi Erman. (ist)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 8 SEPTEMBER 2026	2

DPRD Sumbar Sorot Defisit Rp176,5 Miliar pada APBD-P 2026



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar.*

PADANG, KP — Postur APBD Perubahan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 memicu sorotan tajam dari legislatif. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan tambahan belanja mencapai Rp570,01 miliar (8,89 persen) ketika target pendapatan daerah hanya bertambah Rp315,84 miliar (5,02 persen). Ketimpangan tersebut membuat Ranperda APBD Perubahan 2026 defisit Rp176,56 miliar.

Kondisi fiskal itu dipertanyakan seluruh fraksi DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (7/9). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Iqra Chissa Putra dan Evi Yandri Rajo Budiman, serta dihadiri Sekda Sumbar Arry Yuswandy, jajaran pimpinan OPD dan BUMD.

Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, hingga Fraksi Gabungan PDIP dan PKB mendesak Gubernur Mahyeldi memberikan jawaban atas kondisi defisit tersebut, termasuk memberberkan langkah-langkah guna menutupi defisit.

Struktur Ranperda Perubahan APBD 2026 sendiri mencatat target pendapatan naik menjadi Rp6,61 triliun dari semula Rp6,29 triliun. Namun, usulan belanja membengkak dari Rp6,40 triliun menjadi Rp6,97 triliun.

Pimpinan DPRD menjadwalkan rapat paripurna tanggapan dan jawaban Gubernur Mahyel di pada Selasa (8/9). **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 9 September 2026 (26 Rabul Awal 1448 H)	6

ATASI DEFISIT ANGGARAN

DPRD Sumbar Ingatkan Pentingnya Pemetaan Potensi Fiskal

PADANG - SINGGALANG

DPRD Sumbar dan pemerintah provinsi mulai membahas Perubahan APBD Tahu 2026. Legislatif mengajak pemerintah provinsi beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi merumuskan solusi atas defisit anggaran demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menekankan pentingnya kecermatan dalam menyikapi ketidakseimbangan pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, pemetaan potensi fiskal secara matang sangat penting agar program pembangunan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

"Pemerintah daerah dan DPRD mesti serius mencarikan solusi terbaik pada proses pembahasan nanti, agar komposisi anggaran kita tetap sehat dan proporsional," ujar Muhidi saat rapat paripurna Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Sumbar, Jumat (4/9).

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dalam rapat paripurna lanjutan, Senin (7/9). Nanda menyebut struktur anggaran yang diusulkan menjadi fokus diskusi fraksi-fraksi di DPRD karena menyangkut tantangan finansial bersama.

Berdasarkan nota pengantar, target pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 diproyeksikan naik 5,02 persen atau Rp315,84 miliar, dari Rp6,29 triliun pada APBD awal menjadi Rp6,61 triliun. Namun, alokasi belanja daerah melonjak lebih tinggi, yakni naik 8,89 persen atau Rp570,02 miliar, sehingga total rencana belanja membengkak menjadi Rp6,97 triliun.

Kondisi tersebut memicu defisit fiskal awal sebesar Rp369,23 miliar, yang merupakan selisih antara rencana belanja dan target pendapatan daerah.

Pemprov Sumbar menyiapkan langkah penutupan defisit menggunakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar. Anggaran pembiayaan ini diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 hasil audit BPK sebesar Rp284,66 miliar, dikurangi alokasi penyertaan modal daerah senilai Rp92 miliar.

"Meskipun dibantu pembiayaan neto, nilai defisit belum tertutupi sepenuhnya. Selisihnya masih menyisakan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar yang harus kita cari jalannya bersama," kata Nanda.

Nanda menambahkan, DPRD berharap pembahasan berikutnya dapat menyelesaikan defisit murni tersebut melalui optimalisasi pendapatan yang realistis serta efisiensi belanja.

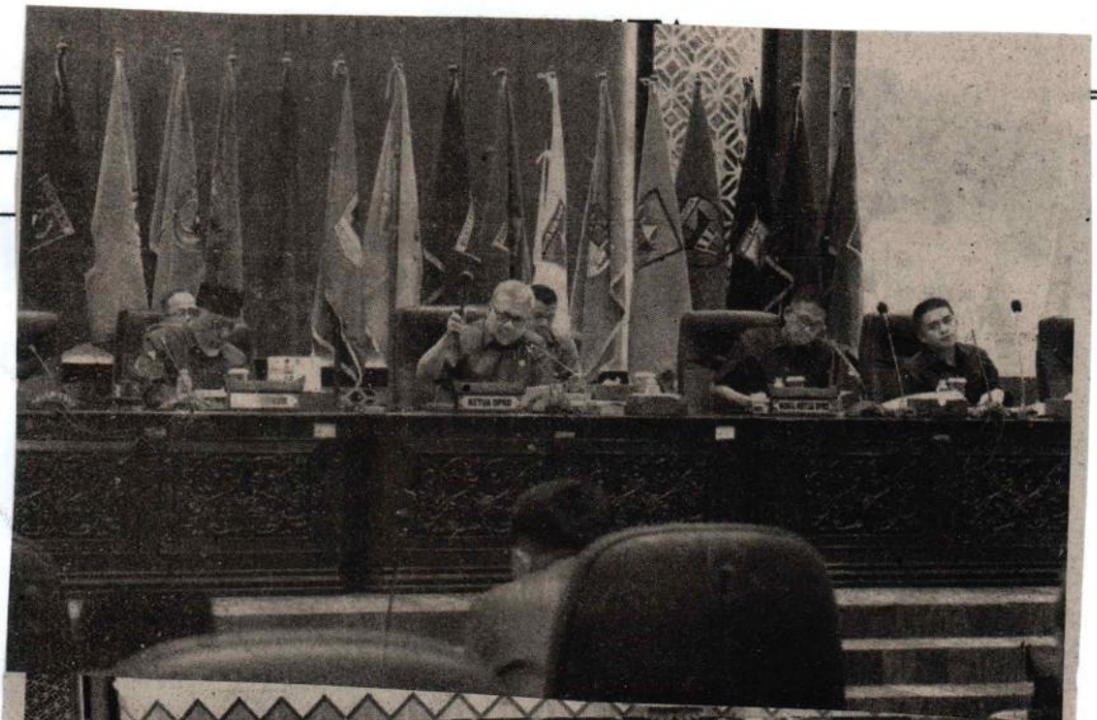
Merespons hal itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan legislatif. Ia mengakui peningkatan pendapatan belum mampu mengimbangi seluruh kebutuhan rencana belanja.

"Sebagai langkah antisipatif agar kapasitas keuangan daerah tetap terjaga, kami mengambil alternatif kebijakan rasionalisasi anggaran," jelas Mahyeldi.

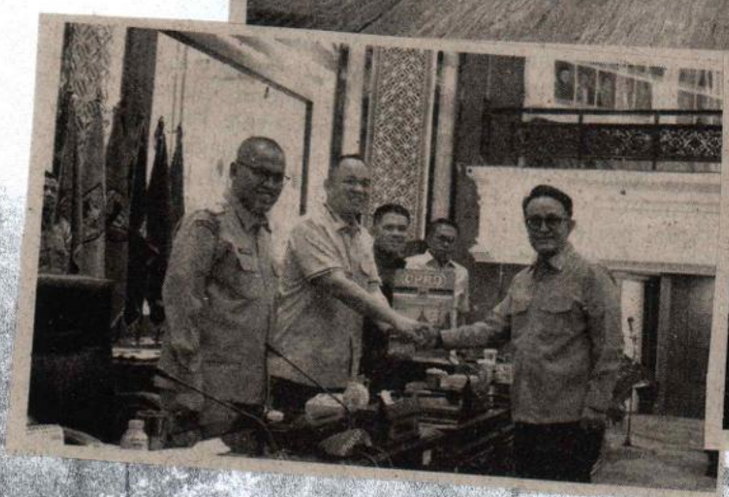
Mahyeldi menambahkan bahwa rancangan ini telah mengacu pada kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026. Selanjutnya, DPRD Sumbar memastikan akan mengawal ketat penjelasan serta tindak lanjut pemprov dalam rapat komisi dan badan anggaran mendatang. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT









BREAKING NEWS!

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN: SINGGALANG
HARI/TANGGAL: Rabu, 9 September 2026 (26 Rabul Awal 1448 H)
HALAMAN: 9

MUHAYATUL :

BOSDA dan Mulok Jadi Perhatian dalam Revisi Perda Pendidikan

Padang, Singgalang

Pendidikan tidak boleh berhenti pada rumusan pasal dan norma. Ia harus hadir sebagai jalan membuka kesempatan, membangun karakter, meningkatkan kualitas manusia, dan menghadirkan masa depan yang lebih adil bagi seluruh anak negeri.

Demikian penekanan yang disampaikan oleh Ketua Tim Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhayatul kemarin di Padang.

Dia menjelaskan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini bukan sekadar tahapan legislasi, tetapi ikhtiar untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kemajuan pendidikan dan masa depan generasi Sumatera Barat.



MUHAYATUL

"Perda boleh lahir dari ruang pembahasan, tetapi ruhnya harus tumbuh dari kebutuhan masyarakat," tegas mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumbar ini.

Dijelaskan dalam Perubahan Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini terdapat sejumlah substansi penting yang perlu mendapat perhatian. Antara lain pemberian beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan muatan lokal (mulok).

Selama ini, Muhayatul memandang Bantuan Operasional Sekolah masih mengandalkan APBN dan menyentuh seluruh sekolah SLTA secara merata. Persoalan ini harus dijawab dengan melahirkan opsi yang berpihak kepada sektor pendidikan. Pendidikan adalah kunci. Dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bersumber dari APBD, masalah dimaksud mudah-mudahan bisa diatasi.

Meski begitu dalam implementasinya, pahami secara utuh regulasinya yaitu Permendagri No. 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagaimana Pemda meng anggarkan dan menyalurkan bantuan operasional. Kemu dian

Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

"Disini, Pemerintah daerah wajib memastikan penggunaan BOSDA bersifat melengkapi (komplementer) dan tidak tum pang tindih dengan larangan-larangan yang ada di BOS Reguler Pusat," katanya.

Selain BOSDA, kurikulum muatan lokal (mulok) juga jadi penekanan. Apalagi Sumbar memiliki banyak kearifan lokal yang mesti dilestarikan. Salah satunya diajarakan kepada anak didik melalui kurikulum mulok. Dia tidak ingin kearifan lokal itu hilang ditelan zaman, tapi tetap terpelihara dan menjadi warisan budaya yang terus hidup di generasi selanjutnya.

Muhayatul berharap, DPRD Sumbar terus berjuang, terus menyempurnakan, demi pendidikan Sumatera Barat yang lebih maju, bermartabat, dan berkeadilan.(015)

BREAKING NEWS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026 /	8

BENTUK GENERASI BERKARAKTER

Ketua DPRD Sumbar Dorong Sekolah Ramah Anak

PADANG, HALUAN — Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar, mengembangkan potensi, serta membentuk karakter. Lingkungan pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu melindungi dan mendorong anak tumbuh menjadi generasi cerdas, berakhlak dan percaya diri.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9).

Muhidi mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan dukungan seluruh pihak. DPRD, menurutnya, memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

"Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada," ujar Muhidi.

Ia menilai anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah dan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh sebatas mencegah kekerasan dan memenuhi hak-haknya, tetapi juga harus diarahkan pada pengembangan potensi dan pembentukan karakter.

"Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul," katanya.

Menurut Muhidi, kualitas generasi saat ini akan menentukan tercapainya target Indonesia Emas 2045. Anak-anak harus dipersiapkan dengan kecerdasan, karakter, akhlak dan keimanan yang kuat.

Ia juga menekankan pentingnya penanaman iman dan tauhid sejak dini sebagai landasan anak dalam bersikap dan mengambil keputusan.

"Kalau iman dan tauhidnya kuat, Insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar," tuturnya.

Selain itu, Muhidi mendorong pendidikan karakter yang membiasakan anak bersikap jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Karakter yang baik, katanya, akan membangun kepercayaan dari lingkungan sekaligus membantu anak menjaga dirinya dalam pergaulan.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya membaca. Literasi menjadi bekal penting bagi anak untuk memahami perkembangan zaman, menghadapi perubahan dan mengembangkan kemampuan diri.

"Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan," katanya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang benar-benar ramah bagi anak. Anak tidak boleh merasa takut, tertekan atau tidak aman ketika berada di lingkungan pendidikan.

"Jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Herlin Srihendini, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman berbagai pihak mengenai pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Menurutnya, anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama. Sekolah menjadi salah satu lingkungan penting karena sebagian besar



waktu anak dihabiskan dalam proses pendidikan.

"Anak-anak adalah aset yang tidak ternilai harganya. Karena itu, hak mereka harus dipenuhi dan mereka harus mendapatkan perlindungan," ujar Herlin.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang dapat menggganggu tumbuh kembang anak, seperti perundungan dan kekerasan, harus menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, pemerintah dan masyarakat.

"Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah," katanya. (*)



GELARAN Pelatihan Konvensi Hak Anak



PESERTA kegiatan berfoto bersama dengan Ketua DPRD Sumbar



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi dalam kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak untuk mewujudkan sekolah ramah anak



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026	2

Muhidi: Jadikan Sekolah sebagai Tempat yang Aman dan Nyaman bagi Anak

PADANG, METRO

Mewujudkan sekolah ramah anak bukan sekadar menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman. Lebih dari itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang mampu melindungi, mendidik sekaligus membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan memiliki kepercayaan diri.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9).

Muhidi mengatakan, perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. DPRD, menurutnya, memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi yang dimiliki, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

"Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada," ujar Muhidi.

Muhidi menilai anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah dan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti pada upaya mencegah kekerasan atau memenuhi hak-haknya, tetapi juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi mereka.

"Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul," katanya.

Menurut Muhidi, target Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan hari ini. Anak-anak harus dibekali kecerdasan sekaligus karakter, akhlak dan keimanan yang kuat. Ia menekankan pentingnya menanamkan iman dan tauhid sejak dini sebagai dasar bagi anak dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan.

"Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar," tuturnya.

Selain itu, Muhidi mendorong pendidikan karakter yang membiasakan anak bersikap jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Menurutnya, karakter yang baik akan membuat anak memiliki kepercayaan dari lingkungan sekaligus mampu menjaga dirinya dalam pergaulan.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya ilmu dan budaya membaca. Literasi, katanya, menjadi bekal penting bagi anak untuk memahami dunia, menghadapi perubahan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

"Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan," katanya.

Muhidi berharap seluruh pihak dapat menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar ramah bagi anak, sehingga mereka tidak merasa takut atau tertekan ketika berada di lingkungan pendidikan.

"Jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Herlin Srihendini, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak mengenai pemenuhan hak anak.

Menurutnya, anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama. Sekolah menjadi salah satu lingkungan penting karena sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam proses



pendidikan.

"Anak-anak adalah aset yang tidak ternilai harganya. Karena itu, hak mereka harus dipenuhi dan mereka harus mendapatkan perlindungan," ujar Herlin.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk perundungan dan kekerasan, harus menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, pemerintah dan masyarakat.

"Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah," katanya.

Herlin berharap penguatan sekolah ramah anak dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Sumbar yang mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Tujuan kita adalah menyelamatkan generasi yang akan datang, karena merekalah yang nantinya menjadi penerus kita," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono, mengatakan kegiatan tersebut digelar karena masih ditemukan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

"Kami masih menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak masih perlu diperkuat. Karena itu, peserta diberikan pendampingan dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak menjadi sumber tekanan bagi peserta didik," kata Karyono.

Karyono berharap peserta dapat mengikuti pelatihan secara aktif dan membawa pengetahuan yang diperoleh untuk diterapkan di sekolah masing-masing.

"Harapan kami, peserta semakin memahami kondisi anak saat ini dan mampu mengenali persoalan yang mereka hadapi. Dengan begitu, sekolah bisa memberikan respons yang tepat dan menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak," ujarnya.

Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan sekolah yang bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang bagi anak untuk merasa aman, dihargai, didengar dan diberi kesempatan berkembang.(*)



PELATIHAN— Ketua DPD Sumbar, Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026	9

Anak harus Tumbuh Berkarakter

Padang, Rakyat Sumbar — Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan mewujudkan sekolah ramah anak tidak hanya sekadar menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman.

"Sekolah diharapkan menjadi ruang yang mampu melindungi, mendidik sekaligus membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan memiliki kepercayaan diri," kata Muhidi, saat Pelatihan Konvensi Hak Anak di Padang, Rabu (9/9).

Ia menyampaikan, perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi yang dimiliki, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

"Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada," ujar Muhidi.

Menurut Muhidi, anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah dan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti pada upaya mencegah kekerasan atau memenuhi hak-haknya, tetapi juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi mereka.

"Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul," ungkap Muhidi, pada kegiatan dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Ia menyebutkan, target Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan hari ini. Anak-anak harus dibekali kecerdasan sekaligus karakter, akhlak dan keimanan yang kuat.

Ia menekankan pentingnya menanamkan iman dan tauhid sejak dini sebagai dasar bagi anak dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan.

"Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar," tuturnya.

Muhidi mengingatkan, pendidikan karakter yang membiasakan anak bersikap jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Karakter yang baik akan membuat anak memiliki kepercayaan dari lingkungan sekaligus mampu menjaga dirinya dalam pergaulan.

Ia menambahkan pentingnya ilmu dan budaya membaca. Literasi, katanya, menjadi bekal penting bagi anak untuk memahami dunia, menghadapi perubahan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

"Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan," pungkas Muhidi.



KETUA DPRD Sumatera Barat Muhidi, saat Pelatihan Konvensi Hak Anak di Padang, Rabu (9/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN: SINGGALANG
HARI/TANGGAL: Kamis, 10 September 2026 (27 Rabul Awal 1448 H)
HALAMAN: 8

KETUA DPRD SUMBAR, MUHIDI

Sekolah Harus Jadi Ruang Aman untuk Membentuk Karakter Anak

PADANG - SINGGALANG

Sekolah ramah anak bukan sekadar lingkungan belajar yang nyaman. Lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman yang melindungi, mendidik, sekaligus membentuk karakter generasi muda agar cerdas, berakhlak dan percaya diri.



PELATIHAN - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri pelatihan Konvensi Hak Anak guna mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9). (ist)

Pesan itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Sumatra Barat, Muhidi, saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak guna mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9).

Muhidi menyatakan perlindungan anak memerlukan sinergi lintas sektor. DPRD Sumbar berkomitmen mengawal isu ini melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

"DPRD siap memastikan perlindungan anak berjalan optimal. Jika butuh regulasi baru atau penyempurnaan aturan yang ada, segera kami tindak lanjuti berdasarkan masukan masyarakat," ujar Muhidi.

Ia mengingatkan, anak adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, fokus penanganan anak tidak boleh berhenti pada pencegahan kekerasan semata, melainkan harus diarahkan pada pengembangan potensi mereka.

Menurut Muhidi, target Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas generasi saat ini. Ia menekankan pentingnya penanaman iman, tauhid dan pendidikan karakter sejak dini sebagai fondasi bersikap.

"Iman yang kuat membentuk cara berpikir yang benar, yang kemudian melahirkan tindakan yang benar," ucapnya.

Selain karakter moral seperti jujur dan bertanggung jawab, Muhidi juga mendorong peningkatan literasi di sekolah. Budaya membaca menjadi bekal krusial bagi anak untuk menghadapi perubahan zaman.

"Kita harus mendorong anak-anak gemar membaca. Ilmu adalah modal utama mereka untuk sukses di masa depan," tambah Muhidi.

Kepala DP3AP2KB Sumatra Barat, Herlin Srihendini, senada dengan Muhidi. Ia menyebut pelatihan ini sebagai langkah penting menyamakan persepsi dalam pemenuhan hak anak.

Mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah, lingkungan pendidikan menjadi sangat krusial.

Herlin menyoroti kasus perundungan (bullying) dan kekerasan yang masih mengancam tumbuh kembang anak. Ia menegaskan, penuntasan masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah.

"Sekolah ramah anak harus diwujudkan bersama. Butuh keterlibatan aktif orang tua, pemerintah, dan masyarakat agar sekolah benar-benar aman bagi semua," kata Herlin.

Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono, mengungkapkan bahwa pelatihan ini digelar karena kasus kekerasan di sekolah masih ditemukan. Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa penerapan sekolah ramah anak di Sumbar masih harus diperkuat.

Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang hak anak dan metode menciptakan iklim belajar tanpa tekanan.

"Kami berharap peserta pulang membawa pemahaman baru, mampu mendeteksi masalah anak lebih dini, dan memberikan respons yang tepat demi mendukung tumbuh kembang mereka," pungkas Karyono. (401)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026	12

Muhidi Minta Wakil Kepala Sekolah Jadi Penggerak, Bukan Sekadar Pendamping Kepala Sekolah

PERUBAHAN zaman yang bergerak cepat menuntut dunia pendidikan untuk tidak sekadar mengejar prestasi akademik, melainkan wajib mencetak generasi yang berkarakter, adaptif, serta menguasai kompetensi praktis.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat, Kamis (9/9).

Muhidi menilai, posisi wakil kepala sekolah sangat vital sebagai penentu warna kepemimpinan di satuan pendidikan. Sebagai sosok yang bersentuhan langsung dengan guru dan siswa, para waka sekolah diminta mempraktikkan kepemimpinan berbasis keteladanan.

"Orang lebih mudah melihat kenyataan daripada hanya mendengar perkataan. Seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh, lebih banyak berbuat daripada berkata. Disiplin, ketepatan waktu, dan konsistensi adalah contoh sederhana yang mudah ditiru peserta didik," ujar Muhidi.

Di tengah era globalisasi, Muhidi juga menyoroti pergeseran standar dunia kerja, terutama bagi lulusan SMK. Ke depan, dunia industri tidak lagi sekadar melihat lembar ijazah, melainkan mengutamakan sertifikasi kompetensi serta keterampilan teknis.

Oleh karena itu, ia mendorong sekolah memperkuat literasi digital, penguasaan teknologi, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif dengan tetap berlandaskan filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah' (ABS-SBK).

Kabid PGTK Dinas Pendidikan Sumbar, Monica M. Nur menambahkan, bimtek angkatan kedua ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas waka sekolah sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan dinamika harian sekolah.

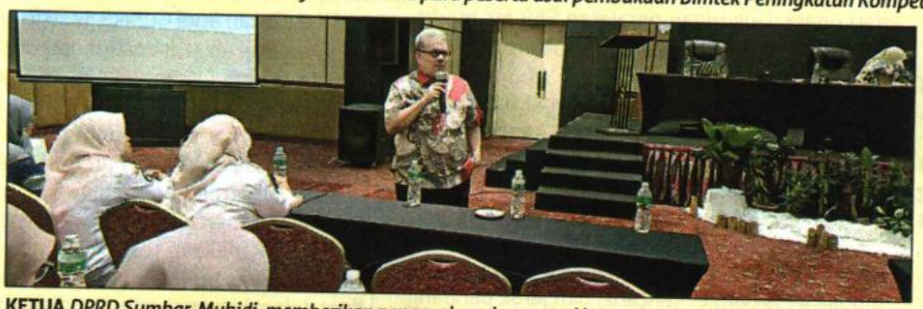
"Kita harus fokus pada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisik semata," tegas Monica. *



KLIPING BERITA



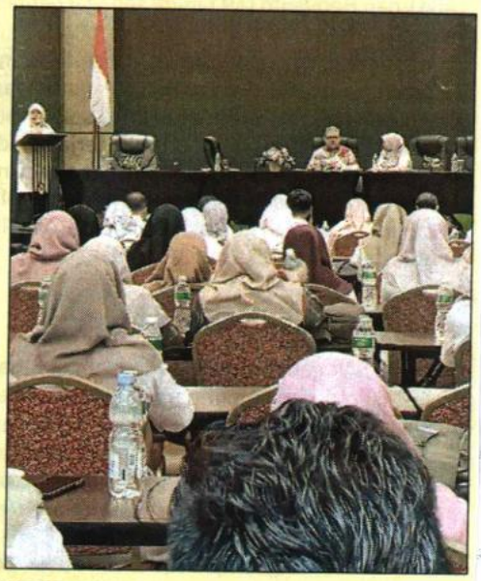
KETUA *DPRD Sumbar, Muhidi, berfoto bersama para peserta usai pembukaan Bimtek Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.*



KETUA *DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan pengarahan dan materi kepemimpinan pendidikan di hadapan para wakil kepala sekolah se-Sumatera Barat.*



SUASANA *Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat yang dihadiri puluhan peserta di Padang.*



KETUA *DPRD Sumbar, Muhidi, saat menghadiri Bimtek Peningkatan Kompetensi Wakil Kepala Sekolah se-Sumbar didampingi jajaran pejabat terkait.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	**KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026**	2

Fraksi PDIP-PKB Minta Pemprov Sumbar Agresif Gali Potensi PAD


VAREL ORIANO

PADANG, KP — Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumatera Barat meni lai Perubahan APBD 2026 belum menun jukkan langkah kon kret pemerintah daerah dalam memperbesar kemandirian fiskal. Ketergan tungan terhadap da na transfer pemerin tah pusat justru masih menjadi penopang utama pendapatan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Varel Oriano, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan-PKB terhadap Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin lalu (7/9).

Varel membeberkan, pendapatan transfer da ri pemerintah pusat tercatat naik signifikan hingga 19,64 persen. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru merosot sebesar 8,73 persen. Kondisi ini menjadi sinyal melemahnya kemampuan daerah membiayai pembangunan dari sumber mandiri.

"Kalau kenaikan pendapatan daerah lebih ba nyak ditopang transfer dari pusat, berarti pekerjaan rumah kita untuk memperkuat kemandirian fiskal masih besar," ujar Varel.

Pihaknya mendesak Pemprov Sumbar menjelaskan secara terbuka formulasi penetapan target pendapatan agar rasional dan terukur. Pemprov juga diminta lebih agresif menggali potensi PAD secara profesional dan transparan tanpa membebani masyarakat. **(fai)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026	2

Muhidi Tegaskan Sekolah Harus Jadi Tempat Aman Bagi Anak

PADANG, KP - Praktik perundungan, kekerasan, maupun tekanan yang membuat anak takut berada di lingkungan pendidikan harus dicegah sejak dini. Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan bahwa sekolah ramah anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang nyaman.

"Jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat," ujar Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak di Padang, Rabu (9/9).

Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya melindungi mereka dari kekerasan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh ruang untuk berkembang.

"Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana membuat mereka tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul," katanya.

Menurutnya, generasi yang dipersiapkan saat ini diyakini akan menentukan masa depan Sumbar dan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Muhidi menekankan pentingnya pendidikan agama, tauhid, serta pendidikan karakter sejak dini agar anak memiliki fondasi akhlak yang kuat.

"Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar," tuturnya.

Ia juga mengajak lingkungan sekolah untuk memperkuat budaya literasi guna membekali anak dalam menghadapi perubahan zaman.

Sementara, Kepala DP3AP2KB Sumatera Barat, Herlin Srihendini menyebutkan, pencegahan kekerasan anak butuh keterlibatan bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono mengungkapkan masih ditemukannya kasus di lingkungan sekolah menjadi alasan konsep sekolah ramah anak harus terus diperkuat. **(fai)**



KLIPING BERITA



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan pada Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak di Padang, Rabu (9/9).*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 11 SEPTEMBER 2026	7

Gelar Aksi Damai

Serikat Buruh dan Ojol Serahkan 10 Tuntutan ke DPRD Sumbar

PADANG, METRO

Massa dari dari berbagai elemen pekerja dan serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Kamis (10/9). Pada aksi itu, mereka menyampaikan 10 tuntutan kepada wakil rakyat di DPRD Sumbar.

Aksi damai ini dikawal ketat oleh personel kepolisian demi memastikan jalannya penyampaian aspirasi masyarakat tetap kondusif, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik di sekitar kawasan tersebut. Peserta aksi juga membawa sejumlah atribut demonstrasi.

Dalam orasinya yang dimulai pada siang hari itu, para buruh secara bergantian menyampaikan keluh kesah serta tuntutan mendesak yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Perwakilan driver Maxim, Darma, menyampaikan keluhan terkait potongan aplikasi. Ia mengakui, pajak aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan pada para driver dengan ekonomi menengah ke bawah.

"Sebelum ada sistem Turbo rata-rata kami bisa dapat 15 penumpang. Semenjak ada sistem Turbo, kalau tidak pakai, paling tiga sampai lima orderan didapat," sesalnya.

Darma mengatakan pengemudi ojol harus membayar Rp15 ribu untuk menggunakan sistem Turbo selama tiga jam. Fitur ini dapat dibeli langsung melalui aplikasi Maxim.

"Sistem ini membuat pengemudi harus mengeluarkan biaya tambahan agar memperoleh order. Karena itu, mereka meminta Maxim menghapus sistem Turbo dan menerapkan sistem pembagian order yang lebih adil. Kami meminta prioritas agar sistem Maxim ini jangan merugikan kami terlalu besar," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI AGN Sumbar, Ruli Eka Pratama, menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung di Kota Padang ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

"Aksi ini kami gelar secara serentak dan menyeluruh di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi yang ada di seluruh Indonesia sebagai bentuk soliditas perjuangan buruh," tegas Ruli Eka Pratama di sela-sela aksi.

Ruli menambahkan bahwa gerakan serentak ini bertujuan agar suara pekerja dapat didengar secara menyeluruh oleh para pemangku kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Tak hanya dari wilayah Kota Padang dan sekitarnya, aksi ini juga diikuti oleh perwakilan daerah, salah satunya rombongan dari DPC KSPSI Pasaman Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Ruli Eka Pratama memaparkan bahwa terdapat tujuh tuntutan utama yang diusung oleh KSPSI AGN Sumbar dalam aksi penyampaian aspirasi kali ini. Poin-poin tuntutan tersebut mencakup evaluasi kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan jaminan kesejahteraan buruh, kepastian upah layak, hingga penolakan terhadap regulasi yang dinilai merugikan hak-hak dasar para pekerja.

Sekitar setengah jam berorasi, perwakilan DPRD Sumbar datang menemui massa. Akan tetapi, massa ingin Ketua DPRD Sumbar yang menemui mereka. Aksi berlanjut dan berhenti saat azan zuhur. Wakil Ketu DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra beserta beberapa perwakilan Komisi II dan Komisi III dan Sekretaris DPRD, turun menemui masaa aksi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra menerima tuntutan dan disambut tepuk tangan oleh para massa. Adapaun tuntutan peserta aksi unjuk rasa, untuk lebih menjamin mereka dalam melakukan aktifitas dan tidak memberatkan.

Pertama, mereka meminta Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan - Pro Buruh. Kedua, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi, sistem outsourcing, PKWT, dan mencegah penyalahgunaan pemagangan.

Ketiga, menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat. Keempat, menjamin dan melindungi Pekerja Platform, dan Pekerja Terdampak Transisi Iklim. Kelima, menjamin hak pesangon buruh, mencegah phk sepihak.

Keenam, memperkuat serikat pekerja, menjamin kebebasan berserikat dan hak mogok kerja. Ketujuh, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan. Kedelapan, sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh.

Kesembilan, jamin dan lindungi buruh perempuan, buruh disabilitas, dan pekerja rentan lainnya. Kesepuluh, jalankan Program Upskiling dan Reskilling Buruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar M Iqra Chissa, mengatakan akan meneruskan tuntutan tersebut pada yang berkompeten untuk bisa menjamin kenyamanan para pekerja.

"Kami akan meneruskan hal ini pada yang berkompeten, sehingga kawan-kawan semua lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan yang terbaik," ucap Iqra, diamabut gemuruh teriakan senang para peserta aksi.

Ia juga menambahkan, kewajiban anggota DPRD Sumbar untuk dapat memperjuangkan masyarakatnya, dalam mencari kehidupan yang layak dengan rasa nyaman.

"Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman," tambahnya.

Aksi berakhir hingga pukul 14.20 WIB, massa tampak mulai membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan telah diterima wakil ketua DPRD Sumbar dan beberapa anggota serta Sekwan. Pihak kepolisian yang bertugas juga melakukan apel setelah tuntutan diterima dan aksi berakhir. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	JUMAT 11 SEPTEMBER 2026	5

DPRD Sumbar Kejar Rp114 Miliar

Potensi penerimaan daerah Sumbar masih tertahan di sektor perkebunan. Sebanyak 41 perusahaan perkebunan tercatat memiliki kewajiban Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp114,28 miliar, tetapi pembayaran yang masuk baru sekitar Rp179,70 juta. Artinya, masih ada Rp114,10 miliar yang belum tertagih.

DATA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar itu kini menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria mendorong pemerintah provinsi tidak hanya mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memastikan kewajiban perusahaan benar-benar ditunaikan.

Bahkan, dari 41 perusahaan tersebut, baru empat perusahaan yang tercatat membayar PAP sepanjang Januari-Juli 2026. Sebanyak 41 perusahaan itu tersebar di enam daerah, yakni 18 perusahaan di Pasaman Barat, tujuh di Dharmasraya, tujuh di Solok Selatan, lima di Pesisir Selatan, dua di Agam, dan dua di Sijunjung.

Tunggakan terbesar berada di Pasaman Barat Rp77,77 miliar, disusul Dharmasraya Rp13,06 miliar, Pesisir Selatan Rp11,88 miliar, Agam Rp7,31 miliar, Solok Selatan (Padang Aro) Rp3,56 miliar, dan Sijunjung Rp496,18 juta.

Bagi Nanda, angka tersebut terlalu besar untuk dibiarkan, terlebih sektor yang menjadi sumber tunggakan merupakan industri perkebunan kelapa sawit yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sumbar.

Pada semester I 2026, nilai ekspor Sumbar mencapai US$1.568,05 juta, naik 22,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang terkait erat dengan sawit menyumbang 85,39 persen dari total ekspor.

"Melihat besarnya kontribusi ekspor tersebut, tidak ada alasan bagi perusahaan perkebunan besar untuk mangkir dari kewajiban PAP," tegas Nanda.

Ia menilai optimalisasi PAP merupakan salah satu ruang nyata untuk memperkuat PAD tanpa harus menciptakan sumber pungutan baru. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan sosialisasi dan kajian mengenai penerapan PAP bersama DPRD, serta melibatkan para ahli.

Karena itu, jika perusahaan memiliki keberatan atau perbedaan perhitungan terhadap nominal pajak, DPRD dan Pemprov Sumbar tetap membuka ruang dialog. Namun, ruang dialog tersebut tidak berarti kewajiban dapat diabaikan.

Bapenda Sumbar sendiri sebelumnya menegaskan penagihan dilakukan sesuai prosedur dan tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemprov bahkan telah menyiapkan langkah penyitaan aset terhadap perusahaan yang tetap menunggak. (Langgam)

Selain sektor perkebunan, DPRD Sumbar juga mengawal kontribusi perusahaan besar lainnya. Pada Rabu (2/9), Nanda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar menemui jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) di Jakarta, selaku induk usaha PT Semen Padang.

Pertemuan tersebut membahas kewajiban PAP sekaligus kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga PT Semen Padang untuk pembangunan Sumbar.

Rombongan diterima Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra, Direktur Keuangan SIG Sigit Prastowo, dan Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Zulkarnain Lubis.

Nanda mengapresiasi kontribusi SIG dan PT Semen Padang selama ini. Ia mencatat PT Semen Padang rutin memberikan sumbangan sekitar Rp10 miliar per tahun kepada Pemprov Sumbar.

"Kami berharap jumlah kontribusi tahun ini meningkat untuk memperkuat PAD Sumbar," ujar Nanda.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra menyambut baik dialog tersebut. Ia menyatakan perusahaan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sumbar.

"Kami siap bersinergi dan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Sumatra Barat. Hasil pembahasan hari ini akan segera kami tindak lanjuti," kata Indrieffouny.

Langkah berikutnya, DPRD Sumbar akan berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) untuk mendorong kepatuhan perusahaan perkebunan yang berada di bawah naungan negara.

Di sisi lain, secara regulasi, PAP memang merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dengan dasar pengenaan berupa nilai perolehan air permukaan dan tarif yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Dengan nilai tunggakan mencapai Rp114 miliar, persoalan PAP kini bukan sekadar administrasi perpajakan. Bagi DPRD Sumbar, ini menyangkut seberapa serius potensi ekonomi daerah dikembalikan menjadi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Jika penagihan berjalan efektif, Rp114,10 miliar yang selama ini tertahan berpotensi menjadi tambahan ruang fiskal bagi Sumbar—sekaligus menguji komitmen perusahaan besar dalam memenuhi kewajibannya kepada daerah. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyerahkan plakat kepada jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

SUASANA pertemuan DPRD Sumbar bersama jajaran direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	JUMAT, 11 SEPTEMBER 2026	9

Pemberdayaan Ekonomi Perlu Perhatian Serius

Laporan
HANDI YANUAR
Harian Rakyat Sumbar

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga sekaligus menjadi bagian dari kekuatan pembangunan daerah.

"OLEH karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan, dukungan anggaran, hingga akses pasar yang lebih luas," kata Muhidi, saat kegiatan peningkatan ekonomi perempuan, di Padang, Rabu (9/9).

Ia melanjutkan, penguatan ekonomi perempuan bukan sekadar mendorong kaum ibu memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga membuka ruang agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan keluarga.

"Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya," ucapnya.

Muhidi menyebutkan, masih banyak perempuan di daerah yang memiliki potensi usaha cukup besar namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

"Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari terbatasnya akses permodalan, belum meratanya literasi keuangan dan digital, hingga minimnya kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha," ungkapnya.

Selain itu, akses pasar dan promosi produk perempuan juga masih perlu diperkuat. Di sisi lain, banyak perempuan harus menjalankan peran ganda, mengurus keluarga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

"Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai," tuturnya.

Muhidi menambahkan DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti sebatas wacana. Peran tersebut dapat dilakukan melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi daerah yang memberikan ruang dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha.

Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD benar-benar memberikan dukungan terhadap program peningkatan ekonomi perempuan. Di antaranya melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan modal serta alat produksi, penguatan literasi keuangan dan digital, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

Dukungan juga perlu diarahkan pada pendampingan usaha secara berkelanjutan, termasuk memperkuat koperasi dan kelompok-kelompok usaha perempuan agar mampu berkembang secara mandiri.

Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata," pungkasnya.



KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, saat kegiatan peningkatan ekonomi perempuan, di Padang, Rabu (9/9).



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 12 SEPTEMBER 2026	6

PEMBAHASAN RANPERDA PERUBAHAN APBD 2026

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Soroti Kemandirian Fiskal dan Pemulihan Bencana

FRAKSI-FRAKSI DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan menyoroti sejumlah persoalan strategis mulai dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, penutupan defisit hingga percepatan pemulihan pascabencana.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria baru-baru ini, sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam pandangan fraksi, DPRD tidak hanya melihat perubahan postur anggaran dari sisi angka, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rapat turut dihadiri Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp6,294 triliun menjadi Rp6,610 triliun atau bertambah Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Namun, kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64 persen.

Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan 8,73 persen atau sekitar Rp306,57 miliar, menjadi Rp3,206 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian hampir seluruh fraksi karena menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal Sumbar terhadap pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup signifikan dari Rp6,409 triliun menjadi Rp6,979 triliun atau bertambah Rp570,02 miliar. Salah satu kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yang mencapai Rp941,95 miliar, naik hampir 100 persen atau Rp470,82 miliar. Dengan struktur tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 masih menyisakan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar.

Melalui juru bicara Syofian Hendri, Fraksi PKS meminta Pemprov Sumbar menjelaskan penurunan drastis target penerimaan pajak, seperti PAP yang turun dari Rp594 miliar ke Rp210 miliar dan Pajak Alat Berat dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar. Kendati memahami penyesuaian target harus realistis, PKS menuntut kejelasan potensi dan strategi peningkatan pendapatan, sekaligus mendorong terobosan dalam optimalisasi PKB. PKS juga mengapresiasi capaian retribusi jasa umum semester I yang mendekati 60 persen serta menyarankan dukungan anggaran bagi OPD berprestasi.

Selain itu, PKS menyoroti lonjakan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dari Rp136 miliar menjadi Rp522 miliar. Mengingat sisa waktu anggaran tinggal empat bulan, Pemprov diingatkan agar percepatan proyek tidak merusak kualitas atau memicu masalah hukum. Terakhir, PKS menuntut penjelasan terkait membengkaknya SiLPA Dana Earmark hasil audit BPK yang menyentuh Rp284,67 miliar.

Fraksi Partai Golkar menyoroti masalah kemandirian fiskal Pemprov Sumbar, terutama meningkatnya ketergantungan pada dana transfer di tengah penurunan PAD. Lewat juru bicara yang mewakili Ketua Fraksi Yogi Pratama, Golkar meminta langkah nyata untuk mendongkrak kepatuhan pajak, salah satunya dengan menertibkan tunggakan pajak kendaraan dinas dan ASN. Terkait target PAP dan Pajak Alat Berat, Golkar mengkritik penetapan target awal yang terkesan kurang akurat sehingga harus mengalami perubahan.

Golkar juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal semester I yang baru mencapai 4,68 persen, padahal terdapat tambahan anggaran Rp470,82 miliar. Pemprov diminta memetakan status kontrak dan kesiapan proyek secara jelas demi mencegah risiko gagal serap di akhir tahun. Selain itu, Golkar mendesak kejelasan transparansi penutupan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar serta skema pemanfaatan SiLPA TA 2025.

Melalui juru bicara Indra Catri, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa perubahan APBD wajib memperkecil celah antara perencanaan anggaran dan man



faat langsung bagi masyarakat, khususnya korban bencana. Gerindra mempertanyakan sumber penutupan defisit murni Rp176,56 miliar dan mewanti-wanti agar rasionalisasi anggaran tidak memangkas pelayanan dasar. Selain itu, Pemprov Sumbar didorong untuk segera melunasi utang belanja, proyek lintas tahun, dan bagi hasil pajak kabupaten/kota yang telah lolos verifikasi legal serta teknis.

Gerindra juga mengkritik penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 18,85 persen (dari Rp25 miliar menjadi Rp20,28 miliar) di tengah mendesaknya pemulihan pascabencana di Pasaman dan wilayah lain. Terakhir, Gerindra meminta koreksi atas ketidaksesuaian persentase kenaikan SiLPA dan nominal defisit dalam dokumen Ranperda demi menjaga ketelitian serta kredibilitas tata kelola keuangan daerah.

Melalui juru bicara Agus Syahdeman, Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya prinsip performance-based budgeting, risk-based budgeting, dan value for money dalam perubahan anggaran. Seiring pemangkasan target Pajak Air Permukaan (PAP) hingga 64,65 persen, Demokrat mendesak Pemprov untuk membangun basis data potensi PAP yang terintegrasi serta memperketat penagihan ke perusahaan pemanfaat. Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan dan irigasi diminta berbasis skala kerusakan yang objektif, disertai pengawasan ketat terhadap kendaraan ODOL demi mencegah kerusakan berulang.

Dalam bidang pendidikan, Demokrat menuntut transparansi daya tampung Penerimaan Murid Baru (SPMB) termasuk di SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok, guna menjamin hak pendidikan secara adil. Demokrat juga meminta penanganan kasus disiplin ASN dilakukan profesional. Sementara untuk sektor sosial ekonomi, program pengentasan kemiskinan didorong agar lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan.

Melalui juru bicara Daswippetra, Fraksi PPP menilai anjloknya target PAD sebagai masalah krusial. Mengingat proyeksi PAD 2026 menjadi salah satu yang terendah dalam dekade terakhir akibat perencanaan yang lemah, PPP mendorong evaluasi tata kelola pendapatan hingga penyegaran pejabat terkait bila diperlukan. Mengenai dana pengembalian TKD daerah terdampak bencana, PPP mendesak agar alokasinya murni untuk pemulihan warga, bukan dialihkan ke proyek non-mendesak seperti renovasi kantor atau taman.

PPP juga meminta Pemprov Sumbar lebih aktif berkoordinasi dengan Pertamina guna mengatasi kelangkaan solar yang mengganggu sektor produktif. Terakhir, PPP mempertanyakan urgensi penyertaan modal Rp92 miliar ke BUMD dan menuntut kejelasan target, manfaat, serta imbal hasilnya bagi perekonomian daerah.

Meski kelima fraksi PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PPP menyetujui Ranperda Perubahan APBD Sumbar TA 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama TAPD, persetujuan ini diiringi sejumlah catatan kritis yang wajib dijawab Pemprov secara rasional dan berbasis data. Pembahasan anggaran ini ditekankan bukan sekadar formalitas penyesuaian angka, melainkan momen perbaikan perencanaan, optimalisasi PAD, dan percepatan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

DPRD Sumbar menegaskan isu kemandirian fiskal sebagai sorotan utama, di mana penurunan PAD di tengah naiknya TKD harus direspon dengan pembenahan database potensi pajak serta kepatuhan warga tanpa membebani masyarakat. Lonjakan belanja modal pun dituntut diimbangi kesiapan eksekusi agar tidak sekadar mengejar angka serapan, melainkan menjaga kualitas dan aturan pengadaan. Terakhir, alokasi anggaran bencana didesak fokus pada pemulihan fisik dan ekonomi warga terdampak secara cepat.

DPRD Sumbar menegaskan fungsi penganggaran dan pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. *

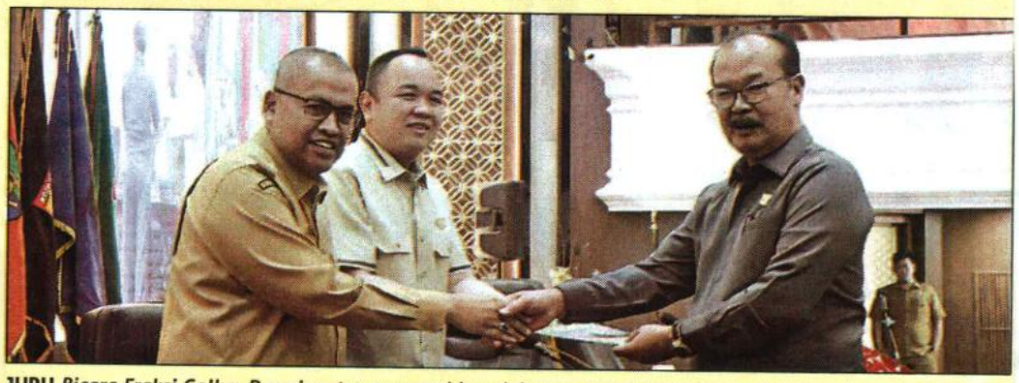




WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria (tengah) mengetuk palu memimpin Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026 didampingi Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy dan pimpinan dewan.*



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria dan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy menerima penyerahan berkas pandangan umum fraksi dari Juru Bicara Fraksi Gerindra Indra Catri.*



JURU *Bicara Fraksi Golkar Daswippetra menyerahkan dokumen pandangan umum fraksinya kepada Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria.*



JURU *Bicara Fraksi Demokrat Agus Syahdeman menyerahkan naskah pandangan umum fraksi kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria disaksikan Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandy.*



UNSUR *Forkopimda Sumbar berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Sumbar.*

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SABTU, 12 SEPTEMBER 2026	4

SAMPAIKAN PANDANGAN UMUM ATAS RAPBD-P 2026

Fraksi DPRD Sumbar Soroti Penurunan PAD dan Pemulihan Bencana

PADANG, HALUAN- Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan menyoroti sejumlah persoalan strategis mulai dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, penutupan defisit hingga percepatan pemulihan pascabencana.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (7/9). Tahapan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam pandangan fraksi, DPRD tidak hanya melihat perubahan postur anggaran dari sisi angka, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp6,294 triliun menjadi Rp6,610 triliun atau bertambah Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Namun, kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64 persen.

Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan 8,73 persen atau sekitar Rp306,57 miliar, menjadi Rp3,206 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian hampir seluruh fraksi karena menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal Sumbar terhadap pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup signifikan dari Rp6,409 triliun menjadi Rp6,979 triliun atau bertambah Rp570,02 miliar. Salah satu kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yang mencapai Rp941,95 miliar, naik hampir 100 persen atau Rp470,82 miliar. Dengan struktur tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 masih menyisakan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar.

Fraksi PKS melalui juru bicara Syofian Hendri meminta Pemerintah Provinsi memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap penurunan sejumlah target penerimaan pajak. Salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP) yang diturunkan dari Rp594 miliar menjadi Rp210 miliar. Fraksi ini juga mempertanyakan penurunan target Pajak Alat Berat dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar.

Menurut Fraksi PKS, penyesuaian target memang harus dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kemampuan pemungutan. Namun, penurunan target dalam jumlah besar perlu disertai penjelasan mengenai potensi yang sebenarnya tersedia serta strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.

Fraksi PKS juga mendorong adanya terobosan dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di sisi lain, fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja retribusi jasa umum yang pada semester I telah mencapai hampir 60 persen dan mendorong agar perangkat daerah yang mampu meningkatkan pendapatan diberikan dukungan anggaran secara proporsional.

Sorotan juga diberikan terhadap kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang melonjak dari sekitar Rp136 miliar menjadi Rp522 miliar. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar empat bulan, PKS mengingatkan pemerintah agar percepatan pembangunan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicar Sitti Izzati Aziz menempatkan persoalan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian utama. Fraksi ini menilai meningkatnya porsi dana transfer di tengah penurunan PAD perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam pengelolaan keuangan

EAKING
EWS!

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

HARI/TANGGAL	HALAMAN

Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Sumbar menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk melakukan penertiban terhadap tunggakan pajak kendaraan dinas dan ASN.

Lebih lanjut Fraksi Golkar menyoroti kembali target PAP dan Pajak Alat Berat. Menurut fraksi ini, penetapan target awal harus didasarkan pada data potensi yang akurat sehingga ketika dilakukan perubahan tidak menimbulkan kesan bahwa target sebelumnya tidak disusun berdasarkan perhitungan yang memadai.

Selain pendapatan, Golkar mempertanyakan realisasi belanja modal yang pada semester I baru mencapai 4,68 persen. Dengan adanya tambahan belanja modal sebesar Rp470,82 miliar, pemerintah diminta memberikan pemetaan yang jelas terkait status kontrak dan kesiapan masing-masing proyek agar tidak terjadi gagal serap pada akhir tahun anggaran.

Persoalan defisit murni Rp176,56 miliar juga menjadi perhatian Golkar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka sumber penutupan defisit tersebut serta bagaimana pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Indra Catri, menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu memperkecil kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

Kemudian Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sumber penutup defisit murni Rp176,56 miliar dan meminta agar langkah rasionalisasi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan dasar masyarakat.

Selain itu, fraksi ini mendorong Pemprov Sumbar menyelesaikan berbagai kewajiban daerah, termasuk utang belanja, pekerjaan lintas tahun dan kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten dan kota yang telah diverifikasi secara legal dan teknis.

Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, khususnya di Pasaman dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, BTT justru mengalami penurunan 18,85 persen, dari Rp25 miliar menjadi Rp20,28 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah.

.Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Agus Syahdeman menekankan pentingnya penerapan prinsip Performance Based Budgeting, Risk Based *Budgeting*, serta *Value for Money* dalam perubahan anggaran.

Fraksi Demokrat secara khusus menyoroti persoalan database Pajak Air Permukaan. Dengan target PAP yang dipangkas hingga 64,65 persen, pemerintah dinilai perlu membangun satu basis data yang terintegrasi mengenai objek dan potensi PAP. Penagihan aktif kepada perusahaan yang memanfaatkan air permukaan juga dinilai perlu diperkuat.

Pada sektor infrastruktur, Demokrat mendorong percepatan pembangunan jalan dan irigasi berdasarkan indikator kerusakan yang objektif. Pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga harus diperketat agar anggaran perbaikan infrastruktur tidak terus terkuras akibat kerusakan berulang.

Dalam bidang pendidikan, Demokrat meminta transparansi terkait daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), termasuk persoalan di SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok. Fraksi menegaskan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik harus menjamin hak anak memperoleh pendidikan secara adil.

Demokrat juga meminta penyelesaian pemeriksaan kasus disiplin ASN dilakukan secara profesional. Sementara dalam bidang sosial ekonomi, program pengentasan kemiskinan diarahkan agar lebih berbasis pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara Daswippetra, Dt. Manjinjiang Alam, menilai penurunan target PAD menjadi persoalan serius. PPP menyebut proyeksi PAD 2026 sebagai salah satu yang terendah dalam 10 tahun terakhir dan mengaitkannya dengan lemahnya perencanaan pendapatan.

Karena itu, Fraksi PPP mendorong evaluasi terhadap tata kelola pendapatan sekaligus penyegaran pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan daerah apabila diperlukan.

Fraksi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dana pengembalian TKD yang berkaitan dengan daerah terdampak bencana. Dana tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terdampak, seperti renovasi ruang kerja, kantor maupun taman.

Persoalan kelangkaan solar di sejumlah SPBU Sumbar juga disampaikan PPP. Fraksi meminta Pemprov Sumbar lebih aktif berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan baik dan kebutuhan masyarakat serta sektor produktif tidak terganggu.

Di sisi pembiayaan, PPP mempertanyakan urgensi penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp92 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan target, manfaat serta imbal hasil yang diharapkan dari penambahan modal tersebut sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. DPRD Sumbar meminta perubahan anggaran menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan penerimaan daerah, mempercepat pembangunan dan memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan kemandirian fiskal menjadi salah satu benang merah pandangan fraksi. Penurunan PAD di tengah kenaikan TKD dinilai perlu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki basis data potensi penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.

Pada saat yang sama, besarnya tambahan belanja modal harus diikuti kesiapan pelaksanaan. DPRD mengingatkan agar percepatan serapan anggaran tidak hanya mengejar realisasi secara administratif, tetapi tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, transparansi serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Isu pemulihan bencana juga menjadi perhatian penting. DPRD meminta pemerintah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat terdampak agar proses pemulihan tidak berjalan lamban.

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar menegaskan fungsi pengawasan dan pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (*)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

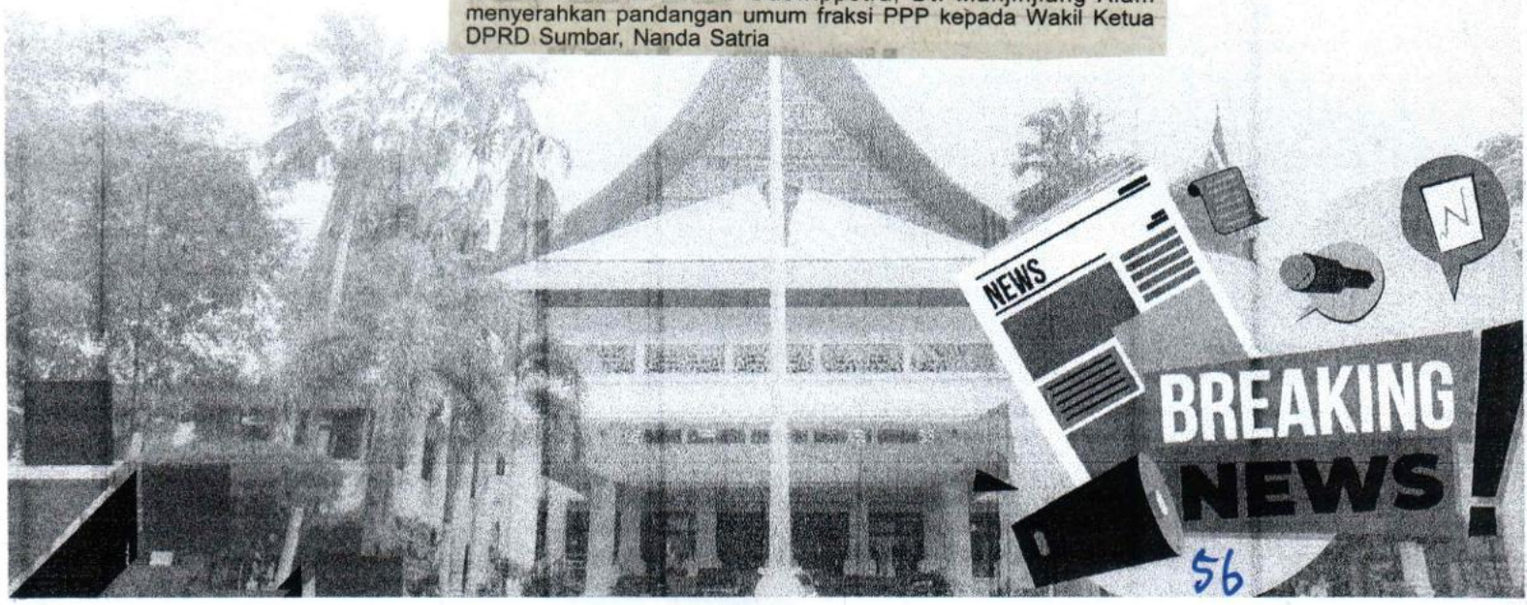
KLIPING BERITA



Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 (HL)



Juru bicara Fraksi PPP Daswippetra, Dt. Manjinjiang Alam menyerahkan pandangan umum fraksi PPP kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 14 SEPTEMBER 2026	3

Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Ketua DPRD Sumbar Berikan Bantuan Benih dan Pakan Ikan Kerapu

PADANG, METRO

Upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir terus dilakukan melalui penguatan sektor perikanan budidaya. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu (13/9).

Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi, hadir langsung dalam penyerahan bantuan tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pembudidaya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan benih dan pakan ikan kerapu tersebut merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar.

Menurut Muhidi, dukungan terhadap pembudidaya ikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya operasional dalam kegiatan budidaya. Bantuan pakan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi, sementara benih ikan kerapu menjadi modal penting untuk meningkatkan hasil budidaya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi dalam jangka pendek, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Produktivitas budidaya yang meningkat diharapkan berdampak pada bertambahnya pendapatan pembudidaya dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.



ist

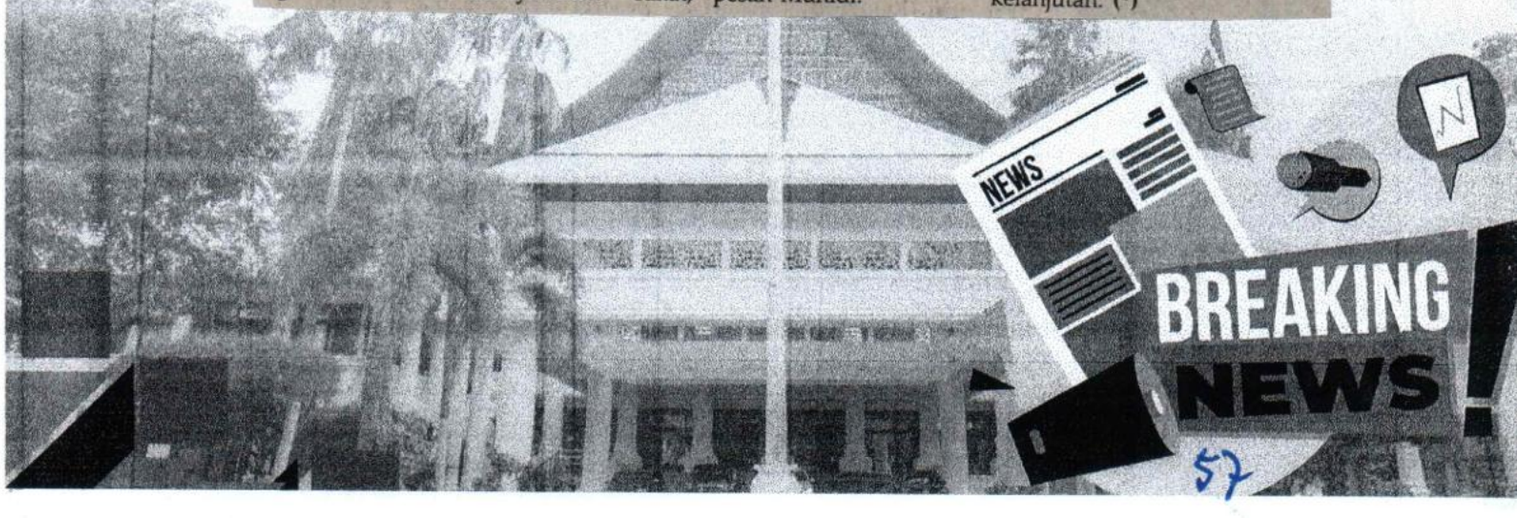
BANTUAN BENIH IKAN—KETUA DPRD SUMBAR,MUHIDI saat melakukan penyerahan bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Muhidi juga mengingatkan kelompok pembudidaya agar mengelola bantuan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Kekompakan antaranggota kelompok dinilai penting agar seluruh bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan hasil maksimal.

"Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat," pesan Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan dinilai penting dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus mendorong kemandirian pangan bahari di Sumbar.

Dengan adanya sinergi antara DPRD Sumbar, pemerintah daerah, DKP, dan kelompok pembudidaya, pengembangan budidaya ikan kerapu di Teluk Buo diharapkan dapat terus berkembang. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan potensi kelautan Sumatera Barat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SENIN 14 SEPTEMBER 2026	9

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Nota Pengantar Ranperda APBD 2027

Padang, Rakyat Sumbar—Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengatakan dari nota pengantar yang disampaikan wakil gubernur, arah kebijakan, konstruksi anggaran yang diusulkan dalam Ranperda APBD 2027, terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah sudah dapat diketahui.

"Secara umum, konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang termuat dalam Ranperda APBD 2027, sama dengan KUA-PPAS 2027. Angka-angka yang diusulkan, tentu belum merupakan angka final dan perlu dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah," kata Muhidi, saat, Rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore.

Ia melanjutkan, fraksi-fraksi DPRD Sumbar akan memberikan pula pandangan fraksinya yang akan dirangkum nanti dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi agar Ranperda tentang APBD 2027 akan lebih sempurna dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

"Semua fraksi supaya dapat merumuskan pandangan umum fraksinya yang komprehensif dan memberikan solusi untuk kesempurnaan Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027, baik dari aspek kebijakan, pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah," ucapnya.

"Sesuai agenda pembahasan Ranperda APBD Tahun 2027 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari Senin 14 September 2026," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan APBD merupakan instrumen utama Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang nyata, terencana, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, dalam perspektif pembangunan, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan penganggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab persoalan pembangunan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat.

"Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan ikhtiar bersama dalam menentukan prioritas pembangunan Sumatera Barat. Keterbatasan fiskal menuntut kita semakin cermat menetapkan prioritas dan bertanggung jawab mengelola sumber daya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menghadirkan APBD yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Vasko. (*)





KETUA DPRD Sumbar Muhidi menerima dokumen Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, dari Wakil Gubernur Vasko Ruseimy saat rapat paripurna di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy saat membuka rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore.



WAKIL Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, saat paripurna di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy saat memimpin rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2027, di ruang sidang utama Jumat (11/9) sore.



SEJUMLAH pejabat Forkopimda ketika mengikuti rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda 2027 di ruang sidang utama, Jumat, (11/9) sore.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	**SENIN, 14 SEPTEMBER 2026**	2

Sumbar Kewalahan Penuhi Ekspor Ikan Kerapu ke Hong Kong

PADANG, KP - Potensi pasar ekspor ikan kerapu asal Sumatera Barat belum tergarap maksimal akibat tingginya tingkat kematian ikan sebelum panen. Hingga kini, angka kematian benih kerapu di tingkat pembudidaya masih menembus 50 persen.

Kondisi tersebut diakui Ketua Kelompok Pembudidaya Teluk Buo, Dasril, saat menerima bantuan benih dari Ketua DPRD Sumbar Muhidi di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu (12/9).

Peluang pasar kerapu sebenarnya sangat terbuka lebar, terutama untuk pemenuhan kuota ekspor. Pada 2023 lalu, permintaan pengiriman kerapu dari Sumbar ke Hong Kong mencapai 25 ton, namun pembudidaya lokal hanya sanggup memasok 15 ton.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, penyerahan 2.565 benih kerapu beserta pakan ini ditujukan untuk membenahi persoalan produksi nelayan. Penyerahan bantuan sengaja dilakukan di lokasi agar DPRD bisa melihat langsung kendala lapangan yang dihadapi pembudidaya.

"Bantuan ini diharapkan tidak hanya membuat usaha budidaya kerapu semakin berkembang, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat," kata Muhidi.

Ia berharap kelompok nelayan dapat mengelola benih dan pakan tersebut secara optimal agar produksi ikan bisa berjalan berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan pola budidaya menjadi kunci utama agar nelayan Sumbar bisa menangkap peluang pasar di dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Resi Suriati menjelaskan, budidaya kerapu membutuhkan kesabaran dan perhatian ekstra karena karakteristik ikannya yang cukup sensitif.

"Target kita budidaya ini bisa berhasil sampai panen dengan tingkat kematian ikan seminimal mungkin," katanya.

Menurut Resi, tingkat mortalitas budidaya kerapu pada umumnya berada di angka 30 hingga 50 persen. Meski membutuhkan perawatan intensif, nilai jual kerapu yang tinggi tetap menjadikannya komoditas unggulan bagi nelayan. Pihaknya mendorong kelompok nelayan agar ke depan mampu melanjutkan usaha budidaya ini secara mandiri. **(fai)**



***KETUA** DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan bantuan benih ikan kerapu dan pakan kepada kelompok pembudidaya di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu (12/9).*

NEWS
BREAKING NEWS!

6D

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 15 SEPTEMBER 2026	/

DPRD Sumbar Sorot Lambannya Pemulihan Pascabencana

PADANG, HALUAN— Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti lambannya pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana yang bersumber dari anggaran pengembalian pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Sorotan itu disampaikan Fraksi PPP dalam rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9).

Juru Bicara Fraksi PPP, Nofrizon mengatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.3/10-84/SJ tanggal 2 Maret 2026, pengembalian pemotongan TKD telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdampak bencana sejak April 2026.

Ia menyebut, pemerintah daerah juga telah didorong untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar penanganan pascabencana segera dilakukan. "Inspektorat Sumbar dengan surat Nomor 700/115/LHR/INSP/2026 tanggal 29 Mei 2026 juga sudah melakukan peninjauan terhadap rencana usulan kegiatan," ujar Nofrizon.



RAPAT paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9). IST

Ia mengatakan, setelah dilakukan peninjauan oleh Inspektorat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semestinya segera melaksanakan kegiatan. Namun, Fraksi PPP mendapat informasi masih banyak OPD yang kegiatannya baru berjalan dan saat ini masih dalam tahap lelang maupun kontrak. "Salah satu OPD tersebut adalah Dinas SDA-BK dengan nilai anggaran sebesar Rp198 miliar, belum lagi OPD-OPD yang lain," katanya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PPP menilai ada kesengajaan pemerintah daerah memperlambat pelaksanaan kegiatan agar proses lelang dapat dilakukan melalui sistem mini kompetisi yang dinilai lebih mudah diatur dan dikendalikan oleh oknum tertentu.

"Kami dari Fraksi PPP menilai bahwa ada kesengajaan pemerintah daerah untuk memperlambat

KORAN	N

pengerjaan kegiatan sehingga proses lelangnya dapat dilakukan dengan sistem mini kompetisi yang lebih mudah diatur dan dikendalikan oleh oknum-oknum tertentu," tegasnya.

Untuk menghindari permainan dan pengaturan pemenang tender, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memastikan proses lelang dilakukan secara terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan. Menurut Nofrizon, kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang dapat dilaksanakan melalui sistem kontrak tahun jamak atau *multi years contract* (MYC).

Selain menyoroti pelaksanaan kegiatan pascabencana, Fraksi PPP juga menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam 10 tahun terakhir. Kondisi tersebut, ditambah bencana yang terus terjadi, dinilai menyebabkan pembangunan Sumbar tertinggal dari sejumlah provinsi tetangga. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Nofrizon mengatakan, percepatan pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan kemampuan APBD Sumbar saat ini. Karena itu, gubernur diminta mencari sumber pendanaan lain melalui inovasi dan kreativitas.

Menurutnya, kebijakan *creative financing* untuk pendanaan pembangunan daerah telah dirumuskan dalam RPJMD Sumbar. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum bagi gubernur untuk mencari sumber pendanaan di luar APBD, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sukuk, obligasi, dan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan ini juga dianjurkan oleh Menteri Keuangan dan bahkan bunga pinjamannya ditanggung oleh APBN.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta pemerintah daerah punya rencana kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan creative financing pendanaan pembangunan ini," ujarnya.

Kendaraan Dinas Menunggak Pajak

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti persoalan 2.002 unit kendaraan dinas operasional Pemprov Sumbar yang belum membayar pajak. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Firdaus mengatakan, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar per akhir Agustus 2026, terdapat 2.002 unit kendaraan dinas operasional Pemprov Sumbar yang belum membayar pajak. "Apa penyebab 2.002 unit kendaraan dinas tersebut belum membayar pajak? Apakah karena keterlambatan administrasi, anggaran, atau lemahnya pengawasan?" ujar Firdaus.

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB juga mempertanyakan potensi kerugian daerah serta besaran pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tidak tertagih akibat tunggakan tersebut.

Firdaus mengatakan, jika sebagian dari 2.002 kendaraan tersebut ternyata sudah dilelang atau bukan lagi menjadi aset Pemprov Sumbar, hal itu juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan aset daerah.

"Jika tentang 2.002 unit kendaraan tersebut ada penjelasan dari Bapenda bahwa ini adalah kendaraan yang sudah dilelang atau bukan lagi aset Pemprov, maka muncul pertanyaan dari fraksi kami tentang pengelolaan aset daerah selama ini oleh Pemprov. Kami minta ini menjadi perhatian, bagaimana pengelolaan aset ini dilakukan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Belanja Berorientasi Kebutuhan Masyarakat

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumbar, Syofian Hendri, dalam pandangan umum Fraksi PKS menegaskan, pengelolaan APBD harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan fiskal.

Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen yang mampu mengubah sumber daya fiskal menjadi kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Fraksi PKS juga memandang penting adanya keseimbangan antara ruang fiskal pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. **(h/len)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 15 SEPTEMBER 2026	7

Kerapu Sumbar Banjir Permintaan, Produksi Belum Optimal

PADANG, HALUAN- Potensi pasar ikan kerapu di Sumatera Barat belum tergarap maksimal. Tingginya tingkat kematian ikan sebelum panen yang mencapai 50 persen menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi, terutama melalui penguatan kapasitas kelompok pembudidaya.

Ketua kelompok pembudidaya, Dasril, mengatakannya saat Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan bantuan 2.565 benih ikan kerapu beserta pakan kepada kelompok nelayan di Teluk Buo Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu (13/9).

Diketahui bahwa peluang pasar kerapu telah terlihat dari permintaan ekspor. Pada 2023, permintaan pengiriman kerapu dari Sumbar ke Hong Kong mencapai sekitar 25 ton. Namun, pembudidaya lokal saat itu baru mampu memenuhi sekitar 15 ton.

Muhidi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok nelayan dan pembudidaya ikan.

Menurutnya, penyerahan bantuan tidak hanya ditujukan untuk menambah jumlah benih yang dibudidayakan.

DPRD Sumbar juga ingin melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan kelompok nelayan sehingga dukungan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi.

"Bantuan ini diharapkan tidak hanya membuat usaha budidaya kerapu semakin berkembang, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat," kata Muhidi.

Ia berharap kelompok penerima dapat memanfaatkan benih dan pakan tersebut secara optimal sehingga menghasilkan produksi yang berkelanjutan.

Dengan produksi yang semakin baik, peluang pasar kerapu di dalam maupun luar daerah diharapkan dapat di manfaatkan lebih maksimal.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat Resi Suriati mengatakan, target kita tentu bagaimana budidaya ini bisa berhasil sampai panen dengan tingkat kematian ikan seminimal mungkin.

Memang, dalam budidaya kerapu tingkat mortalitas biasanya berada di kisaran 30 hingga 50 persen, sehingga diperlukan perawatan dan pengelolaan yang cukup intensif.

Budidaya kerapu membutuhkan kesabaran karena karak teristiknya berbeda dengan ikan lain seperti lele atau nila. Kerapu lebih sensitif sehingga mem butuhkan perhatian dan pen jagaan yang lebih intensif.

Namun, di sisi lain, ikan kerapu memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Kita berharap kegiatan ini memberikan hasil yang baik bagi kelompok dan ke depan dapat dilanjutkan secara mandiri. **(h/len)**



KLIPING BERITA

KO



SERAHKAN BANTUAN—Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan bantuan 2.565 benih ikan kerapu beserta pakan kepada kelompok nelayan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Sabtu (13/9). IST



64

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 15 September 2026 (2 Rabiul Akhir 1448 H)	1

Pemprov Diminta Transparan Soal Proyek Rehab Rekon



NOFRIZON

Padang, Singgalang

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumbar mendesak pemerintah provinsi untuk memastikan semua proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang berjalan transparan. PKB meminta proyek yang didanai anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tersebut menggunakan sistem lelang terbuka melalui LPSE.

Selain itu, pengerjaannya wajib menggunakan sistem Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak mengingat keterbatasan waktu yang ada pada tahun anggaran 2026 ini.

Langkah tegas ini dinilai mendesak demi menutup ruang gerak oknum nakal yang ingin memanfaatkan situasi di tengah mepetnya sisa waktu tahun anggaran.

"Untuk menghindari permainan dan pengaturan pemenang tender, kami meminta dengan tegas kepada pemerintah daerah agar lelang dilakukan dengan sistem terbuka melalui LPSE. Selain itu, memperhatikan keterbatasan waktu pengerjaan saat ini, sistemnya harus diubah menjadi MYC agar proyek ini bisa berjalan maksimal tanpa mengorbankan kualitas," ujar juru bicara Fraksi PKB, Nofrizon, saat rapat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (14/9).

Fraksi PKB mengkritisi lambatnya realisasi anggaran penanganan bencana di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nofrizon menjelaskan bahwa dana TKD dari Pemerintah Pusat sebenarnya sudah diserahkan ke Pemda yang terdampak bencana sejak April 2026 lalu. Hal ini sejalan dengan mandat Surat Edaran Mendagri Nomor: 900.1.3/1084/SJ tertanggal 2 Maret 2026 yang mendorong percepatan penanganan bencana di daerah.

Bukan hanya itu, menurutya, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bahkan sudah bergerak cepat melakukan review terhadap rencana usulan kegiatan melalui surat Nomor 700/115/LHR/INSP/2026 tertanggal 29 Mei 2026.

"Mestinya, setelah proses review internal selesai, OPD terkait bisa langsung mengeksekusi pengerjaan fisik di lapangan," katanya lagi.

Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Pihaknya menerima informasi bahwa banyak OPD yang lamban memulai tahapan lelang serta kontrak.

"Salah satu yang paling mencolok dengan nilai fantastis berada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebesar Rp198 miliar, belum termasuk OPD lainnya," katanya lagi.

Fraksi PKB menilai keterlambatan ini tidak bisa memicu ketidakpercayaan pada pemerintah sehingga harus diperbaiki dengan sistem LPSE secara transparan. "Jangan sampai nanti ada yang menganggap lamban karena agar proses lelangnya nanti mepet dan sengaja diarahkan menggunakan sistem mini kompetisi. Sistem seperti itu jauh lebih mudah diatur, dikondisikan, dan dikendalikan oleh oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi," tegas Nofrizon. (401)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 15 SEPTEMBER 2026	

Lestarikan Kesenian Kupa Kepang Pujorahayu

Anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak Berbaur dengan Masyarakat Pujorahayu

Laporan
AHMAD BUDIMAN
Harian Rakyat Sumbar

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak hadiri undangan masyarakat dan kelompok sanggar budaya kesenian Kuda Kepang Pujorahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat.

TURUT hadir dalam kegiatan tersebut calon Wali Nagari Pujorahayu, Sukoto, tokoh masyarakat, Pemerintah Nagari setempat beserta undangan lainya pada Minggu (13/9) malam.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, untuk sanggar budaya kesenian kuda kepang dirinya akan terus mendorong dan juga memperkokoh fondasi budaya kuda kepang di Pujurahayu,

"Kesenian kuda kepang menjadi hiburan yang merakyat yang sangat meriah, di pujurahayu kita lihat, penampilan baik yang tua, muda bahkan anak-anak yang datang yang menyaksikan sangat antusias dan ini harus di lestarikan," ungkapnya.

Dari itu sambung Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak melalui kegiatan ini ada sedikit oleh- oleh dari pribadinya untuk kesenian kuda kepang senilai Rp2,5 juta dan untuk penarinya masing-masing juga kita berikan Rp200 ribu perorang

"Untuk selanjutnya masyarakat pujurahayu, juga akan kita perhatikan, beserta kesenian akan kita ajukan ke Provinsi Sumatra Barat supaya dapat kucuran dana," ucapnya

Sementara itu, calon Wali Nagari Pujurahayu Sukoto mengucapkan selamat datang di Pujurahayu Kecamatan Luhak Nan Duo kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak.

"Seraya juga meminta dukungan kepada masyarakat atas pencalonan kami sebagai Wali Nagari Pujurahayu untuk membangun Nagari ini menjadi lebih baik," ulasnya.

Salah seorang tokoh masyarakat Pujurahayu juga mengatakan, masyarakat di Nagarinya terkejut dan tidak menyangka kedatangan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak di nagari itu.

"Terimakasih atas kedatangan bapak yang telah hadir di Pujurahayu dan sekaligus memberikan bantuan di kesenian kuda kepang yang mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung," tutupnya.

KLIPING BERITA



FOTO: AHMAD BUDIAWAN

KETUA Komisi II DPRD Sumbar Khairuddin Simajuntak bersama masyarakat Nagari Pujorahayu Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Minggu (13/9) malam.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 16 SEPTEMBER 2026	12

BK DPRD Riau Studi Banding Tata Beracara ke DPRD Sumbar

PIMPINAN dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau menggelar kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/9). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan observasi dan studi banding terkait penerapan tata tertib, kode etik, serta tata beracara kelembagaan.

Rombongan BK DPRD Riau yang dipimpin Samsudin disambut langsung oleh Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar bersama anggota BK DPRD Sumbar Irsyad Syafar. Pertemuan ini menjadi ajang bertukar pengalaman terkait penanganan persoalan kedisiplinan hingga batas kewenangan BK terhadap anggota dewan yang terseret kasus hukum.

Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar memaparkan, sepanjang tahun ini pihaknya telah memproses sejumlah persoalan kedisiplinan dan etik.

Salah satunya penanganan anggota dewan yang tersangkut persoalan pinjam-meminjam dengan pihak perbankan.

"Jika persoalan sudah masuk ke ranah pidana, tentu penanganannya berada pada kewenangan aparat penegak hukum. Namun secara prosedural, aspek etik dan tata tertib tetap kita proses sesuai koridor kewenangan BK, termasuk saat ada permintaan keterangan dari penegak hukum," tegas Bakri.

Sementara itu, Anggota BK DPRD Sumbar Irsyad Syafar menambahkan bahwa pembahasan juga menyentuh perlindungan hak-hak anggota DPRD yang berhadapan dengan hukum serta kejelasan batas kewenangan terkait pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, BK Sumbar rutin mengevaluasi tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna.

"Setiap persoalan harus dilihat berdasarkan tupoksi. Ketika sudah di luar kewenangan BK, kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Seluruh proses kita jalankan secara objektif berdasarkan aturan yang berlaku demi menjaga marwah lembaga DPRD," ujar Irsyad.

Melalui diskusi interaktif tersebut, BK DPRD Riau dan BK DPRD Sumbar berharap tata beracara dan pengawasan kode etik di masing-masing lembaga legislatif dapat semakin kuat dan transparan.*



KLIPING BERITA



KETUA *BK DPRD Sumbar Bakri Bakar didampingi anggota BK DPRD Sumbar Irsyad Syafar, menyerahkan plakat dan cenderamata kepada pimpinan rombongan BK DPRD Riau Samsudin.*



KETUA *BK DPRD Riau Samsudin didampingi Bakri Bakar dan Irsyad Syafar meninjau fasilitas ruang sidang khusus Badan Kehormatan DPRD Sumbar.*



KETUA *BK DPRD Sumbar Bakri Bakar dan anggota BK DPRD Sumbar Irsyad Syafar menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota BK DPRD Riau, di ruang rapat khusus BK DPRD Sumbar.*



KETUA *BK DPRD Sumbar, Bakri Bakar.*



ANGGOTA *BK DPRD Sumbar, Irsyad Syafar.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 16 SEPTEMBER 2026.	9

Fotografi jadi Ruang Membaca Perjalanan Padang

Padang, Padek—Dari sebuah foto, sebuah kota dapat menyimpan banyak cerita. Wajah masyarakat, perubahan ruang kota, budaya, hingga aktivitas sehari-hari dapat direkam dalam sebuah bingkai dan kelak menjadi bagian dari catatan sejarah.

Semangat itulah yang dibawa dalam Padang Photo Festival (PPF) 2026. Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, festival fotografi ini menjadi ruang bagi fotografer dan masyarakat untuk melihat sekaligus merekam Kota Padang melalui berbagai perspektif.

PPF 2026 berlangsung sejak 6 Agustus hingga 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357 dengan menghadirkan sejumlah agenda, mulai dari Lomba Foto On The Spot, lokakarya Liku-Liku Padang, pameran foto cerita, hingga talkshow dan diskusi.

Pelaksanaan PPF 2026 mendapat dukungan melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) Nanda Satria, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang kreatif bagi fotografer sekaligus mendorong hadirnya dokumentasi visual tentang perjalanan Kota Padang.

Salah satu rangkaian PPF 2026 adalah Lomba Foto On The Spot yang menghasilkan ratusan karya dari para peserta. Beragam sudut Kota Padang, aktivitas masyarakat, serta kehidupan sehari-hari terekam melalui bidikan kamera.

Dari ratusan karya tersebut, Shabrina Mazaya terpilih sebagai Juara I. Rahmat Yusri meraih Juara II, sedangkan Maizal Chaniago menempati posisi Juara III.

Sementara itu, Adji Nugraha Tri Giantsa meraih Harapan I dan Deni Dahniel menjadi Harapan II.

Selain kompetisi, PPF 2026 juga menghadirkan pameran foto cerita yang mengangkat beragam sisi kehidupan Kota Padang.

Salah satu karya yang menampilkan cerita tentang kehidupan kota adalah karya Diah Angginauli Sitompul bertema Angkot: Simpul yang Bertahan. Melalui karya tersebut, angkot tidak hanya ditampilkan sebagai moda transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan, mobilitas, dan identitas masyarakat Kota Padang.

Rangkaian Padang Photo Festival 2026 juga diperkaya dengan talkshow bertema Padang; Dulu, Kini dan Nanti yang digelar di Taman Bermain, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (12/9).

Diskusi tersebut menghadirkan Nanda Satria, Founder Padang Heritage Bayu Haryanto, Kepala UPTD Museum Adityawarman, Tuti Alawiyah, serta Uyung Hamdani sebagai moderator.

Dalam diskusi itu, para narasumber membahas perjalanan Kota Padang, mulai dari masa lalu, kondisi yang dihadapi saat ini, hingga arah perkembangan dan berbagai tantangan kota pada masa mendatang.

Fotografi pun ditempatkan tidak sekadar sebagai karya visual. Lebih dari itu, kamera menjadi salah satu cara untuk membaca dan merekam perjalanan sebuah kota.

Apa yang tertangkap dalam bingkai hari ini dapat menjadi cerita bagi generasi berikutnya. Perubahan ruang kota, kehidupan masyarakat, tradisi, hingga peristiwa sehari-hari dapat menjadi jejak visual yang membantu melihat bagaimana Kota Padang tumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. **(rel)**



DOKUMENTASI PRIBADI

SUKSES DIGELAR: PPF 2026 sukses digelar di Kota Padang. Iven tersebut digelar sejak 6 Agustus hingga 13 September 2026.

BREAKING NEWS!

10

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	RABU 16 SEPTEMBER 2026	6

Gubernur: Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Padang, Padek—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penegasan tersebut juga berlaku terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Menurut Mahyeldi, pokir DPRD perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta prioritas pembangunan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal Sumbar yang terbatas.

Hal itu disampaikan Mahyeldi setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9).

Mahyeldi mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD Sumbar, terutama masukan agar pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk program yang menjadi kewenangan provinsi. "Kami sangat sepakat dengan itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus konsen dengan kewenangan-kewenangan provinsi," kata Mahyeldi.

Menurutnya, keselarasan tersebut semakin penting karena ruang fiskal Sumbar saat ini cukup terbatas. Kondisi tersebut menuntut setiap rupiah anggaran direncanakan dan dialokasikan secara tepat sasaran, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

"Apalagi saat sekarang ini fiskal kita sangat terbatas. Maka, kita harapkan teman-teman di DPRD juga harus sejalan dengan ini," ujarnya.

Mahyeldi mengatakan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif perlu diwujudkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, termasuk dalam penyusunan dan pembahasan pokir DPRD.

Ia menekankan, usulan pokir yang masuk dalam pembahasan anggaran harus terlebih dahulu dipastikan memiliki keterkaitan dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, program yang digarkan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dilaksanakan secara optimal.

"Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita harus fokus pada kewenangan provinsi, tetapi ketika pembahasan anggaran berlangsung justru ada usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan tersebut," katanya.

Untuk memastikan hal tersebut, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar melakukan penyesuaian dan verifikasi terhadap setiap usulan yang masuk dalam pembahasan RAPBD. "Saya sudah tegaskan kepada TAPD, ketika ada yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka pokirnya tidak akan bisa dijalankan," tegasnya.

Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar bersama DPRD dapat memperteguhkan kesamaan pandangan dalam pembahasan RAPBD 2027. Menurutnya, keterbatasan fiskal harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk program yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dengan fokus pada kewenangan dan prioritas pembangunan, ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. **(wnl)**

BIRO ADPIM UNTUK PADEK

TEGAS: Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan keterangan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Senin (14/9).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	RABU, 16 SEPTEMBER 2026	4

Ketua DPRD Sumbar Ajak Pelaku UMKM Terus Belajar dan Mengembangkan Usaha

PADANG, METRO

Menjalankan usaha merupakan proses yang membutuhkan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Selain modal, kemampuan, pengalaman dan hubungan baik dengan banyak orang juga menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang pengusaha.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi saat memberikan materi pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengusaha di Padang, Selasa (15/9).

Muhidi mengajak para pelaku UMKM untuk terus menambah pengetahuan, salah satunya dengan membiasakan diri membaca dan mengikuti berbagai pelatihan. Menurutnya, pengetahuan dapat membantu seseorang melihat berbagai kemungkinan dan peluang yang ada di sekitarnya.

"Kalau ingin sukses, kita harus mau belajar dan banyak membaca. Dengan ilmu, kita akan lebih mudah melihat peluang," ujar Muhidi.

Ia melihat Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa terus dikembangkan melalui kreativitas para pelaku usaha. Produk seperti rendang, tenun, kerajinan kayu serta beragam kuliner khas daerah memiliki karakter yang kuat dan berpeluang dikenal lebih luas.

Untuk itu, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kualitas produk sekaligus mengikuti perkembangan cara pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Muhidi, keterampilan menjadi salah satu bekal penting dalam mengembangkan usaha. Kemampuan menggunakan berbagai sarana yang tersedia perlu diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi, mengatur waktu, menyelesaikan persoalan dan membangun hubungan dengan orang lain.

"Skill dan soft skill sama-sama penting. Kemampuan itu bisa terus kita asah melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman," katanya.

Pengalaman, lanjutnya, juga memiliki peran besar. Berbagai proses yang dilalui dalam menjalankan usaha akan memberikan pembelajaran tersendiri bagi setiap pengusaha.

Muhidi kemudian mengingatkan pentingnya membangun jaringan. Menurutnya, hubungan baik dan silaturahmi dapat membuka banyak kesempatan, baik dalam mendapatkan informasi, kerja sama maupun mengembangkan pasar.

Ia menilai keterbatasan modal bukan selalu menjadi alasan untuk berhenti mencoba. Dengan membangun komunikasi dan kepercayaan, peluang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak bisa semakin terbuka.

"Perbanyak silaturahmi dan bangun jaringan. Dari jaringan itu bisa muncul berbagai peluang," ujarnya.

Di tengah upaya memperluas jaringan, Muhidi juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik. Reputasi, menurutnya, tumbuh dari sikap dan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi nilai yang perlu dijaga agar kepercayaan orang lain tetap tumbuh.

"Kalau orang melihat kita secara positif, insyaallah akan banyak hal baik yang mengikuti. Menjaga reputasi memang tidak mudah, karena itu harus dimulai dari karakter kita sendiri," tuturnya.

Muhidi juga menyampaikan bahwa DPRD Sumbar bersama pemerintah daerah memiliki peran dalam menciptakan ruang yang mendukung perkembangan UMKM. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan, program pemberdayaan dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

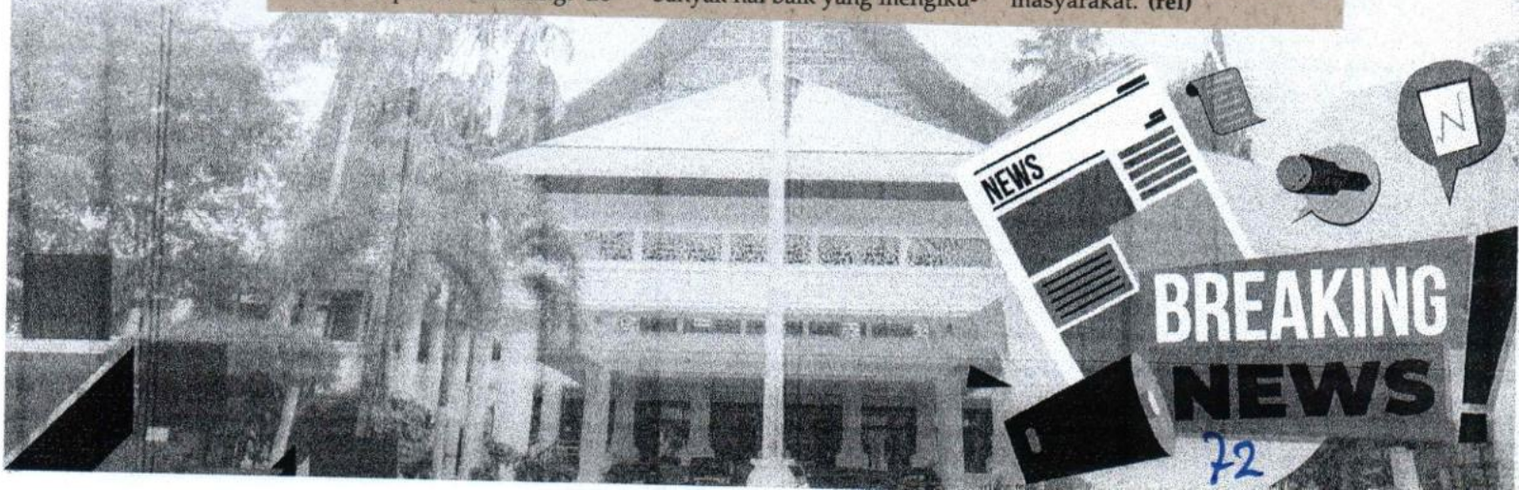
Ia menyebut Perda Sumbar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan regulasi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, program pemerintah juga perlu terus diarahkan pada kebutuhan nyata para pelaku UMKM, seperti peningkatan keterampilan, promosi produk, digitalisasi, penguatan usaha serta akses pembiayaan.

Pada kesempatan itu, Muhidi mengajak peserta untuk menikmati setiap proses dalam membangun usaha. Baginya, hasil yang diperoleh hari ini merupakan bagian dari perjalanan yang masih bisa terus dikembangkan.

"Dapat sedikit, kita syukuri. Dapat banyak, Alhamdulillah. Dengan bersyukur, kita belajar menghargai setiap proses dan nikmat yang kita terima," katanya.

Ia berharap para pelaku UMKM Sumbar dapat terus tumbuh dengan kemampuan yang semakin baik, jaringan yang semakin luas dan kepercayaan yang terus terjaga, sehingga berbagai produk lokal daerah dapat semakin dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. **(rel)**



KLIPING BERITA



ist

BIMTEK—Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memberikan materi pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengusaha di Padang.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	RABU, 16 SEPTEMBER 2026	9

Pengembangan Usaha Butuh Adaptasi

Laporan
HANDI YANUAR
Harian Rakyat Sumbar

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan selain modal, kemampuan, pengalaman dan hubungan baik dengan banyak orang menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang pengusaha.

"**MENJALANKAN** usaha merupakan proses membutuhkan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi," kata Muhidi, saat bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengusaha di Padang, Selasa (15/9).

Ia menyampaikan, pelaku UM KM supaya menambah pengetahuan, dengan membiasakan diri membaca dan mengikuti berbagai pelatihan.

"Pengetahuan dapat membantu seseorang melihat berbagai kemungkinan dan peluang yang ada di sekitarnya," ucap Muhidi.

Menurut Muhidi, kalau ingin sukses, harus mau belajar dan banyak membaca. Dengan ilmu, akan lebih mudah melihat peluang.

"Sumbar punya banyak potensi yang bisa dikembangkan melalui kreativitas para pelaku usaha. Produk seperti rendang, tenun, kerajinan kayu serta beragam kuliner khas daerah memiliki karakter yang kuat dan berpeluang dikenal lebih luas," ungkapnya.

Ia menyampaikan, pelaku UMKM harus meningkatkan kualitas produk sekaligus mengikuti perkembangan cara pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi digital.

"Keterampilan menjadi salah satu bekal penting dalam mengembangkan usaha," sebut Muhidi.

Selain itu, sambung Muhidi, kemampuan menggunakan berbagai sarana yang tersedia perlu diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi, mengatur waktu, menyelesaikan persoalan dan membangun hubungan dengan orang lain.

"Skills dan soft skills sama-sama penting. Kemampuan itu bisa terus kita asah melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman," ulas Muhidi.

Ia mengakhiri, pengalaman juga memiliki peran besar. Berbagai proses yang dilalui dalam menjalankan usaha akan memberikan pembelajaran tersendiri bagi setiap pengusaha.

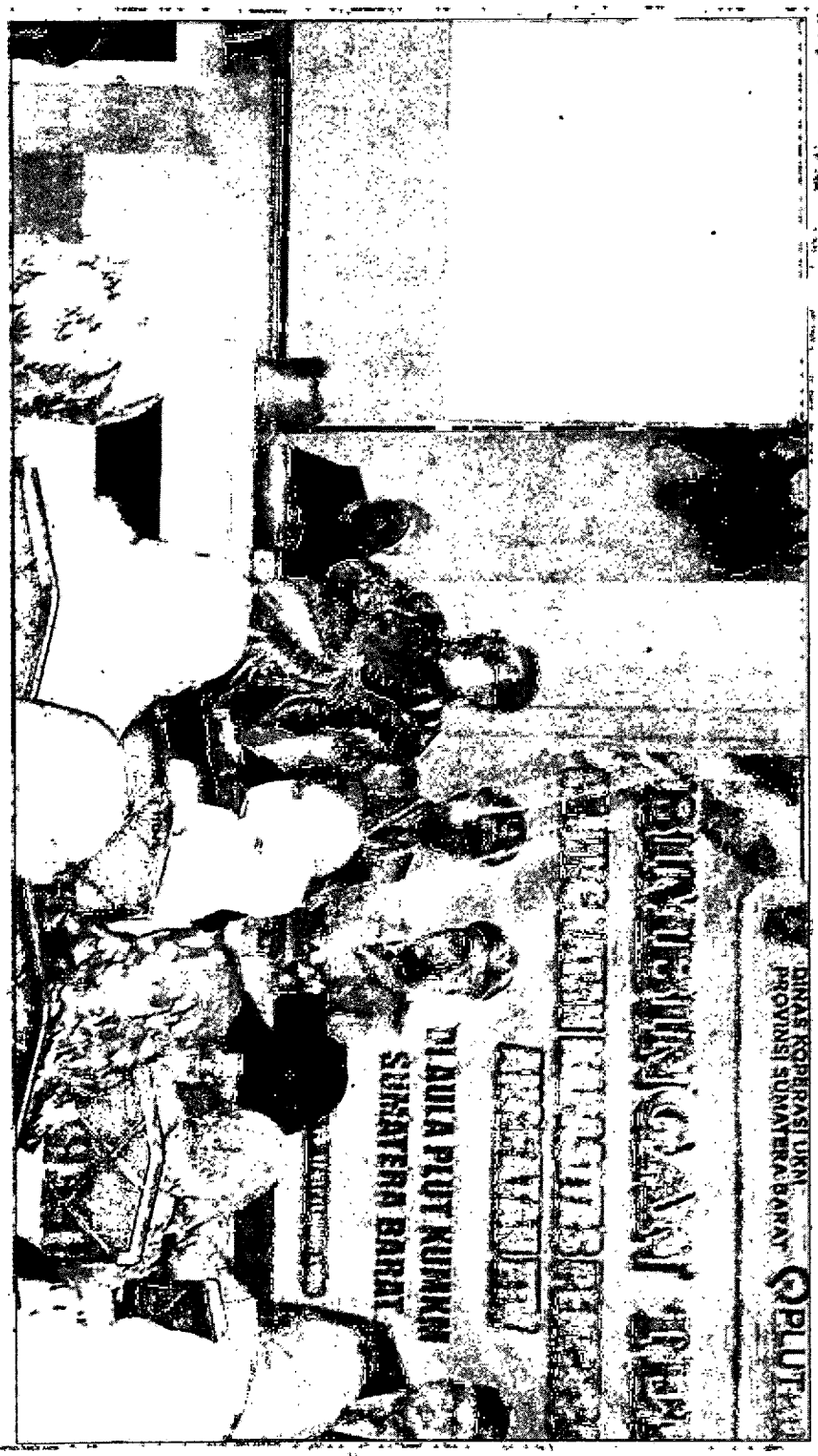
"Membangun jaringan samgt penting, hubungan baik dan silaturahmi dapat membuka banyak kesempatan, baik dalam mendapatkan informasi, kerja sama maupun mengembangkan pasar," pungkasnya.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, saat bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas pengusaha di Padang, Selasa (15/9).

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN | HARI/TANGGAL | HALAMAN

Rakyat Sumbar

RABU, 16 SEPTEMBER 2026

Nanda Satria Support Padang Photo Festival

Padang, Rakyat Sumbar — Dari sebuah foto, sebuah kota bisa menyimpan banyak cerita. Wajah masyarakat, perubahan ruang kota, budaya, hingga aktivitas sehari-hari dapat menjadi rekaman visual yang suatu saat menjadi bagian dari sejarah. Semangat inilah yang dibawa dalam Padang Photo Festival (PPF) 2026 yang tahun ini memasuki tahun kedua.

PPF 2026 berlangsung sejak 6 Agustus hingga 13 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Berbagai agenda digelar, mulai dari Lomba Foto On The Spot, lokakarya "Liku-Liku Padang", pameran foto cerita, hingga talkshow dan diskusi yang mengajak masyarakat melihat Kota Padang melalui perspektif fotografi.

Pelaksanaan PPF 2026 mendapat support melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) Nanda Satria, S.IP, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya membuka ruang kreatif bagi para fotografer sekaligus mendorong hadirnya dokumentasi visual tentang perjalanan Kota Padang.

Salah satu rangkaian PPF adalah Lomba Foto On The Spot yang diikuti ratusan karya. Dari karya-karya tersebut, terpilih lima pemenang, yakni Shabrina Mazaya sebagai Juara 1, Rahmat Yusri Juara 2, Maizal Chaniago Juara 3, Adji Nugraha Tri Giantsa Harapan 1 dan Deni Dahniel Harapan 2.

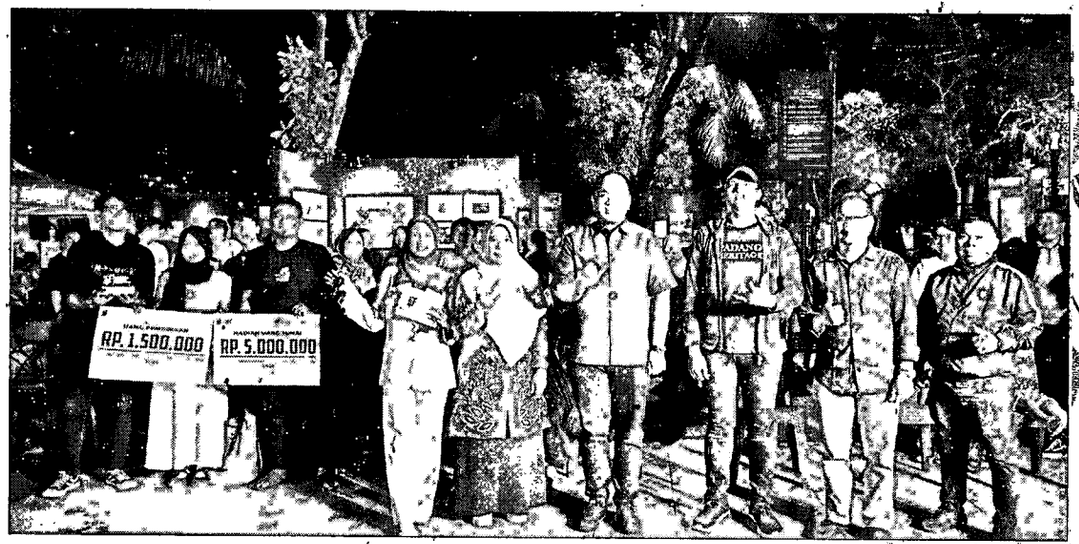


FOTO: SUKRI UMAR

WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera BaratNanda Satria, S.IP bersama peserta PPF di Taman Bermain, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (12/9).

Sementara pada kategori pameran foto cerita, karya Diah Angginauli Sitompul dengan tema "Angkot: Simpul yang Bertahan" menjadi salah satu karya yang mengangkat cerita kuat tentang kehidupan Kota Padang. Angkot tidak hanya dilihat sebagai moda transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan, mobilitas, dan identitas masyarakat kota.

Rangkaian PPF kemudian diperkaya dengan talkshow bertema "Padang: Dulu, Kini dan Nanti" yang digelar di Taman Bermain, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (12/9).

Talkshow tersebut menghadirkan Nanda Satria, S.IP, Founder Padang Heritage Bayu Haryanto, ST., M.Si, Kepala UPTD Museum Adityawarman Dr. Tuti Alawiyah, S.E., S.Pd.I., MA, serta Uyung Hamdani sebagai moderator. Diskusi membahas perjalanan Kota Padang dari masa lalu, kondisi hari ini, hingga arah dan tantangan kota di masa mendatang.

Dalam rangkaian tersebut, fotografi ditempatkan bukan sekadar sebagai karya visual, tetapi sebagai cara untuk membaca dan merekam perjalanan sebuah kota. Apa yang tertangkap kamera hari ini dapat menjadi cerita yang membantu generasi berikutnya memahami bagaimana Padang pernah tumbuh dan berubah.

Melalui PPF tahun kedua, ruang kreatif bagi fotografer sekaligus ruang untuk mendokumentasikan Kota Padang terus diperkuat. Dari lomba, lokakarya, foto cerita hingga diskusi, seluruh rangkaian tersebut bermuara pada satu hal: merekam Padang hari ini agar tetap memiliki cerita untuk masa depan. **(suk)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 16 Agustus 2026 (3 Rabiul Akhir 1448 H)	8

BK DPRD Sumbar Terima Kunjungan BK DPRD Riau

PADANG - SINGGALANG

Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/9). Kunjungan tersebut bertujuan melakukan observasi dan studi banding terkait penerapan tata tertib, kode etik, serta tata beracara Badan Kehormatan DPRD.

Rombongan BK DPRD Riau dipimpin Ketua BK DPRD Riau Samsudin dan disambut Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan BK, terutama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan perilaku, kedisiplinan, serta etika anggota DPRD.

Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar mengatakan, sejak awal tahun pihaknya telah memproses sejumlah persoalan yang berkaitan dengan anggota DPRD. Salah satunya menyangkut persoalan pinjam-meminjam dengan pihak perbankan yang prosesnya telah bersinggungan dengan ranah hukum pidana.

Menurutnya, ketika sebuah persoalan telah masuk ke ranah pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, BK tetap menjalankan proses sesuai kewenangan dan prosedur yang dimilikinya.

"Kalau sudah masuk ranah pidana, tentu tidak bisa terlalu jauh kita tangani. Tetapi secara prosedural tetap kita proses sesuai kewenangan BK, termasuk ketika ada permintaan keterangan dari penegak hukum," ujar Bakri.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan DPRD Sumbar telah memiliki perangkat aturan yang menjadi dasar bagi BK dalam menjalankan tugasnya, mulai dari tata tertib, kode etik hingga tata beracara. Ketiga perangkat tersebut menjadi rujukan dalam setiap proses penanganan persoalan yang masuk ke BK.

"Jadi, penyelesaian setiap persoalan tetap merujuk pada aturan yang ada. Kita tidak bisa bertindak di luar kewenangan," katanya.

Bakri menegaskan, BK memiliki batas kewenangan yang harus dijaga dalam menangani setiap persoalan. BK dapat memproses aspek yang berkaitan dengan tata tertib dan kode etik anggota DPRD, tetapi tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, terutama apabila persoalan tersebut telah masuk dalam proses hukum pidana.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup persoalan anggota DPRD yang sedang berhadapan dengan proses hukum, termasuk bagaimana kedudukan dan hak-hak anggota DPRD dalam kondisi tersebut. Selain itu, turut dibahas batas kewenangan BK dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BK DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengatakan persoalan anggota DPRD yang berhadapan dengan hukum perlu dilihat secara proporsional berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

"Ketika persoalan sudah berada di luar tupoksi Badan Kehormatan, tentu kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Kita harus melihat dasar dan kewenangan yang ada," katanya.

Menurut Irsyad, BK juga telah melakukan sejumlah rapat terkait kedisiplinan anggota DPRD, termasuk menyangkut kehadiran dalam rapat-rapat resmi lembaga seperti rapat paripurna. Persoalan absensi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan.

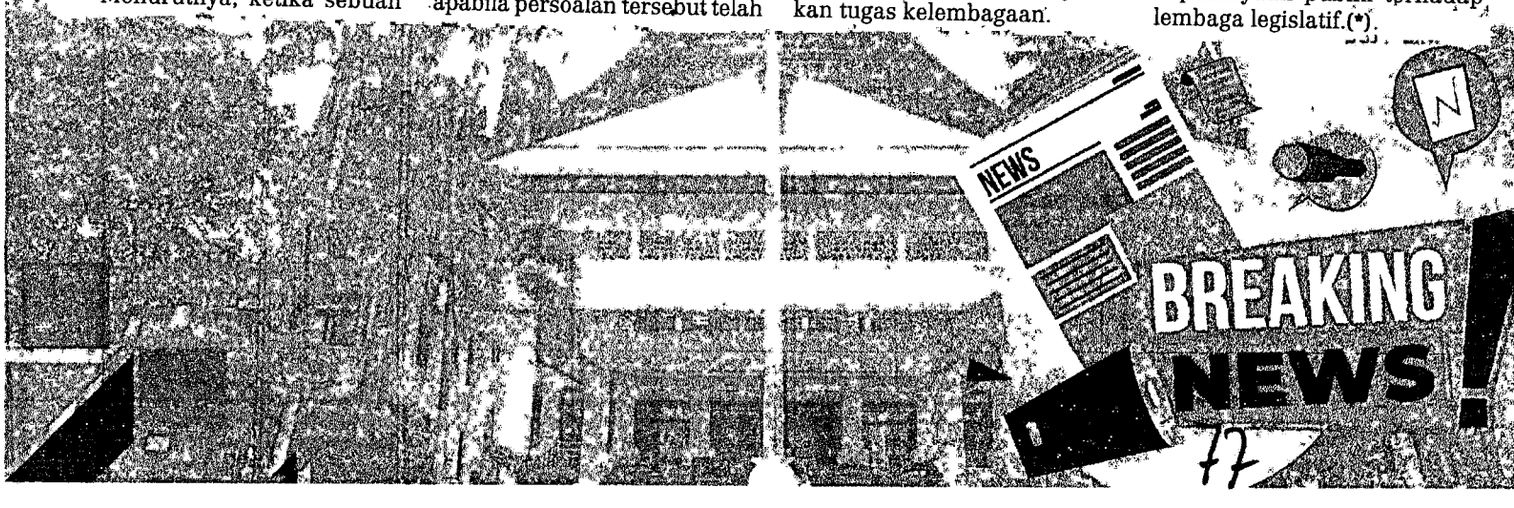
Ia mengatakan, setiap persoalan yang ditangani BK harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan tertentu, tetapi berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Secara keseluruhan, kita terus berkomitmen menjaga marwah DPRD Sumbar. Setiap persoalan yang masuk akan kita lihat berdasarkan aturan dan prosedur yang ada," ujarnya.

Sementara itu, kunjungan BK DPRD Riau yang dipimpin Samsudin tersebut menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk saling membandingkan penerapan tata beracara, sekaligus berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi Badan Kehormatan.

Studi banding tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK, khususnya dalam menjaga disiplin, etika, integritas, serta kehormatan anggota dan lembaga DPRD.

Melalui pertukaran pengalaman itu, penerapan tata tertib, kode etik, dan tata beracara diharapkan tidak hanya menjadi perangkat administratif, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.(*)

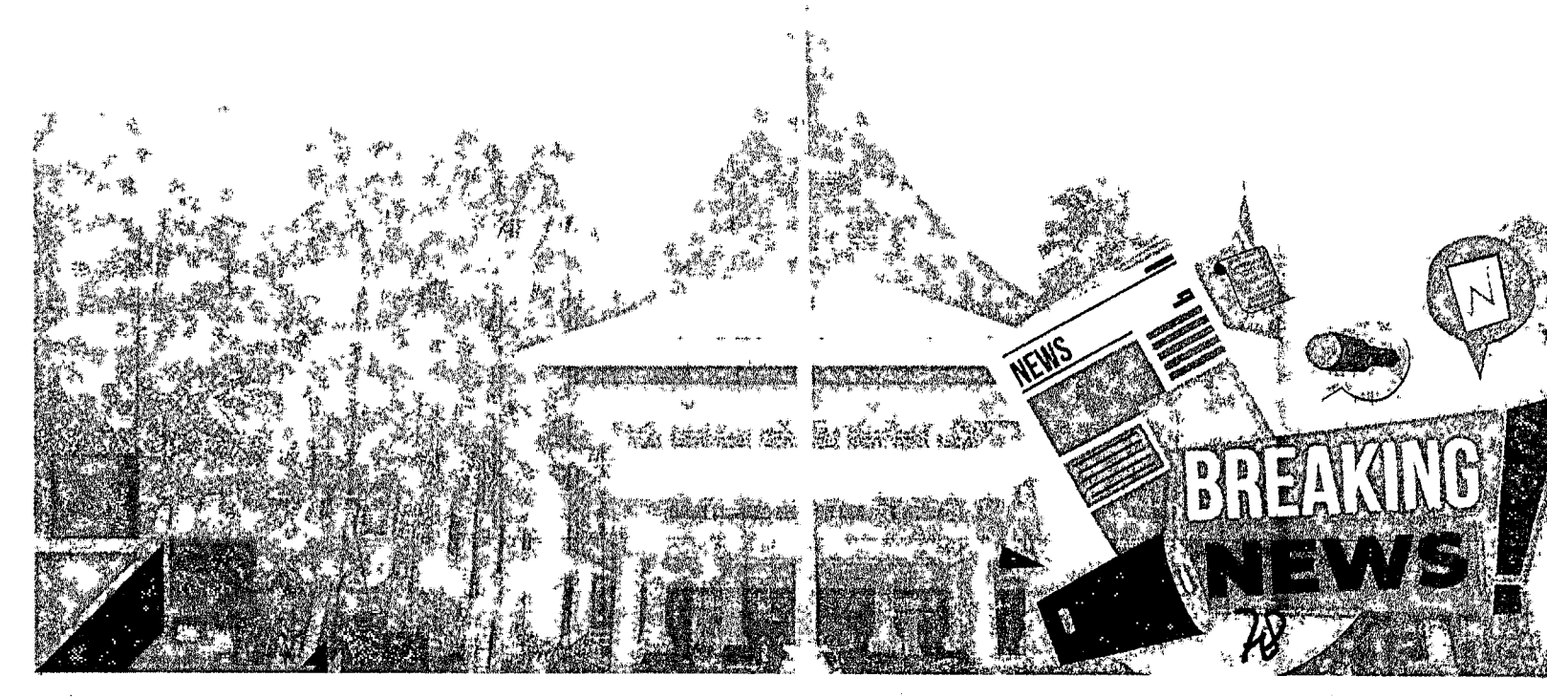


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORA	ALAMAN





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 17 SEPTEMBER 2026	8

Haluan — Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DPRD Sumbar Jadi Rujukan BK DPRD Riau Soal Tata Beracara

PADANG, HALUAN — Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (15/9). Kunjungan tersebut untuk melakukan observasi dan studi banding terkait penerapan tata tertib, kode etik, serta tata beracara Badan Kehormatan DPRD.

Rombongan BK DPRD Riau dipimpin Ketua BK DPRD Riau Samsudin dan disambut Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan BK, terutama dalam menangani persoalan perilaku, kedisiplinan, dan etika anggota DPRD.

Ketua BK DPRD Sumbar Bakri Bakar mengatakan, sejak awal tahun pihaknya telah memproses sejumlah persoalan yang berkaitan dengan anggota DPRD. Salah satunya menyangkut persoalan pinjam-meminjam dengan pihak perbankan yang prosesnya telah bersinggungan dengan ranah hukum pidana.

Menurutnya, ketika sebuah persoalan telah masuk ke ranah pidana, penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Namun, BK tetap menjalankan proses sesuai kewenangan dan prosedur yang dimilikinya.

"Kalau sudah masuk ranah pidana, tentu tidak bisa terlalu jauh kita tangani. Tetapi secara prosedural tetap kita proses sesuai kewenangan BK, termasuk ketika ada permintaan keterangan dari penegak hukum," ujar Bakri.



ANGGOTA BK DPRD Sumbar, Irsyad Syafar

Ia menjelaskan, DPRD Sumbar telah memiliki perangkat aturan yang menjadi dasar bagi BK dalam menjalankan tugas, mulai dari tata tertib, kode etik hingga tata beracara. Ketiga perangkat tersebut menjadi rujukan dalam setiap proses penanganan persoalan yang masuk ke BK.

"Jadi, penyelesaian setiap persoalan tetap merujuk pada aturan yang ada. Kita tidak bisa bertindak di luar kewenangan," katanya.

Bakri menegaskan, BK memiliki batas kewenangan yang harus dijaga dalam menangani setiap persoalan. BK dapat memproses aspek yang berkaitan dengan tata tertib dan kode etik anggota DPRD, tetapi tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, terutama apabila persoalan telah masuk dalam proses hukum pidana.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan juga mencakup persoalan anggota DPRD yang sedang berhadapan dengan proses hukum, termasuk kedudukan dan hak-hak anggota DPRD dalam kondisi tersebut. Selain itu, turut dibahas batas kewenangan BK dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BK DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengatakan persoalan anggota DPRD yang berhadapan dengan hukum perlu dilihat secara proporsional berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga.

"Ketika persoalan sudah berada di luar tupoksi Badan Kehormatan, tentu kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Kita harus melihat dasar dan kewe-



PIMPINAN dan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumbar

nangan yang ada," katanya.

Menurut Irsyad, BK juga telah melakukan sejumlah rapat terkait kedisiplinan anggota DPRD, termasuk menyangkut kehadiran dalam rapat resmi lembaga seperti rapat paripurna. Persoalan absensi menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan kewajiban anggota DPRD dalam menjalankan tugas kelembagaan.

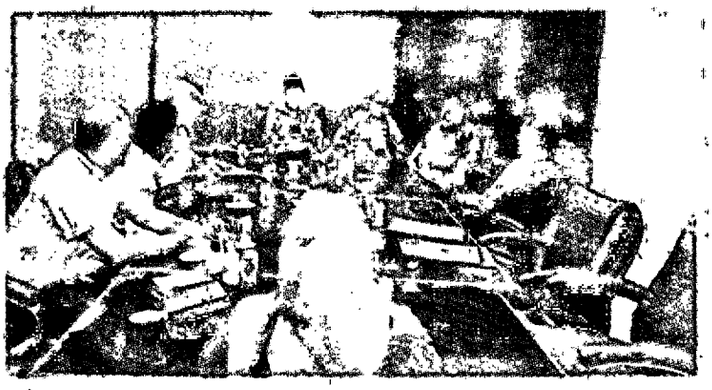
Ia mengatakan, setiap persoalan yang ditangani BK harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Secara keseluruhan, kita terus berkomitmen menjaga marwah DPRD Sumbar. Setiap persoalan yang masuk akan kita lihat berdasarkan aturan dan prosedur yang ada," ujarnya.

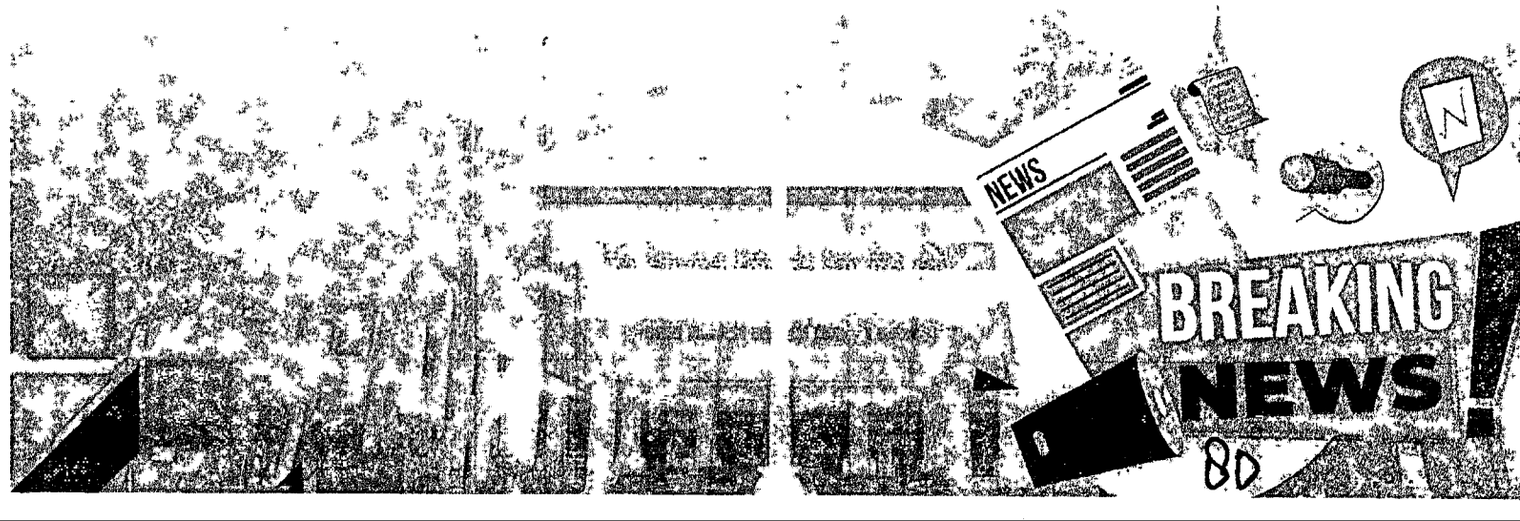
Sementara itu, kunjungan BK DPRD Riau yang dipimpin Samsudin menjadi momentum bagi kedua lembaga untuk saling membandingkan penerapan tata beracara sekaligus berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi Badan Kehormatan.

Studi banding tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas BK, khususnya dalam menjaga disiplin, etika, integritas, serta kehormatan anggota dan lembaga DPRD.

Melalui pertukaran pengalaman tersebut, penerapan tata tertib, kode etik, dan tata beracara diharapkan tidak hanya menjadi perangkat administratif, tetapi juga menjadi instrumen dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. (*)



BK DPRD Sumbar saat menerima kunjungan DPRD daerah lain saat berkunjung ke DPRD Sumbar



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 17 September 2026 (4 Rabul Akhir 1448 H)	8

Merekam Wajah Padang Lewat Lensa PPF 2026

PADANG - Sebuah foto kerap kali menyimpan ribuan cerita yang melampaui batas waktu. Wajah dinamika masyarakat, perubahan sudut kota, denyut budaya, hingga rutinitas sehari-hari merupakan bagian dari rekam visual yang kelak menjadi catatan sejarah.

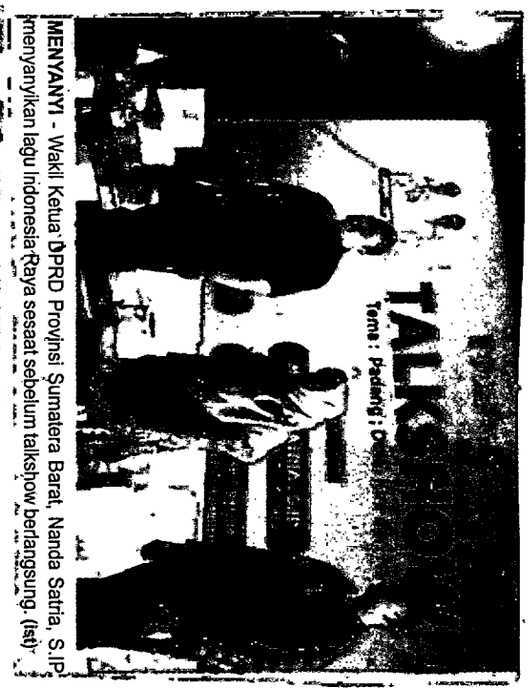
Semangat merawat memori kolektif inilah yang diusung dalam Padang Photo Festival (PPF) 2026 yang sukses digelar untuk tahun kedua.

Berlangsung meriah sejak 6 Agustus hingga 13 September 2026, PPF 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357.

Beragam kegiatan edukatif dan kreatif dihadirkan, mulai dari Lomba Foto On The Spot, lokakarya "Liku-Liku Padang", pameran foto cerita (photo essay), hingga talkshow kebudayaan.

Keberlangsungan ruang kreatif ini mendapat dukungan penuh melalui alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP.

Dukungan tersebut menjadi dorongan nyata dalam membuka ruang ekspresi bagi para fotografer lokal sekaligus menggalakkan dokumentasi visual perjalanan Kota Padang.



MENYANYI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP menyanyikan lagu Indonesia Raya sesaat sebelum talkshow berlangsung. (ist)

Melacak Jejak Padang

Ajang Lomba Foto On The Spot berhasil menyedot antusiasme tinggi dengan hadirnya ratusan karya visual yang memotret sudut-sudut unik Kota Padang. Dari hasil kurasi ketat, terpilih lima peraih penghargaan terbaik.

Mereka Shabrina Mazaya (juara 1), Rahmat Yusri (juara 2), Maizal Chaniago (juara 3), Adji Nugraha Tri Giantsa (harapan 1) dan Deni Dahniel (harapan 2).

Daya tarik pameran makin terasa kuat melalui kategori pameran foto cerita. Salah satu yang mencuri perhatian adalah karya Diah Angginauli Sitompul bertajuk "Angkot: Simpul yang Bertahan".

Karya ini secara mendalam merekam keberadaan angkutan kota (angkot) bukan sekadar moda transportasi harian, melainkan narasi mobilitas, perjuangan hidup, serta identitas sosial masyarakat Padang yang terus bertahan di tengah jaman.

Puncak kemeriahan PPF 2026 diperkaya dengan talkshow bertajuk "Padang; Dulu, Kini dan Nanti" yang digelar di Taman Bermain, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Sabtu (12/9).

Dipandu oleh Uyung Hamdani sebagai moderator, diskusi lintas generasi ini menghadirkan tiga narasumber utama, Nanda Satria, S.IP (Wakil Ketua DPRD Sumbar, Bayu Haryanto, S.T., M.Si. (Founder Padang Heritage, Dr. Tuti Alawiyah, S.E., S.Pd.I., M.A. (Kepala UPTD Museum Adityawarman)

Diskusi hangat tersebut mengupas tuntas transformasi Kota Padang dari rekam jejak sejarah masa lalu, dinamika kondisi hari ini, hingga tantangan penataan kota di masa depan.

Melalui PPF 2026, fotografi berhasil ditempatkan lebih dari sekadar estetika visual—ia menjadi instrumen kritis untuk membaca dan merekam jejak peradaban.

Apa yang tertangkap oleh kamera hari ini dipastikan menjadi warisan cerita berharga bagi generasi mendatang untuk memahami bagaimana Padang pernah tumbuh dan berkembang. (107)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026	3

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bahas Ketertiban Aksi Massa dengan Intelkam Polda

PADANG, METRO

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. **(rgr)**



ist

DIALOG—Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama jajaran Direktorat Intelkam Polda Sumbar usai melakukan dialog.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026	8

Maifrizon Tanamkan Disiplin ASN Sekretariat DPRD Sumbar

PADANG, HALUAN – Jangan anggap apel pagi sekadar rutinitas. Di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, apel menjadi momentum untuk mengencangkan kembali barisan, memperkuat disiplin, sekaligus memastikan seluruh aparatur siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

Pesan itu terlihat dalam Apel Pagi Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kamis (17/9/2026). Bertempat di halaman depan lobby Kantor DPRD Sumbar, apel dipimpin langsung Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si.

Kehadiran pimpinan dalam apel tersebut menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Bagi Sekretariat DPRD Sumbar, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pijakan dalam menjalankan pelayanan dan mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Apalagi, Sekretariat DPRD berada di garis penting dalam mendukung berbagai agenda kedewanan. Setiap kegiatan membutuhkan kesiapan aparatur, koordinasi yang kuat, serta kemampuan bekerja secara cepat, tertib, dan pro-fesional.

Karena itu, apel pagi menjadi momentum untuk menyamakan ritme kerja seluruh jajaran. Tidak boleh ada pekerjaan yang berjalan tanpa koordinasi. Tidak boleh pula pelayanan kedewanan kehilangan dukungan hanya karena lemahnya komunikasi internal.

Maifrizon melalui kepemimpinannya di Sekretariat DPRD Sumbar terus menempatkan kedisiplinan sebagai bagian penting dalam membangun kualitas aparatur. Semangat tersebut menjadi modal untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin tertib dan bertanggung jawab.

Dari apel pagi, targetnya bukan sekadar barisan yang rapi. Target utamanya adalah kinerja yang semakin nyata. Setiap aparatur diharapkan memahami tugas masing-ma-sing dan memberikan kon-tribusi terbaik dalam men-dukung aktivitas kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Koordinasi juga menjadi perhatian penting. Dengan komunikasi yang solid antarbagiannya, berbagai agenda kedewanan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara lebih terarah. Sinergi internal menjadi salah satu kunci agar pekerjaan tidak tersendat.

Di tengah tuntutan pela-yanan publik yang semakin tinggi, aparatur dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan tanggung jawab. Kehadiran harus berbanding lurus dengan produktivitas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan.

Apel rutin sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan di Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Setiap dukungan administratif, teknis, dan pelayanan memiliki peran dalam memastikan fungsi kelembagaan DPRD dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Semangat kebersamaan yang dibangun melalui apel diharapkan tidak berhenti ketika barisan dibubarkan. Semangat itu harus dibawa ke ruang kerja, diterjemahkan menjadi koordinasi, pelayanan, ketepatan waktu, serta penyelesaian tugas yang bertanggung jawab.**(h/len)**



Apel Pagi Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kamis (17/9/2026). HUMAS

BREAKING NEWS!

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN SINGGALANG
HARI/TANGGAL Sabtu, 19 September 2026 (6 Rabiul Akhir 1448 H)
HALAMAN 4

DORONG EKONOMI PESISIR

Ketua DPRD Sumbar Salurkan Benih dan Pakan Ikan Kerapu

PADANG - SINGGALANG

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir terus didorong melalui penguatan sektor perikanan budidaya. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, pekan lalu.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi hadir langsung untuk menyerahkan bantuan tersebut. Program ini bertujuan memperkuat produktivitas pembudidaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan ini merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Muhidi yang disinergikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar.

Muhidi menyatakan, dukungan terhadap pembudidaya harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyiasati tingginya biaya operasional. Bantuan pakan diharapkan mampu meringankan beban biaya produksi, sedangkan benih kerapu menjadi modal penting untuk mendongkrak hasil panen.

Ia berharap stimulan ini tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan lewat peningkatan pendapatan warga.

Lebih lanjut, Muhidi mengingatkan kelompok pembudidaya agar mengelola bantuan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Kekompakan antaranggota menjadi kunci agar pemanfaatan bantuan berjalan efektif.

"Kelola bantuan ini dengan baik, transparan, dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budi daya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang melimpah dan berdampak nyata pada ekonomi masyarakat," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi nelayan dan pembudidaya. Dukungan pada sektor ini dinilai vital demi memperkuat ekonomi wilayah pesisir sekaligus mendorong kemandirian pangan bahari di Sumbar.

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, DKP, dan masyarakat diharapkan dapat memastikan budi daya ikan kerapu di Teluk Buo terus berkembang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. (*)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA









BREAKING NEWS!

85

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 22 SEPTEMBER 2026	12

Ketua DPRD Sumbar Bahas Ketertiban Aksi Massa dengan Intelkam Polda Sumbar

KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat menerima kunjungan silaturahmi Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan di ruang kerjanya, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis lalu (17/9).

Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara lembaga legislatif daerah dan kepolisian guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah tingginya dinamika penyampaian pendapat di muka umum.

Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumbar selalu terbuka menerima masyarakat maupun kelompok mahasiswa yang datang membawa aspirasi. Menurutnya, unjuk rasa merupakan bagian 'legitimate' dari dinamika demokrasi yang perlu difasilitasi dengan baik.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh kelompok yang hadir," ujar Muhidi.

Ia menyebut bahwa pola dan karakter penyampaian orasi di lapangan dapat menjadi indikator yang bisa dicermati bersama. Oleh sebab itu, ia meminta koordinasi dan deteksi dini antara Sekretariat DPRD Sumbar dan Ditintelkam Polda Sumbar terus diperkuat menjelang setiap rencana aksi unjuk rasa.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib, dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati secara proporsional," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan bersama jajaran menyambut baik penguatan pola komunikasi ini untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat serta dinamika politik daerah.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Kompol Liya Desmon, serta Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko. Silaturahmi diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Ketua DPRD Sumbar kepada Direktur Intelkam. *



KLIPING BERITA



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi berdiskusi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi berdiskusi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan beserta jajaran.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi dan Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan berbincang mengenai penguatan komunikasi dan pengamanan aksi penyampaian aspirasi masyarakat.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KLIPING BERITA

KORAN KORAN PADANG
HARI/TANGGAL SELASA, 22 SEPTEMBER 2026
HALAMAN 2

Dengarkan Curhat Guru, Muhidi Minta Pengawasan MBG Diperketat



PADANG, KP - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membutuhkan aturan ketat dan pengawasan berlapis di lapangan, terutama dalam menjamin standar higienitas serta kelayakan santapan yang diterima para siswa.

Desakan tersebut mengemuka saat seorang tenaga pendidik menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, di sela-sela Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Padang, baru-baru ini.

Dalam sesi dialog tersebut, guru tersebut menyoroti beberapa kasus dugaan keracunan makanan pascakonsumsi MBG yang terjadi di wilayah Sumbar dan memicu keresahan publik.

"Harus ada aturan mengikat dan pengawasan yang kuat dari penyedia hingga sekolah agar makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman. Saya pernah merasakan keracunan dan itu sangat menyakitkan, bahkan taruhannya nyawa jika lambat ditangani. Harus ada jaminan kelayakan konsumsi," kata guru tersebut di hadapan Ketua DPRD Sumbar.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa MBG merupakan program nasional yang sangat strategis untuk pemenuhan gizi generasi muda. Kendati demikian, katanya, evaluasi berkala secara menyeluruh mutlak dilakukan demi menyempurnakan tata kelola serta mengantisipasi celah kelalaian di lapangan.

"MBG ini program nasional, tetapi dalam penerapannya memang membutuhkan evaluasi-evaluasi berkala agar anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi," ujar Muhidi.

Ia mengingatkan agar seluruh rantai pelaksana program, mulai dari SPPG, pihak sekolah, hingga tim pengawas disiplin mengawal ketentuan juknis. Jangan sampai niat mulia pemenuhan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan anak akibat lemahnya kontrol kebersihan. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 22 September 2026 (9 Rabiul Akhir 1448 H)	12

Perkuat Sinergi, Ketua DPRD Sumbar dan Direktur Intelkam Bahas Kamtibmas

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.(*)



89

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT









SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 23 SEPTEMBER 2026	4

Pasca-Galodo Solok, Nanda Satria Minta Warga Jauhi Zona Rawan

PADANG, KP - Bencana galodo menerjang kawasan Kompleks Kantor Bupati Solok di Arosuka, Kabupaten Solok, Senin (21/9) malam. Material batu, lumpur, dan tanah yang terbawa arus deras menggenangi area perkantoran hingga meluber menutup badan Jalan Raya Solok–Padang.



NANDA SATRIA

Merespons musibah tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, meminta masyarakat di sekitar lokasi terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi titik-titik rawan pergerakan material.

Ia mengimbau warga tidak panik, namun tetap siaga terhadap potensi galodo atau banjir susulan. Pihaknya mendorong tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan untuk bergerak cepat melakukan penyisiran serta evakuasi warga yang membutuhkan pertolongan.

"Keselamatan masyarakat adalah yang paling utama saat ini. Tim gabungan harus bergerak cepat menyisir area terdampak untuk memastikan tidak ada warga yang terjebak. Warga kami imbau tetap siaga dan mengikuti arahan petugas di lapangan," ujar Nanda Satria.

Ia juga meminta masyarakat yang kehilangan kontak atau mengetahui keberadaan anggota keluarga yang terjebak untuk segera melapor ke posko BPBD Kabupaten Solok guna mempercepat respons pencarian.

Hingga saat ini, tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan pembersihan material longsoran di jalan raya serta mendata dampak kerusakan dan kemungkinan adanya korban jiwa. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	RABU, 23 SEPTEMBER 2026	2

Galodo Terjang Arosuka

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Minta Warga Jauhi Zona Merah

PADANG, METRO

Menanggapi terjadinya bencana galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Nanda Satria mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah rawan bencana,, untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.

Nanda meminta masyarakat tidak panik, namun tetap siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan maupun pergerakan material dari kawasan yang terdampak.

"Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tetap berhati-hati dan siaga. Jika berada di kawasan yang berpotensi terdampak, segera mencari tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan," ujar Nanda.

Selain itu, Nanda juga meminta tim gabungan yang berada di lokasi untuk segera melakukan penanganan dan memastikan keselamatan warga, terutama apabila masih terdapat masyarakat yang terjebak atau membutuhkan pertolongan.



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria

Ia meminta unsur terkait, mulai dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan serta relawan untuk berkoordinasi dalam proses evakuasi dan penanganan dampak bencana.

"Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Tim gabungan harus bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan," tegasnya.

Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi aliran galodo maupun daerah yang masih berisiko, karena kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi, sementara masyarakat diminta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait kondisi terkini di lapangan.

Hingga laporan awal diterbitkan, kondisi wilayah terdampak dan kemungkinan adanya korban masih dalam pendataan serta penelusuran lebih lanjut. Nanda juga menghibau warga segera laporkan ke BPBD Kab. Solok jika masih ada warga terjebak. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 23 September 2026 (10 Rabiul Akhir 1448 H)	8

GALODO TERJANG AROSUKA

Nanda Satria Minta Warga Jauhi Zona Merah

Padang, Singgalang

Bencana galodo menerjang kawasan Kantor Bupati Solok di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9) malam.

Material batu, lumpur, dan tanah yang terbawa arus deras dilaporkan menggenangi kompleks perkantoran hingga meluber ke badan Jalan Raya Solok-Padang.

Merespons musibah ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak panik terhadap potensi banjir susulan.



NANDA SATRIA

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap siaga. Jika berada di kawasan rawan, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman dan ikuti arahan petugas di lapangan," ujar Nanda, Selasa (22/9).

Nanda mendesak tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan untuk bergerak cepat. Prioritas utama saat ini adalah mengevakuasi warga yang terjebak dan membutuhkan pertolongan.

"Keselamatan warga adalah yang paling utama. Koordinasi di lapangan harus diperkuat agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga mengingatkan warga untuk menjauhi lokasi aliran galodo serta zona merah karena kondisi medan yang masih labil dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Nanda meminta warga segera melapor ke BPBD Kabupaten Solok jika ada anggota keluarga yang belum ditemukan atau masih terjebak di area bencana. (401)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 23 SEPTEMBER 2026	8

JAGA KETERTIBAN AKSI MASSA

DPRD Perkuat Sinergi dengan Polda Sumbar

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA







SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 25 SEPTEMBER 2026	4

USULAN PERUBAHAN NAMA BIM

Muhidi Minta Dikaji Komprehensif dan Lintas Daerah


MUHIDI

PADANG, KP - Usulan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengubah nama Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Sumbar, Muhidi. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan identitas pada pintu gerbang utama daerah tersebut harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan.

Meskipun demikian, ia tetap menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap gagasan Pemkab Padang Pariaman mengingat rekam jejak dan ketokohan besar Syekh Burhanuddin dalam sejarah penyebaran Islam serta peradaban Minangkabau.

"Gagasan untuk mengabadikan nama Syekh Burhanuddin merupakan usulan yang patut kita hormati dan dengarkan," kata Muhidi, Kamis (24/9).

Namun, ia mengingatkan bahwa BIM tidak hanya milik satu wilayah administratif, melainkan simbol identitas, budaya, dan penggerak ekonomi bagi seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

"Bandara Internasional Minangkabau merupakan gerbang Sumbar yang memiliki makna dan kepentingan lebih luas daripada satu wilayah administratif. Karena itu, setiap rencana perubahan nama perlu dibicarakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Sumatera Barat secara keseluruhan," tegasnya.

Menurutnya, ada sejumlah aspek krusial yang dinilai wajib ditelaah secara mendalam sebelum melangkah ke proses regulasi, meliputi kajian sejarah, budaya, adat, sosial, hingga tata hukum dan administrasi negara. Selain itu, dampak potensial terhadap 'branding' pariwisata daerah, konektivitas jalur penerbangan internasional, investasi, serta pertumbuhan ekonomi juga harus diperhitungkan dengan matang.

Di luar polemik penamaan, Ketua DPRD Sumbar mengimbau agar perhatian utama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan tidak teralih dari upaya peningkatan mutu fasilitas penerbangan.

"Perhatian kita jangan berhenti pada persoalan nama. BIM harus terus diperkuat, baik melalui peningkatan konektivitas penerbangan, kualitas pelayanan, pengembangan pariwisata, maupun dukungan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya. **(fai)**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Harian Umum Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 26 SEPTEMBER 2026	9

INFRASTRUKTUR SUMBAR DIPERKUAT

Perda Jasa Konstruksi Buka Ruang Kontraktor Lokal Naik Kelas

PADANG, HALUAN- Perda Jasa Konstruksi yang telah disahkan DPRD Provinsi Sumatera Barat membuka ruang lebih besar bagi kontraktor dan tenaga kerja lokal untuk terlibat sekaligus meningkatkan kapasitas dalam pembangunan daerah.

Perda ini juga memperkuat pengawasan mutu pekerjaan, keselamatan kerja, perlindungan pelaku usaha, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.

DPRD Sumbar mengesahkan Ranperda Jasa Konstruksi menjadi Perda dalam Rapat Pembahasan Akhir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumbar, Padang, baru-baru ini.

Perda tersebut menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional di bidang jasa konstruksi.

Salah satu poin penting adalah penguatan keterlibatan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) lokal. Penyedia jasa berskala besar dari luar daerah yang mendapatkan pekerjaan di Sumbar didorong melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha daerah serta memprioritaskan subpenyedia jasa lokal.

Skema tersebut diharapkan tidak berhenti pada keterlibatan formal. Kerja sama harus memberikan ruang terjadinya transfer teknologi, pengalaman, manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas sehingga perusahaan jasa konstruksi daerah dapat berkembang dan mengerjakan proyek dengan skala yang semakin besar.

Perda ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak keuangan pelaku usaha lokal yang menjadi mitra KSO maupun subpenyedia. Pengaturan mengenai perlindungan pembayaran diperlukan untuk mengurangi risiko terganggunya arus kas akibat persoalan pembayaran dari kontraktor utama.

Fraksi NasDem melalui Juru Bicara Asril, menekankan bahwa Perda Jasa Konstruksi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan sekaligus mencegah persoalan kerusakan bangunan.

NasDem meminta pengawasan K3, transparansi proses pengadaan serta sertifikasi tenaga kerja menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perda.

Asril juga menyoroti pentingnya Detail Engineering Design (DED) diselesaikan secara matang sebelum proses lelang. Perencanaan yang belum tuntas dinilai dapat memicu perubahan pekerjaan atau addendum berulang dan berpotensi menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Fraksi PAN melalui Juru Bicara Muhayatul mendorong afirmasi terhadap BUJK daerah melalui pelaksanaan KSO dan penggunaan material lokal. PAN juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pemberian sanksi administratif serta pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi nasional.

Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Khairudin Simanjuntak melihat Perda ini sebagai momentum memperkuat posisi pelaku usaha konstruksi Sumbar.

KSO, menurut fraksi tersebut, tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif atau formalitas, tetapi harus menghasilkan transfer teknologi dan peningkatan kemampuan perusahaan daerah.

Gerindra juga mendorong perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi lokal, pemberian ruang terhadap penggunaan material lokal serta percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana Perda.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Zaksai Kasni, SE, MM menyoroti pentingnya tahap implementasi setelah Perda ditetapkan. Berbagai proses studi tiru dan konsultasi yang telah dilakukan dengan kementerian serta lembaga terkait harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dijalankan.



KLIPING BERITA

Golkar mendorong Pemprov Sumbar segera menyiapkan aturan pelaksanaan, dukungan anggaran pelatihan tenaga kerja serta kelembagaan yang mampu memperkuat pelaku usaha konstruksi daerah tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara Gino Irwan menekankan bahwa keberhasilan Perda harus dapat diukur melalui perubahan nyata, di antaranya peningkatan kapasitas BUJK daerah serta semakin baiknya kualitas hasil pembangunan.

Demokrat juga menekankan pengawasan preventif berbasis risiko, transparansi penggunaan belanja modal APBD serta penerapan standar konstruksi yang memperhitungkan karakteristik dan risiko bencana di Sumatera Barat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui Juru Bicara Sri Kumala Dewi, S.Pd.I memberikan perhatian terhadap kualitas proses pengadaan dan perlindungan pelaku usaha.

Fraksi tersebut mengingatkan agar pengadaan jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pada harga penawaran terendah apabila hal itu berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan.

Sri Kumala Dewi juga mendorong adanya pengaturan yang memberikan kepastian pembayaran bagi pengusaha lokal yang terlibat sebagai mitra KSO maupun subpenyedia.

Dalam penyelesaian sengketa kontrak, fraksi tersebut mendorong mekanisme perdata, musyawarah, mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kontrak ditempuh terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan pengesahan Perda Jasa Konstruksi bukan merupakan akhir dari pembahasan, melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang harus memberikan manfaat nyata.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana agar berbagai ketentuan dalam Perda dapat diterapkan secara jelas.

Keberadaan Perda diharapkan menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang lebih sehat. Kontraktor lokal memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas, tenaga kerja mendapatkan akses peningkatan kompetensi, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda Jasa Konstruksi diharapkan tidak berhenti sebagai produk regulasi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pelaku usaha daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat. (h/*)





Ketua DPRD Sumbar, Muhidi memimpin jalannya rapat paripurna



Forkopimda saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumbar





OPD mitra saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV



Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra saat memimpin jalannya rapat kerja Komisi IV dengan OPD mitra



Rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar saat membahas Ranperda Jasa Konstruksi

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 26 September 2026 (13 Rabiul Akhir 1448 H)	4

Perda Jasa Konstruksi Buka Ruang Kontraktor Lokal Naik Kelas

Perda Jasa Konstruksi yang telah disahkan DPRD Provinsi Sumatera Barat membuka ruang lebih besar bagi kontraktor dan tenaga kerja lokal untuk terlibat sekaligus meningkatkan kapasitas dalam pembangunan daerah.

Perda ini juga memperkuat pengawasan mutu pekerjaan, keselamatan kerja, perlindungan pelaku usaha, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.

DPRD Sumbar mengesahkan Ranperda Jasa Konstruksi menjadi Perda dalam Rapat Pembahasan Akhir bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Gedung DPRD Sumbar, Padang, baru-baru ini.

Perda tersebut menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional di bidang jasa konstruksi.

Salah satu poin penting adalah penguatan keterlibatan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) lokal. Penyedia jasa berskala besar dari luar daerah yang mendapatkan pekerjaan di Sumbar didorong melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha daerah serta memprioritaskan subpenyedia jasa lokal.

Skema tersebut diharapkan tidak berhenti pada keterlibatan formal. Kerja sama harus memberikan ruang terjadinya transfer teknologi, pengalaman, manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas sehingga perusahaan jasa konstruksi daerah dapat berkembang dan mengerjakan proyek dengan skala yang semakin besar.

Perda ini juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak keuangan pelaku usaha lokal yang menjadi mitra KSO maupun subpenyedia. Pengaturan mengenai perlindungan pembayaran diperlukan untuk mengurangi risiko terganggunya arus kas akibat persoalan pembayaran dari kontraktor utama.

Fraksi NasDem melalui Juru Bicara Asril, menekankan bahwa Perda Jasa Konstruksi harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan sekaligus mencegah persoalan kerusakan bangunan.

NasDem meminta pengawasan K3, transparansi proses pengadaan serta sertifikasi tenaga kerja menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perda.

Asril juga menyoroti pentingnya Detail Engineering Design (DED) diselesaikan secara matang sebelum proses lelang. Perencanaan yang belum tuntas dinilai dapat memicu perubahan pekerjaan atau addendum berulang dan berpotensi menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Fraksi PAN melalui Juru Bicara Muhayatul mendorong afirmasi terhadap BUJK daerah melalui pelaksanaan KSO dan penggunaan material lokal. PAN juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pemberian sanksi administratif serta pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa konstruksi nasional.

Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Khairudin Simanjuntak melihat Perda ini sebagai momentum memperkuat posisi pelaku usaha konstruksi Sumbar.

KSO, menurut fraksi tersebut, tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif atau formalitas, tetapi harus menghasilkan transfer teknologi dan peningkatan kemampuan perusahaan daerah.

Gerindra juga mendorong perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi lokal, pemberian ruang terhadap penggunaan material lokal serta percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana Perda.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Zaksai Kasni, SE, MM menyoroti pentingnya tahap implementasi setelah Perda ditetapkan. Berbagai proses studi tiru dan konsultasi yang telah dilakukan dengan kementerian serta lembaga terkait harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dijalankan.

Golkar mendorong Pemprov Sumbar segera menyiapkan aturan pelaksanaan, dukungan anggaran pelatihan tenaga kerja serta kelembagaan yang mampu memperkuat pelaku usaha konstruksi daerah tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.



101

KLIPING BERITA

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara Gino Irwan menekankan bahwa keberhasilan Perda harus dapat diukur melalui perubahan nyata, di antaranya peningkatan kapasitas BUJK daerah serta semakin baiknya kualitas hasil pembangunan.

Demokrat juga menekankan pengawasan preventif berbasis risiko, transparansi penggunaan belanja modal APBD serta penerapan standar konstruksi yang memperhitungkan karakteristik dan risiko bencana di Sumatera Barat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui Juru Bicara Sri Kumala Dewi, S.Pd.I memberikan perhatian terhadap kualitas proses pengadaan dan perlindungan pelaku usaha.

Fraksi tersebut mengingatkan agar pengadaan jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pada harga penawaran terendah apabila hal itu berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan.

Sri Kumala Dewi juga mendorong adanya pengaturan yang memberikan kepastian pembayaran bagi pengusaha lokal yang terlibat sebagai mitra KSO maupun subpenyedia.

Dalam penyelesaian sengketa kontrak, fraksi tersebut mendorong mekanisme perdata, musyawarah, mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam kontrak ditempuh terlebih dahulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan pengesahan Perda Jasa Konstruksi bukan merupakan akhir dari pembahasan, melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang harus memberikan manfaat nyata.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana agar berbagai ketentuan dalam Perda dapat diterapkan secara jelas.

Keberadaan Perda diharapkan menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang lebih sehat. Kontraktor lokal memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas, tenaga kerja mendapatkan akses peningkatan kompetensi, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, aman dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda Jasa Konstruksi diharapkan tidak berhenti sebagai produk regulasi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pelaku usaha daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)





SEKRET DAERAH

KORAN	N

INFRASTRUKTUR SUMBAR DIPERKUAT

BREAKING NEWS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 26 SEPTEMBER 2026	6

Perda Jasa Konstruksi Buka Ruang Kontraktor Lokal Naik Kelas, Infrastruktur Sumbar Diperkuat

DPRD Provinsi Sumatera Barat mengesahkan Ranperda Jasa Konstruksi menjadi Perda dalam rapat pembahasan akhir bersama Pemerintah Provinsi Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Padang, baru-baru ini. Perda ini menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan menyesuaikan dengan regulasi nasional di bidang jasa konstruksi.

Salah satu poin utama dalam Perda ini adalah kewajiban bagi penyedia jasa konstruksi skala besar dari luar daerah yang mendapat pekerjaan di Sumbar untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha lokal. Mereka juga harus memprioritaskan subpenyedia jasa lokal.

Skema KSO itu diharapkan tidak hanya menjadi keterlibatan formal. Kerja sama harus memberi ruang terjadinya transfer teknologi, pengalaman, manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas sehingga perusahaan jasa konstruksi daerah dapat berkembang dan mengerjakan proyek yang lebih besar.

Perda juga memberi perhatian pada perlindungan hak keuangan pelaku usaha lokal yang menjadi mitra KSO atau subpenyedia. Pengaturan soal perlindungan pembayaran diperlukan untuk mengurangi risiko terganggunya arus kas akibat persoalan pembayaran dari kontraktor utama.

Fraksi NasDem melalui Juru Bicara Asril menekankan Perda harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan sekaligus mencegah kerusakan bangunan. NasDem meminta pengawasan K3, transparansi pengadaan, dan sertifikasi tenaga kerja menjadi perhatian.

Asril juga menyoroti pentingnya Detail Engineering Design diselesaikan matang sebelum lelang. Perencanaan yang belum tuntas dinilai bisa memicu addendum berulang dan pekerjaan menumpuk di akhir tahun anggaran.

Fraksi PAN melalui Juru Bicara Muhayatul mendorong afirmasi terhadap BUJK daerah melalui pelaksanaan KSO dan penggunaan material lokal. PAN juga menekankan kejelasan pembagian kewenangan dalam pemberian sanksi administratif serta pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi daerah yang terintegrasi dengan sistem nasional.

Fraksi Gerindra melalui Juru Bicara Khairudin Simanjuntak melihat Perda ini sebagai kesempatan memperkuat posisi pelaku usaha konstruksi Sumbar. Menurut fraksi itu, KSO tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif atau formalitas, tetapi harus menghasilkan transfer teknologi dan peningkatan kemampuan perusahaan daerah.

Gerindra juga mendorong perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja konstruksi lokal, pemberian ruang penggunaan material lokal, serta percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana.

Fraksi Golkar melalui Juru Bicara Zaksai Kasni menyoroti pentingnya tahap implementasi setelah Perda ditetapkan. Berbagai proses studi tiru dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang bisa dijalankan.

Golkar mendorong Pemprov Sumbar segera menyiapkan aturan pelaksanaan, dukungan anggaran pelatihan tenaga kerja, serta kelembagaan yang mampu memperkuat pelaku usaha konstruksi daerah tanpa mengabaikan persaingan usaha yang sehat.

Fraksi Demokrat melalui Juru Bicara Gino Irwan menekankan keberhasilan Perda harus diukur melalui perubahan nyata, seperti peningkatan kapasitas BUJK daerah dan kualitas hasil pembangunan. Demokrat juga menekankan pengawasan preventif berbasis risiko, transparansi penggunaan belanja modal APBD, serta penerapan standar konstruksi yang memperhitungkan risiko bencana di Sumatera Barat.



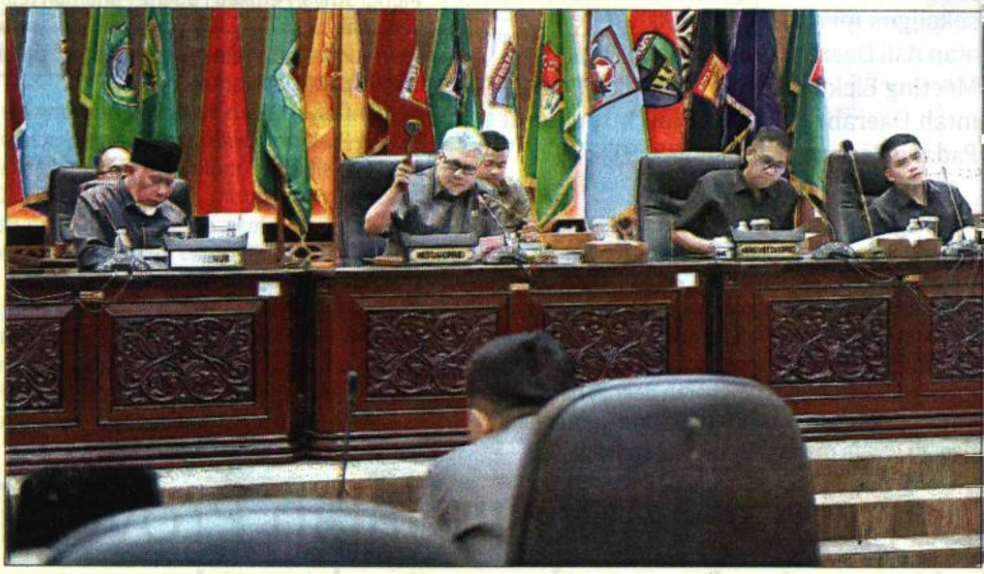
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui Juru Bicara Sri Kumala Dewi memberi perhatian pada kualitas proses pengadaan dan perlindungan pelaku usaha. Fraksi itu mengingatkan agar pengadaan jasa konstruksi tidak hanya berorientasi pada harga penawaran terendah jika berpotensi mengorbankan kualitas.

Sri Kumala Dewi juga mendorong pengaturan yang memberi kepastian pembayaran bagi pengusaha lokal yang terlibat sebagai mitra KSO atau subpenyedia. Dalam penyelesaian sengketa kontrak, fraksi itu mendorong mekanisme perdata, musyawarah, mediasi, atau mekanisme yang tersedia dalam kontrak ditempuh lebih dulu sesuai ketentuan hukum.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, pengesahan Perda bukan akhir dari pembahasan, melainkan awal dari pelaksanaan kebijakan yang harus memberi manfaat nyata. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didorong segera menyusun Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana agar berbagai ketentuan dalam Perda dapat diterapkan secara jelas.

Keberadaan Perda diharapkan menciptakan ekosistem jasa konstruksi yang lebih sehat. Kontraktor lokal memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas, tenaga kerja mendapatkan akses peningkatan kompetensi, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Perda Jasa Konstruksi diharapkan tidak berhenti sebagai produk regulasi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pelaku usaha daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memastikan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat. *



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi mengetok palu saat pengesahan Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar menjadi Perda.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam rapat paripurna Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL *Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri dan M. Iqra Chissa saat rapat paripurna Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar.*



KOMISI *IV DPRD Sumbar menyampaikan pandangan dan masukan dalam rapat pembahasan Ranperda Jasa Konstruksi bersama OPD terkait.*



KOMISI *IV DPRD Sumbar serius membahas substansi pasal-pasal Ranperda Jasa Konstruksi guna memberikan kepastian hukum di sektor konstruksi daerah.*



KOMISI *IV DPRD Sumbar menyampaikan pandangan dan masukan dalam rapat pembahasan Ranperda Jasa Konstruksi bersama OPD terkait.*



RAPAT *koordinasi dan sinkronisasi pembahasan pasal-pasal Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar.*



RAPAT *sinkronisasi akhir draf Ranperda Jasa Konstruksi Sumbar dilaksanakan sebagai persiapan sebelum dibawa ke rapat paripurna DPRD.*



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 29 SEPTEMBER 2026	4

MERIAHKAN HARI JADI SUMBAR KE-81

DPRD Sumbar Gelar Aksi Sehat Bersama Parlemen


MUHIDI

PADANG, KP - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meramaikan kegiatan 'Aksi Sehat Bersama Parlemen' yang digelar di Kantor DPRD Sumbar, Rabu besok (30/9).

Perhelatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tersebut mengusung tema 'Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh'.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi masyarakat yang sehat, produktif, dan solid.

"Kalau masyarakat kita sehat, tentu kita memiliki kekuatan untuk bangkit. Sumbar yang sehat akan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Sumbar yang tumbuh dan tangguh," ujar Muhidi, Senin (28/9).

Rangkaian kegiatan yang dipusatkan di Gedung DPRD Sumbar mulai pukul 07.00 WIB ini meliputi jalan santai, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga aksi donor darah.

Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon menambahkan, kegiatan ini dikonsep untuk mendekatkan anggota dewan dengan masyarakat secara langsung. Selain itu, pihak penyelenggara menggandeng Dinas Koperasi dan UKM Sumbar dengan menyediakan 7.000 paket jajanan UMKM lokal serta banjir doorprize berupa sepeda listrik, sepeda, dan alat rumah tangga. **(fai)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 29 SEPTEMBER 2026	2

Varel Oriano Salurkan Alsintan untuk Belasan Kelompok Tani

DHARMASRAYA, HALUAN — Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Varel Oriano, kembali kucurkan dana pokir untuk petani berupa alsintan melalui Dinas Pertanian Provinsi Sumbar. Bantuan ini diserahkan langsung kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Senin (28/9).

Alsintan tersebut akan disalurkan 15 kelompok tani serta paket jaringan irigasi. Bantuan tersebut bersumber dari dana aspirasi Varel Oriano.

Usai penyerahan alsintan dilanjutkan dengan temu ramah dengan seluruh kelompok tani penerima bantuan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dharmasraya. 15 kelompok tani penerima alsintan *handtraktor* yakni Harapan Sempurna, Karya, Pincuran Tujuh, Rawang Bayun, Sawah Laweh, Tegas, Usaha Baru dan Mulya.

Sementara Kelompok Tani Penerima Jaringan Irigasi tersier yakni Kelompok Tani Rawang Bayun, Ranah Talang, Fajar, Tanah Maju, Laju, Harmonis, dan Ikrar. Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani bagian dari dukungan terhadap sektor pertanian dan peningkatan sarana produksi bagi petani di daerah Dharmasraya.

Anggota DPRD Provinsi Fraksi PDI Perjuangan, Varel Oriano, mengatakan bantuan yang bersumber dari dana aspirasinya tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok tani penerima.

"Alsintan ini diharapkan dapat membantu petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian secara lebih efektif," imbuhnya.

Selain bantuan alsintan, paket jaringan irigasi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kelompok tani. Infrastruktur irigasi memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan air untuk lahan pertanian, terutama dalam menunjang kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Kelompok tani penerima diharapkan dapat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan menjaga serta merawat fasilitas yang telah diberikan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

"Penyerahan bantuan ini menjadi bentuk perhatian saya terhadap kebutuhan kelompok tani di Dharmasraya, khususnya untuk mendukung aktivitas pertanian dan penguatan sarana prasarana pertanian," terang Varel yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar. **(h/mdi)**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 12 September 2026 (29 Rabiul Awal 1448 H)	4

PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2026

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbar Soroti Kemandirian Fiskal dan Pemulihan Bencana

Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, dengan menyoroti sejumlah persoalan strategis mulai dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, penutupan defisit hingga percepatan pemulihan pascabencana.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam pandangan fraksi, DPRD tidak hanya melihat perubahan postur anggaran dari sisi angka, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana perubahan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp6,294 triliun menjadi Rp6,610 triliun atau bertambah Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Namun, kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Dana Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 19,64 persen.

Di sisi lain, PAD justru mengalami penurunan 8,73 persen atau sekitar Rp306,57 miliar, menjadi Rp3,206 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian hampir seluruh fraksi karena menunjukkan masih besarnya ketergantungan fiskal Sumbar terhadap pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah meningkat cukup signifikan dari Rp6,409 triliun menjadi Rp6,979 triliun atau bertambah Rp570,02 miliar. Salah satu kenaikan terbesar terdapat pada belanja modal yang mencapai Rp941,95 miliar, naik hampir 100 persen atau Rp470,82 miliar. Dengan struktur tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 masih menyisakan defisit murni sebesar Rp176,56 miliar.

Fraksi PKS melalui juru bicara Syofian Hendri, S.Pd.I., MM., meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap penurunan sejumlah target penerimaan pajak. Salah satunya Pajak Air Permukaan (PAP) yang diturunkan dari Rp594 miliar menjadi Rp210 miliar. PKS juga mempertanyakan penurunan target Pajak Alat Berat dari Rp10 miliar menjadi Rp1 miliar.

Menurut PKS, penyesuaian target memang harus dilakukan berdasarkan kondisi riil dan kemampuan pemungutan. Namun, penurunan target dalam jumlah besar perlu disertai penjelasan mengenai potensi yang sebenarnya tersedia serta strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan.

Fraksi PKS juga mendorong adanya terobosan dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di sisi lain, fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja retribusi jasa umum yang pada semester I telah mencapai hampir 60 persen dan mendorong agar perangkat daerah yang mampu meningkatkan pendapatan diberikan dukungan anggaran secara proporsional.

Sorotan juga diberikan terhadap kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang melonjak dari sekitar Rp136 miliar menjadi Rp522 miliar. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar empat bulan, PKS mengingatkan pemerintah agar percepatan pembangunan tidak mengorbankan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Fraksi tersebut juga meminta penjelasan terkait meningkatnya SiLPA Dana Earmark berdasarkan hasil audit BPK yang mencapai Rp284,67 miliar.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menempatkan persoalan kemandirian fiskal sebagai salah satu perhatian utama. Melalui juru bicara yang mewakili Ketua Fraksi Golkar Yogi Pratama, SE., fraksi menilai meningkatnya porsi dana transfer di tengah penurunan PAD perlu menjadi bahan evaluasi serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

Golkar meminta Pemprov Sumbar menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk melakukan penertiban terhadap tunggakan pajak kendaraan dinas dan ASN.

Fraksi Golkar juga menyoroti kembali target PAP dan Pajak Alat Berat. Menurut fraksi, penetapan target awal harus didasarkan pada data potensi yang akurat sehingga ketika dilakukan perubahan tidak menimbulkan kesan bahwa target sebelumnya tidak disusun berdasarkan perhitungan yang memadai.

Selain pendapatan, Golkar mempertanyakan realisasi belanja modal yang pada semester I baru mencapai 4,68 persen. Dengan adanya tambahan belanja modal sebesar Rp470,82 miliar, pemerintah diminta memberikan pemetaan yang jelas terkait status kontrak dan kesiapan masing-masing proyek agar tidak terjadi gagal serap pada akhir tahun anggaran.

Persoalan defisit murni Rp176,56 miliar juga menjadi perhatian Golkar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka sumber penutupan defisit tersebut serta bagaimana pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Dr. Ir. H. Indra Catri, MT., menekankan bahwa perubahan APBD harus mampu memperkecil kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.

KLIPING BERITA

Gerindra mempertanyakan sumber penutup defisit murni Rp176,56 miliar dan meminta agar langkah rasionalisasi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan dasar masyarakat.

Selain itu, Gerindra mendorong Pemprov Sumbar menyelesaikan berbagai kewajiban daerah, termasuk utang belanja, pekerjaan lintas tahun dan kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten dan kota yang telah diverifikasi secara legal dan teknis.

Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian. Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana, khususnya di Pasaman dan sejumlah wilayah terdampak lainnya, BTT justru mengalami penurunan 18,85 persen, dari Rp25 miliar menjadi Rp20,28 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah.

Gerindra juga meminta adanya koreksi terhadap sejumlah ketidaksesuaian persentase kenaikan SiLPA dan pencatatan nominal defisit dalam dokumen Ranperda. Ketelitian dokumen anggaran dinilai penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus bagian dari kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Partai Demokrat melalui Ketua Fraksi Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E., menekankan pentingnya penerapan prinsip Performance Based Budgeting, Risk Based Budgeting, serta Value for Money dalam perubahan anggaran.

Demokrat secara khusus menyoroti persoalan database Pajak Air Permukaan. Dengan target PAP yang dipangkas hingga 64,65 persen, pemerintah dinilai perlu membangun satu basis data yang terintegrasi mengenai objek dan potensi PAP. Penagihan aktif kepada perusahaan yang memanfaatkan air permukaan juga dinilai perlu diperkuat.

Pada sektor infrastruktur, Demokrat mendorong percepatan pembangunan jalan dan irigasi berdasarkan indikator kerusakan yang objektif. Pengawasan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga harus diperketat agar anggaran perbaikan infrastruktur tidak terus terkuras akibat kerusakan berulang.

Dalam bidang pendidikan, Demokrat meminta transparansi terkait daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), termasuk persoalan di SMAN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok. Fraksi menegaskan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik harus menjamin hak anak memperoleh pendidikan secara adil.

Demokrat juga meminta penyelesaian pemeriksaan kasus disiplin ASN dilakukan secara profesional. Sementara dalam bidang sosial ekonomi, program pengentasan kemiskinan diarahkan agar lebih berbasis pemberdayaan UMKM dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara H. Daswippetra, SE., M.Si., Dt. Manjinjiang Alam, menilai penurunan target PAD menjadi persoalan serius. PPP menyebut proyeksi PAD 2026 sebagai salah satu yang terendah dalam 10 tahun terakhir dan mengaitkannya dengan lemahnya perencanaan pendapatan.

Karena itu, PPP mendorong evaluasi terhadap tata kelola pendapatan sekaligus penyegaran pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan daerah apabila diperlukan.

PPP juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dana pengembalian TKD yang berkaitan dengan daerah terdampak bencana. Dana tersebut diminta benar-benar diarahkan untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat terdampak, seperti renovasi ruang kerja, kantor maupun taman.

Persoalan kelangkaan solar di sejumlah SPBU Sumbar juga disampaikan PPP. Fraksi meminta Pemprov Sumbar lebih aktif berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan baik dan kebutuhan masyarakat serta sektor produktif tidak terganggu.

Di sisi pembiayaan, PPP mempertanyakan urgensi penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp92 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan target, manfaat serta imbal hasil yang diharapkan dari penambahan modal tersebut sehingga kebijakan tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. DPRD Sumbar meminta perubahan anggaran menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan penerimaan daerah, mempercepat pembangunan dan memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Persoalan kemandirian fiskal menjadi salah satu benang merah pandangan fraksi. Penurunan PAD di tengah kenaikan TKD dinilai perlu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki basis data potensi penerimaan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.

Pada saat yang sama, besarnya tambahan belanja modal harus diikuti kesiapan pelaksanaan. DPRD mengingatkan agar percepatan serapan anggaran tidak hanya mengejar realisasi secara administratif, tetapi tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, transparansi serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Isu pemulihan bencana juga menjadi perhatian penting. DPRD meminta pemerintah memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur, memulihkan aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat terdampak agar proses pemulihan tidak berjalan lamban.

Setelah penyampaian pandangan umum, kelima fraksi—PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PPP—pada prinsipnya dapat menerima Ranperda Perubahan APBD Sumbar Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

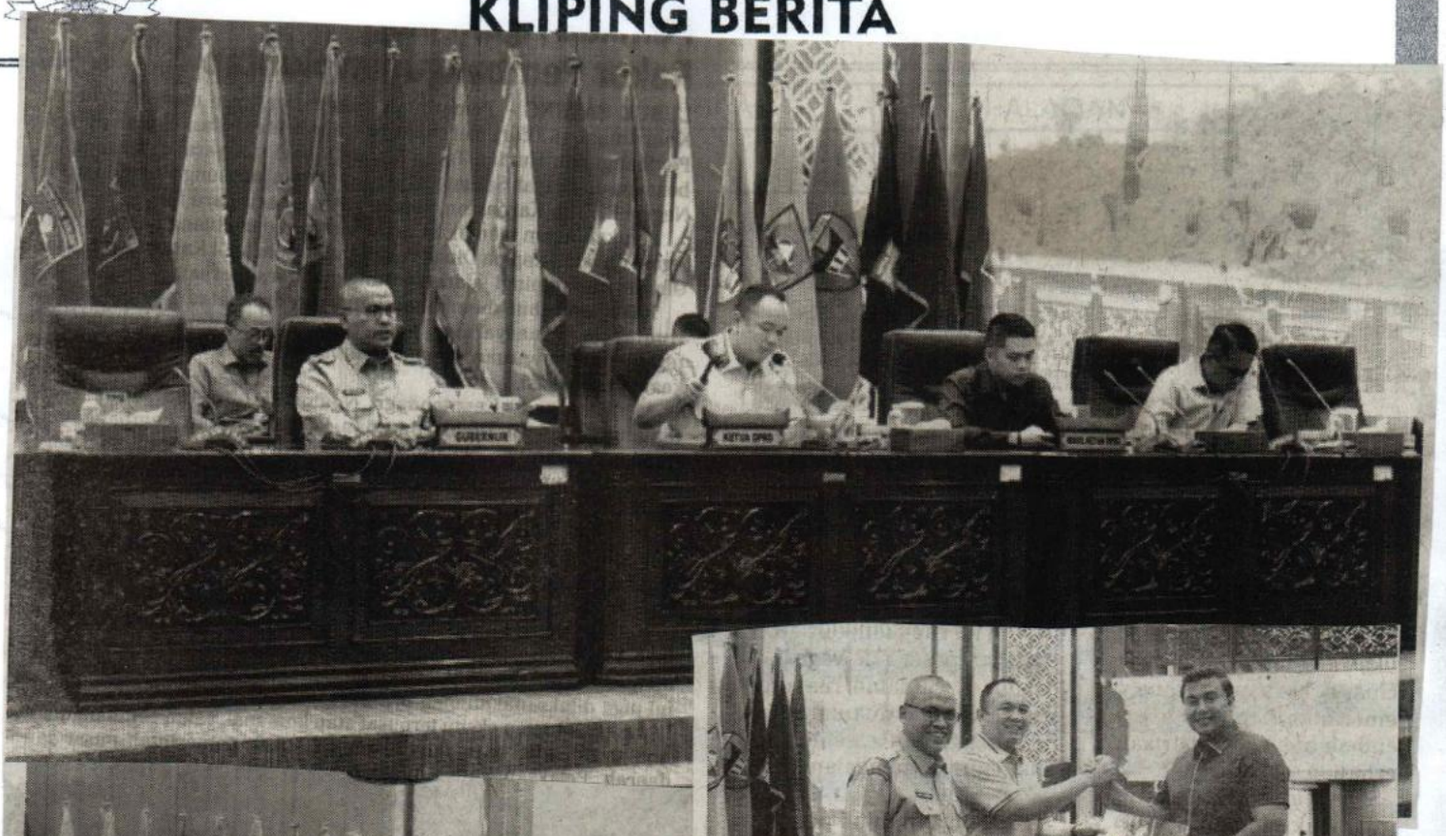
Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan dan pertanyaan yang harus dijawab Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara komprehensif, rasional dan berbasis data.

DPRD Sumbar menegaskan fungsi penganggaran dan pengawasan akan terus dijalankan untuk memastikan perubahan APBD 2026 tidak hanya menghasilkan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.(*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA







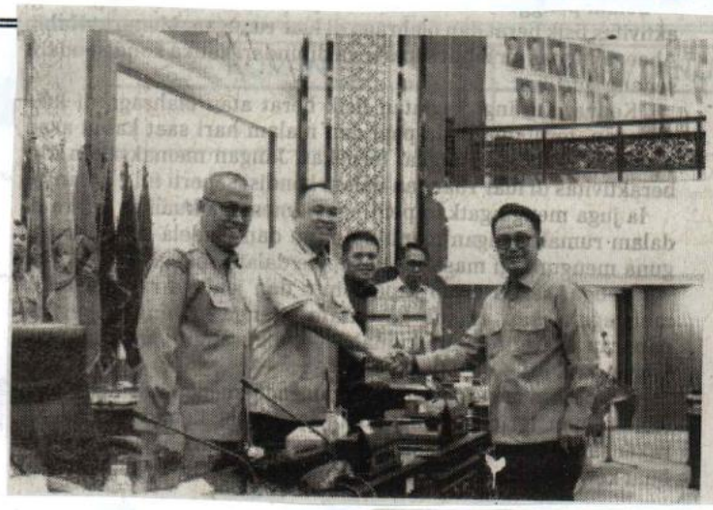






SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA









SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 29 SEPTEMBER 2026	12

Ketua DPRD Sumbar: Pengetahuan, Relasi, dan Kepercayaan Jadi Modal Penting UMKM Untuk Naik Kelas

KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya bertumpu pada ketersediaan modal finansial semata.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM), Senin (28/9).

Muhidi menekankan bahwa para pelaku usaha harus mengutamakan investasi pengetahuan, keterampilan (skill), serta reputasi guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah pesatnya perubahan pola konsumsi dan kemajuan teknologi.

"Investasi yang membuat kita sukses tanpa modal adalah investasi pengetahuan dan skill. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki," kata Muhidi.

Menurutnya, selain pengetahuan dan keteram pilan, jaringan relasi serta kepercayaan (trust) merupakan aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat menentukan bertahannya sebuah brand di mata konsumen.

Ia mengimbau para pengusaha mikro untuk konsisten menjaga kualitas produk, kejujuran dalam pelayanan, serta mengelola efisiensi waktu dan kesehatan diri dengan seimbang.

"Selain modal, investasi yang penting adalah waktu dan kesehatan. Mari kita jaga kepercayaan konsumen dengan baik," tambahnya.

Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI ini merupakan bagian dari deretan 19 angkatan pelatihan yang diagendakan Pemprov Sumbar sepanjang tahun 2026 guna mendorong UMKM lokal naik kelas dan berdaya saing global. *



KLIPING BERITA



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi memberikan pemaparan materi mengenai pentingnya investasi ilmu dan reputasi dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI di Aula PLUT KUMKM Sumbar*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi foto bersama para peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan XVI usai pembukaan acara di Aula PLUT KUMKM Sumbar.*



KETUA *DPRD Sumbar Muhidi berinteraksi dan memberikan motivasi kepada para pelaku usaha mikro terkait penguatan modal pengetahuan dan pengelolaan kepercayaan konsumen.*



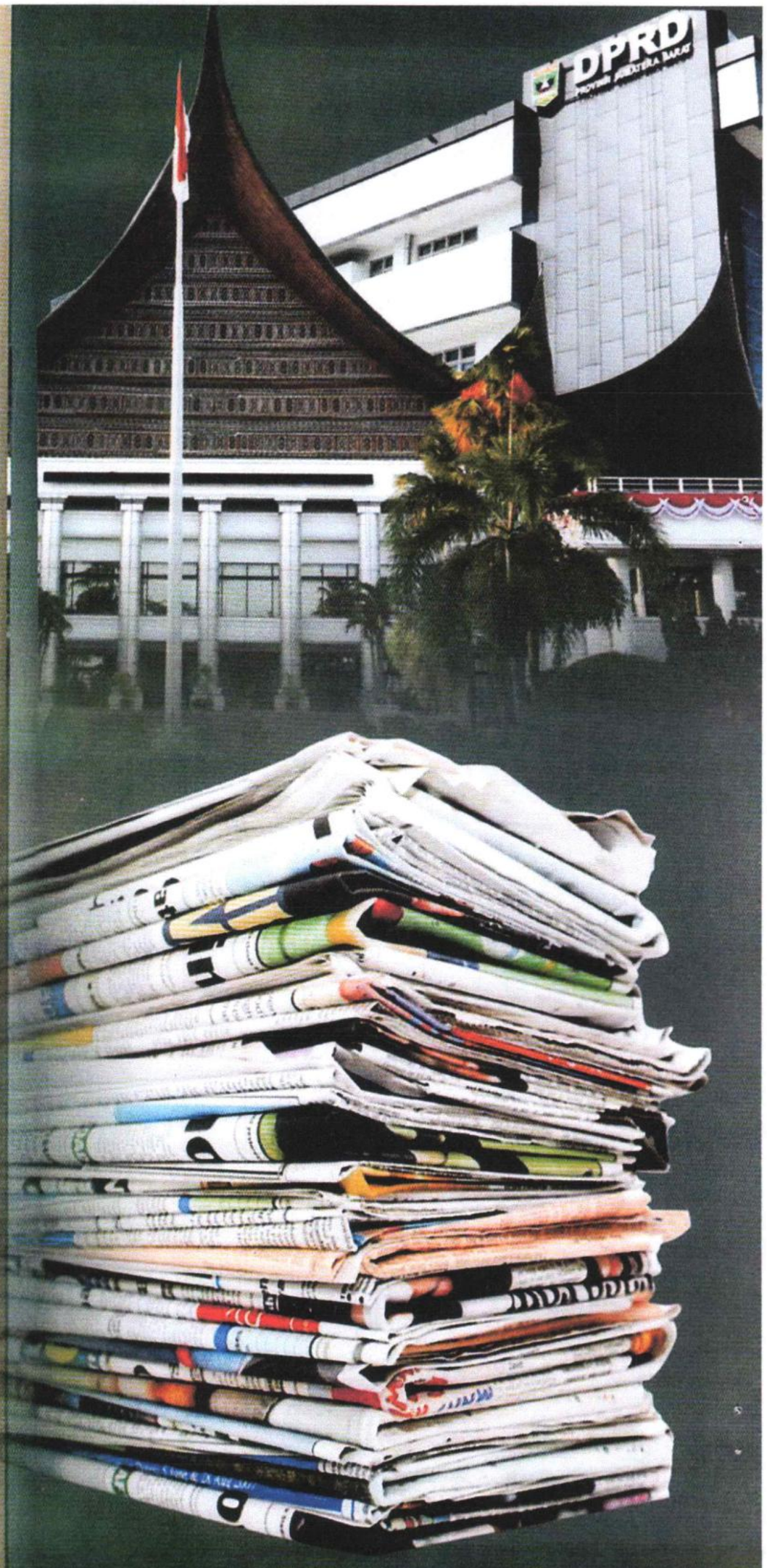
KETUA *DPRD Sumbar Muhidi menegaskan komit men dukungan legislatif dalam mendorong UMKM Sumbar agar naik kelas dan mampu berdaya saing global.*



SUMATERA BARAT

TUAH SAKATO

KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat